

L A P O R A N
A K H I R T A H U N
2017



PESAN DARI

Ketua Majelis Wali Amanat

Indonesia Climate Change Trust Fund

Salam sejahtera,

Sudah delapan tahun ICCTF berdiri sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim di Indonesia. Melalui dinamika dan tantangan yang cukup besar, ICCTF telah membuktikan bahwa lembaga ini mampu terus berkembang dan berkontribusi terhadap tujuan nasional di bidang perubahan iklim. Pada tahun 2017, ICCTF terus melanjutkan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan terus memperkuat organisasinya dalam menuju lembaga *trust fund* yang mandiri dan independen. ICCTF juga memainkan peran penting baik di tingkat nasional maupun internasional dalam mempromosikan inisiatif Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Hingga tahun 2017, ICCTF telah melaksanakan 63 proyek pada fokus area mitigasi berbasis lahan, energi, serta adaptasi dan ketangguhan. Berbagai proyek tersebut telah memberikan dampak positif dengan adanya peningkatan kualitas lingkungan, pemberdayaan serta peningkatan sumber penghidupan masyarakat termasuk petani dan nelayan. Aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diharapkan terus berlanjut dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK). Untuk itu, ke depannya ICCTF diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah

Kaca (GRK), namun juga dapat memastikan penurunan emisi ini seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, ICCTF diharapkan dapat mendukung tercapainya *Goal 13 Sustainable Development Goals* (SDGs) tentang Perubahan Iklim sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017.

ICCTF diharapkan terus meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola dana perubahan iklim serta terus berupaya mengakses berbagai sumber pendanaan yang ada. Segala pembelajaran dan praktik baik dari pelaksanaan program ICCTF diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung ICCTF sampai saat ini. Kami tetap mengharapkan dukungan dari berbagai pihak di tahun-tahun mendatang.

Salam hormat,

Ketua Majelis Wali Amanat ICCTF

Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Kementerian PPN/BAPPENAS



Dr. Tonny Wagey
Direktur Eksekutif ICCTF



PRAKATA

Direktur Eksekutif ICCTF

Sejak bergabung pada bulan Juli 2017, saya diberikan kesempatan untuk mempelajari tata kelola dan dinamika ICCTF. Salah satu hasil yang saya dapatkan adalah bahwa ICCTF merupakan satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia. ICCTF mendukung mitra-mitra di Indonesia untuk melaksanakan inisiatif penanganan perubahan iklim pada tiga fokus area, yaitu Mitigasi berbasis Lahan, Energi serta Adaptasi dan Ketangguhan. Di tahun 2017, ICCTF mengimplementasikan aksi penanganan perubahan iklim pada dua fokus area yakni mitigasi berbasis lahan serta adaptasi dan ketangguhan. Selain itu, ICCTF juga terus mengembangkan fokus area energi sekaligus inisiatif program baru seperti *marine based area*.

Pada tahun 2017, ICCTF mengelola 42 proyek yang lokasinya tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Proyek-proyek ini terdiri dari 31 proyek mitigasi berbasis lahan dan 11 proyek adaptasi dan ketangguhan. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengelolaan hutan dan gambut, rehabilitasi lahan kritis, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan air, kegiatan terkait sumber penghidupan, pemodelan iklim, serta pemetaan kerawanan di sektor pertanian dan perikanan. Saya yakin, proyek-proyek ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat serta dapat dijadikan percontohan dan diperluas cakupannya ke wilayah lain. Satu hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah pada tahun 2018, ICCTF akan mulai menangani proyek kelautan dengan rencana mengelola program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang (COREMAP).

Kami percaya bahwa ICCTF dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dana untuk penanganan perubahan iklim di Indonesia. Sebagai satu-satunya lembaga dana perwalian untuk perubahan iklim di Indonesia, ICCTF akan terus memperluas perannya di tingkat nasional, regional maupun global. Beberapa kegiatan strategis telah dilaksanakan ICCTF seperti keterlibatan dalam UNFCCC COP 23 di Bonn Jerman, pengembangan *Indonesia Blue Carbon Strategy Framework* (IBCSF), pengembangan *integrated proposal* dan lain sebagainya. ICCTF akan terus berupaya meningkatkan tata kelola dan kinerja untuk mencapai hasil yang lebih baik di tahun mendatang.

Mewakili Sekretariat ICCTF, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan dan capaian ICCTF di tahun 2017, khususnya kepada Majelis Wali Amanat ICCTF, pemerintah, donor, mitra-mitra dan seluruh manajemen serta staf ICCTF.

Izinkan kami menyampaikan Laporan Tahunan ICCTF 2017 untuk berbagi pengalaman dan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan untuk tetap terus mendukung ICCTF dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan isu penanganan perubahan iklim di Indonesia. Kritik dan saran membangun dari para pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja ICCTF ke depan. Terima kasih.

Ringkasan Eksekutif

ICCTF merupakan instrumen penting bagi Pemerintah Indonesia untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam RAN/RAD-GRK dan RAN API. ICCTF dibentuk pada tahun 2009 dalam kerangka “*Preparatory Arrangements for the Indonesia Climate Change Trust Fund (PREP-ICCTF)*” yakni proyek Pemerintah Indonesia yang difasilitasi UNDP sebagai pengelola dana interim. Pada tahun 2013, ICCTF menjadi salah satu Satuan Kerja (Satker) di Kementerian PPN/Bappenas melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 3 Tahun 2013.

Sejak didirikan pada tahun 2009, ICCTF telah berhasil mendanai proyek-proyek mitigasi dan adaptasi secara nasional melalui implementasi 63 proyek yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaan proyek-proyek ini, ICCTF berkolaborasi baik dengan institusi pemerintah, universitas, maupun organisasi masyarakat sipil. Pada periode 2016-2018, ICCTF mengelola sebanyak 42 proyek pada fokus area mitigasi berbasis lahan serta adaptasi dan ketangguhan. Pada periode ini ICCTF mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Inggris melalui UKCCU, Pemerintah Amerika melalui USAID, Kerajaan Denmark melalui DANIDA, serta bantuan teknis dari BMUB Jerman melalui GIZ INFIS.

Pada tahun 2017 ICCTF mengelola dana sejumlah Rp 58,3 miliar dengan sumber pendanaan meliputi Pemerintah Indonesia, DANIDA, USAID dan UKCCU. Hingga tahun 2017, telah banyak capaian yang dihasilkan dari aksi mitigasi dan adaptasi ICCTF. Secara keseluruhan, proyek-proyek ICCTF berpotensi untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 9,5 juta ton CO₂eq. Pada tahun 2017, melalui proyek-proyek ICCTF telah dibangun berbagai infrastruktur untuk mendukung kegiatan masyarakat diantaranya sekat kanal, sumur bor, sumur resapan, embung dan tangki penampungan air, menara pemantau, pos jaga, dan biodigester. Selain itu juga telah tersusun berbagai dokumen kebijakan termasuk peraturan desa untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi. Secara lebih jauh, semua upaya ini berdampak pada meningkatnya kapasitas serta perekonomian masyarakat setempat.

Tahun 2017 ditandai dengan komitmen pemerintah Indonesia melalui peluncuran Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Bambang P. S. Brodjonegoro, pada bulan Oktober 2017 di Jakarta serta pada bulan November 2017 di Bonn dalam acara UNFCCC COP 23. Kebijakan ini mempromosikan pembangunan rendah karbon yang sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. ICCTF bersama mitra-mitranya akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan PPRK ini.

Di tahun 2018, ICCTF akan melanjutkan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diantaranya melalui *scaling-up* proyek-proyek yang dinilai berdampak signifikan serta melaksanakan program tata kelola hutan dan gambut di wilayah baru (KHG Sungai Siak-Kampar di Riau dan KHG Sungai Kapuas-Barito di Kalimantan Tengah). ICCTF juga akan terus melanjutkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan inisiatif program baru untuk mengakses berbagai sumber pendanaan seperti *Global Environment Facility* (GEF), *NAMA Facility* dan lainnya. Beberapa program yang tengah dikembangkan diantaranya IBC-Metro Bimindo, *Indonesia Green Cooling Program*, serta *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP-CTI). Pengembangan kelembagaan ICCTF juga terus dilakukan untuk mendukung ICCTF menjadi *nationally managed independent trust fund*.

Laporan ICCTF Tahun 2017 memuat perkembangan serta capaian kegiatan ICCTF selama tahun 2017 dan rencana kegiatan per kuartal di tahun 2018. Berbagai aktivitas terkait dengan siklus manajemen proyek, pengembangan inisiatif baru, serta komunikasi dan *outreach* disampaikan dalam laporan ini. Dengan adanya pelaporan ini diharapkan semua pihak dapat mengetahui kontribusi dan peran ICCTF dalam mendukung Pemerintah untuk mengatasi isu perubahan iklim terutama dalam hal pendanaan mitigasi dan adaptasi GRK. ICCTF juga terbuka dengan segala masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Benang Merah



Perubahan iklim telah menjadi isu global yang dihadapi seluruh penduduk dunia termasuk Indonesia. Bersama dengan 169 negara lainnya dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Indonesia mengadopsi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global abad ini. Kesepakatan ini juga krusial untuk meningkatkan aksi dan investasi menuju masa depan yang rendah karbon, berketahanan iklim dan berkelanjutan. Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Paris melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan menyampaikan dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC). Dalam dokumen tersebut, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri serta hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Dalam rangka koordinasi aksi penanggulangan perubahan iklim, Pemerintah membutuhkan lembaga pendanaan perubahan iklim nasional yang andal dan mampu menerapkan *standar fiduciary* yang diakui secara internasional. Untuk itu, pada tahun 2009 Pemerintah membentuk *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) sebagai lembaga pendanaan perubahan iklim yang dikelola secara langsung oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dan menyalurkan dana dalam mendukung kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Sejauh ini ICCTF telah melalui dua fase kelembagaan, yaitu fase pertama, fase persiapan (PREP-ICCTF) periode 2010-2014 dimana *United Nation Development Programme* (UNDP) bertindak sebagai *interim trustee*, serta fase kedua sejak tahun 2015 sebagai lembaga dana perwalian nasional (*Nationally Managed Trust Fund*) dengan bentuk kelembagaan sebagai Satuan Kerja (Satker) di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Perbedaan mendasar dari kedua fase ini adalah pada fase pertama, sistem keuangan yang digunakan adalah sistem UNDP; sementara pada fase kedua menggunakan mekanisme APBN.



ICCTF telah berupaya mengimplementasikan kebijakan perubahan iklim Indonesia dengan mengelola sumber daya domestik maupun pendanaan internasional dengan menyalurkannya ke program yang selaras dengan rencana pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) serta mendukung target penurunan emisi sesuai dengan NDC Indonesia. ICCTF mendukung target penurunan emisi sesuai melalui 3 bidang kegiatan (*thematic windows*), yaitu: mitigasi berbasis lahan, energi, serta adaptasi dan ketangguhan. Hingga saat ini, ICCTF telah mengimplementasikan 63 program penanganan perubahan iklim yang tersebar di 19 provinsi di Indonesia.

Implementasi 63 program yang didanai ICCTF telah menghasilkan banyak pembelajaran penting terkait aspek kebijakan dan pendanaan. Kerjasama sektoral menjadi sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal. Dampak positif yang dihasilkan dapat diperluas dan ditingkatkan melalui replikasi dan peningkatan skala (*scaling-up*) program. Sumber pendanaan dapat disesuaikan dengan level intervensi serta luasan cakupannya. Beberapa sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan diantaranya dana desa dan dana pemerintah lainnya melalui intervensi terhadap rencana pembangunan daerah, serta dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak swasta.

Pada tahun 2017, ICCTF telah melakukan perhitungan terhadap potensi penurunan emisi GRK dari 50 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2010 hingga 2017. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa potensi penurunan emisi gas rumah kaca dari proyek-proyek ICCTF mencapai 9,5 juta ton CO₂eq. Angka ini setara dengan 0,91% dari target NDC 2020 yaitu sebesar 1.050 juta ton CO₂eq. Untuk meningkatkan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK, ICCTF terus berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan yang ada serta menyalurkannya untuk mengimplementasikan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Dengan status sebagai Satker, ICCTF saat ini memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *trust fund*. Hal ini terkait dengan perlakuan hibah yang harus mengikuti sistem keuangan negara sehingga ICCTF tidak

memiliki fleksibilitas dalam menerima dan menyalurkan dana ke semua pihak. ICCTF juga memiliki keterbatasan dalam mengelola pengumpulan dana dalam bentuk investasi (*endowment, sinking, dan atau revolving fund*). Untuk itu, kedepannya ICCTF perlu melepaskan diri dari status Satker dan bertransformasi ke bentuk kelembagaan baru yang lebih fleksibel dan independen. ICCTF diharapkan dapat menjadi salah satu *National Implementing Entity* (NIE) yang terakreditasi dan dapat mengakses dana perubahan iklim dari berbagai sumber pendanaan baik dari dalam maupun luar negeri. ICCTF harus mampu mengantisipasi perubahan dalam dinamika pendanaan pembangunan di Indonesia termasuk dalam konteks perubahan iklim. Dengan adanya rencana pembentukan lembaga pendanaan baru yakni Badan Layanan Umum Perubahan Iklim (BLU-PI) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ICCTF harus dapat mencari terobosan program yang inovatif yang dapat membedakan ICCTF dengan lembaga pendanaan perubahan iklim lainnya. Sebagai contoh, ICCTF dapat mulai mengembangkan program dan fokus untuk mengakses pendanaan di bidang energi terbarukan.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman publik terhadap perubahan iklim sangat penting untuk mendukung target pembangunan nasional. ICCTF akan terus berupaya meningkatkan strategi komunikasi dan penjangkauan untuk mendukung kampanye perubahan iklim serta untuk meningkatkan citra dan eksistensi ICCTF sebagai lembaga dana perwalian perubahan iklim di Indonesia. Upaya ini juga dilakukan untuk menyebarluaskan capaian dan pembelajaran program ICCTF untuk kemudian dilanjutkan atau direplikasi oleh pihak lainnya.

Sejak dibentuk hingga saat ini, ICCTF telah bekerja sama serta mendapatkan dukungan dari berbagai pihak antara lain lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, lembaga donor, organisasi masyarakat sipil, pihak swasta, universitas dan mitra pembangunan lainnya. Selanjutnya untuk bergerak maju menuju "*Nationally Managed Trust Fund*", serta untuk menjalankan perannya dalam mendukung target pembangunan nasional, ICCTF akan tetap memerlukan dukungan dari semua pihak. Oleh karenanya, ICCTF membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang ingin bermitra dan memberikan dukungan untuk pengembangan ICCTF di masa mendatang.

Capaian Da

9,5
juta ton CO₂ eq



Karbon yang tersimpan melalui kegiatan penanaman kembali dan rehabilitasi

221 liputan
media online, cetak, TV dan radio



350.560
pohon yang ditanam



9.150
siswa yang terlibat



4 peta kerawanan atas perubahan iklim
(sepanjang Pesisir Laut Jawa, Subang, Gorontalo dan Rote Ndao)



81
desa yang terlibat langsung



1.317
orang yang terlibat langsung



203
sekat kanal



647
sumur bor



3.365
desa yang terlibat



200
sumur serapan



100
tangki penampung air



9 lokasi prosedur penanganan kebakaran hutan



38 & **11**
peraturan desa

Raja-raja di Maluku setuju untuk mengadopsi isu perubahan iklim dalam perencanaan kampung

lam Angka



SETARA DENGAN
EMISI ▶



5 juta penduduk Indonesia per tahun

Emisi CO₂ perkapita penduduk Indonesia = 1.9 ton CO₂ (Worldbank, 2013)

190.000 penerbangan
PP dari Jakarta ke Jayapura



Emisi Jakarta - Jayapura - Jakarta = 0.5 ton CO₂
(sumber: icao.int; dengan asumsi 1 penerbangan membawa 100 penumpang)

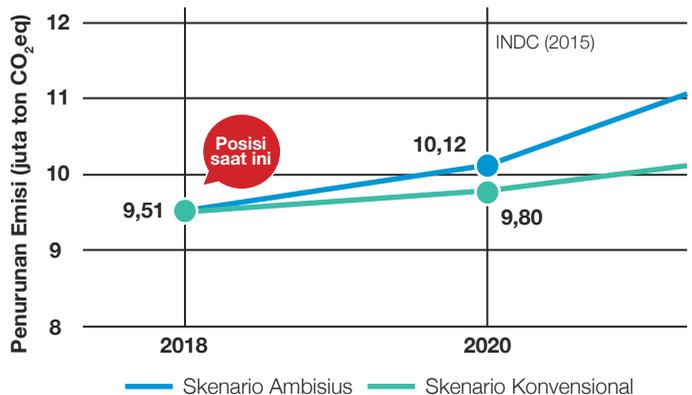


20% dari total emisi GRK nasional Swiss

Total emisi GRK Swiss tahun 2012 = 47 juta ton CO₂
(sumber: National Inventory Report of Switzerland)

POTENSI PENURUNAN EMISI GRK DARI PROYEK ICCTF

Pada tahun 2018, penurunan emisi CO₂ ekuivalen melalui intervensi ICCTF mencapai 9,5 juta ton CO₂eq. Angka ini setara dengan 0,91% dari target INDC 2020, yaitu sebesar 1050 juta ton CO₂eq. Diproyeksikan sampai dengan tahun 2020, dengan skenario konvensional total penurunan emisi dapat mencapai 9,8 juta ton CO₂eq atau setara 0,93% target INDC 2020. Sementara dengan skenario ambisius, penurunan emisi diperkirakan dapat mencapai angka 10,12 juta ton CO₂eq atau setara 0,96% target INDC.



PENGELOLAAN DANA

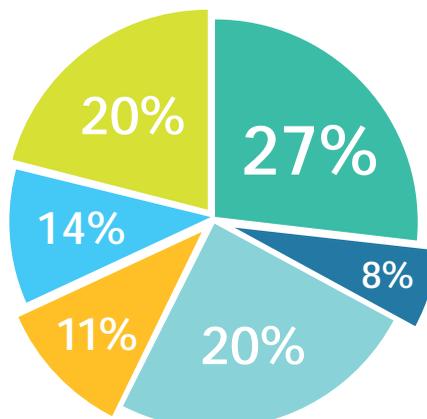
Audit, SDM, dan Pengembangan Kapasitas
11.564.732.877



Komunikasi, Pemantauan & Evaluasi
8.171.508.001



Pencegahan Kebakaran
6.164.039.561



Mitigasi Berbasis Lahan
15.977.760.132



Adaptasi & Ketangguhan
4.474.060.427



Hutan dan Gambut
11.963.282.341

1.

Pesan dari Ketua
Majelis Wali Amanat

2.

Pesan dari
Eksekutif Direktur

3.

Ringkasan Eksekutif

4.

Benang Merah

6.

Capaian dalam
Angka

10.

Sekilas ICCTF

12.

Fokus Area

13.

Sebaran Lokasi 42
Proyek di Indonesia

20.

Program
Mitigasi
Berbasis Lahan

22.

Program USAID batch 1

22.
Wahana Pelestarian dan
Advokasi Hutan Sumatera
(Walestra)24.
Perkumpulan Sesami25.
Yayasan Pengembangan Akhlaq
Mulia (YPAM)26.
Yayasan Javlec Indonesia27.
Lembaga Olah Hidup (LOH)28.
Yayasan Orangutan Indonesia
(Yayorin)30.
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya32.
Yayasan Teungku Chik Pante
Kulu Sekolah Tinggi Ilmu
Kehutanan (STIK)

34.

Program USAID batch 2

34.
Konsorsium Gaia-DB, CFES, dan
LMDH Puncak Lestari36.
Fakultas Kehutanan Universitas
Gadjah Mada37.
Konsorsium Forest
Watch Indonesia, Pusat
Pengkajian Perencanaan dan
Pengembangan Wilayah (P4W)-
LPPM IPB38.
Universitas Jember39.
Yayasan Terumbu Karang
Indonesia40.
Yayasan Taman Nasional Tesso
Nilo41.
Yayasan Penyu Berau42.
Yayasan Palung43.
Yayasan Tiara Pusaka44.
Yayasan Leuser Internasional45.
Indonesian Forestry and
Governance Institute (IFGI)46.
Pusat Penelitian Karet

14.

Sumber
Pendanaan

78.

Komunikasi &
Penjangkauan

48. Program UKCCU

49.
Yayasan Mitra Insani

50.
Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Universitas Riau

51.
Riau Women Working Group

52.
Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Lingkungan (YLBHL)
selaku Ketua Konsorsium
Restorasi Gambut Jambi

53.
Walhi Sumatera Selatan

54.
Perkumpulan Hutan Kita *Institute*
(HaKI)

55.
Perkumpulan Sahabat
Masyarakat Pantai (SAMPAN)
Kalimantan

56.
Konsorsium Walhi Kalimantan
Barat

57.
Perkumpulan Pemberdayaan
Masyarakat Dayak Pancur Kasih
(PPK)

58.
Pusat Pengendalian Kebakaran
dan Rehabilitasi Hutan (P2KLH)
Universitas Palangkaraya

59.
Yayasan Borneo Nature
Indonesia (BNF)

58. Program Adaptasi & Ketangguhan

62. Program USAID *batch 1*

62.
Yayasan Lingkungan Hidup
Seloliman (YLHS)

64.
Departemen Teknik Pertanian
dan Biosistem, Fakultas
Teknologi Pertanian, Universitas
Gadjah Mada

66.
Yayasan Transformasi Kebijakan
Publik Indonesia (YTKPI)

67.
YAKKUM *Emergency Unit* (YEU)

68.
Departemen Geofisika
dan Meteorologi, Fakultas
Matematika dan IPA, Institut
Pertanian Bogor

69.
Pusat Perubahan Iklim, Institut
Teknologi Bandung (PPI-ITB)

70.
Pusat Kajian Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Indonesia
(Puska-UI)

72. Program USAID *batch 2*

73.
Perkumpulan Relawan CIS Timor

74.
Yayasan Baileo Maluku

75.
Yayasan FIELD (*Farmer Initiatives
for Ecological Livelihoods and
Democracy*)

76.
Yayasan Rumah Energi

Daftar Isi

90.
Kinerja Organisasi

91.
Rencana ke Depan

92.
Lampiran



Sekilas

INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

ICCTF, *Indonesia Climate Change Trust Fund*, adalah instrumen yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam RAN/RAD-GRK dan RAN API. ICCTF adalah satu-satunya lembaga dana perwalian yang dikelola pemerintah Indonesia. Sejak didirikan tahun 2009, ICCTF telah berhasil mendanai proyek-proyek mitigasi dan adaptasi secara nasional.

ICCTF merupakan lembaga yang didedikasikan untuk mengelola dan mengadministrasikan pendanaan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dengan mandat pemerintah Indonesia. ICCTF adalah instrumen penting pemerintah Indonesia untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mendukung implementasi kebijakan Rencana Aksi Nasional-Daerah Gas Rumah Kaca dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim.

ICCTF membantu mitra nasional untuk melaksanakan program yang berkaitan dengan mitigasi berbasis lahan, energi serta adaptasi dan ketangguhan. Mitra nasional ini termasuk lembaga penelitian, universitas, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan koperasi.

Sejak tahun 2009 ICCTF mendanai 63 proyek mitigasi & adaptasi perubahan iklim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada periode 2015-2017, ICCTF mengelola dana rupiah murni dan hibah luar negeri sebesar 100 miliar rupiah. Pada tahun 2018 ICCTF diasumsikan akan mengelola dana sebesar 98,2 miliar rupiah sehingga total dana yang dikelola ICCTF pada periode 2015-2018 adalah 198,5 miliar rupiah.

Sekretariat ICCTF berlokasi di Gedung Wisma Bakrie 2 Lantai 20, Kuningan, Jakarta dengan staf profesional sebanyak 25 orang yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. Dalam menjalankan tugasnya, ICCTF berada dalam arahan dan pengawasan Majelis Wali Amanat ICCTF yang berasal dari perwakilan Kementerian/Lembaga, Swasta, Akademisi, dan Mitra Pembangunan.



Sasaran



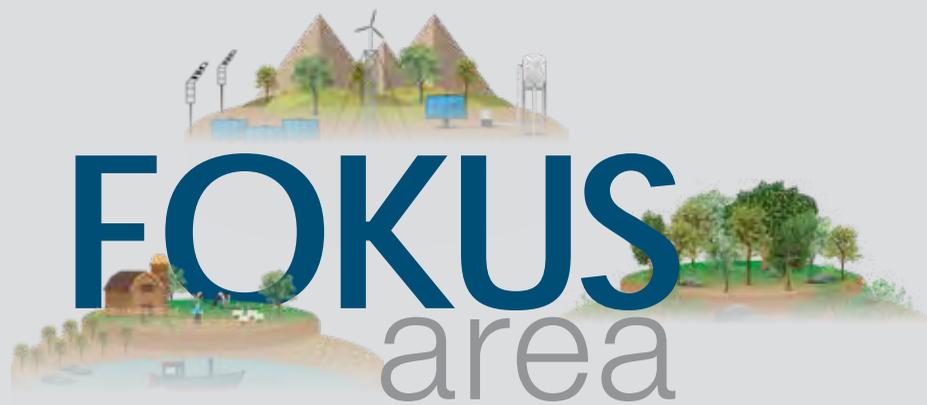
Mendukung Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca melalui ekonomi yang rendah karbon dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.



Target

Mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Melaksanakan inisiatif mitigasi dan adaptasi dalam kaitannya dengan menurunkan emisi gas rumah kaca.



MITIGASI BERBASIS LAHAN

Mitigasi berbasis lahan melalui dukungan keuangan untuk program-program:

- reforestasi/rehabilitasi lahan terdegradasi, restorasi lahan kritis menjadi hutan masyarakat, dan kebun energi.
- manajemen lahan gambut terdegradasi yang rendah emisi, dan manajemen area konservasi yang berkelanjutan.



ENERGI

Fokus area energi berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui:

- pembiayaan teknologi pembangkit energi rendah karbon.
- pelaksanaan konservasi (misalnya energi terbarukan) dan efisiensi energi.



ADAPTASI & KETANGGUHAN

Fokus area adaptasi dan ketangguhan bertujuan untuk mempersiapkan institusi nasional dan daerah serta komunitas yang rentan terhadap dampak perubahan iklim melalui:

- penyebaran informasi iklim, pengembangan dan peningkatan desain strategi adaptasi, penggunaan teknologi dan pengetahuan yang sesuai.
- mendorong terbentuknya kebijakan yang tepat bagi kegiatan adaptasi.

SEBARAN
LOKASI

42
PROYEK

Di tahun 2017, ICCTF mendukung pendanaan 42 proyek di dua fokus area yaitu mitigasi berbasis lahan serta adaptasi dan ketangguhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk fokus area energi, ICCTF melaksanakan workshop terkait pengembangan energi baru terbarukan dan menyusun proposal pendanaan baru.



Gambar 1. Sebaran 42 proyek mitigasi berbasis lahan serta adaptasi dan ketangguhan yang didukung ICCTF di Indonesia.

Keterangan



Mitigasi Berbasis Lahan
serta jumlah proyek di setiap provinsinya



Adaptasi & Ketangguhan
serta jumlah proyek di setiap provinsinya

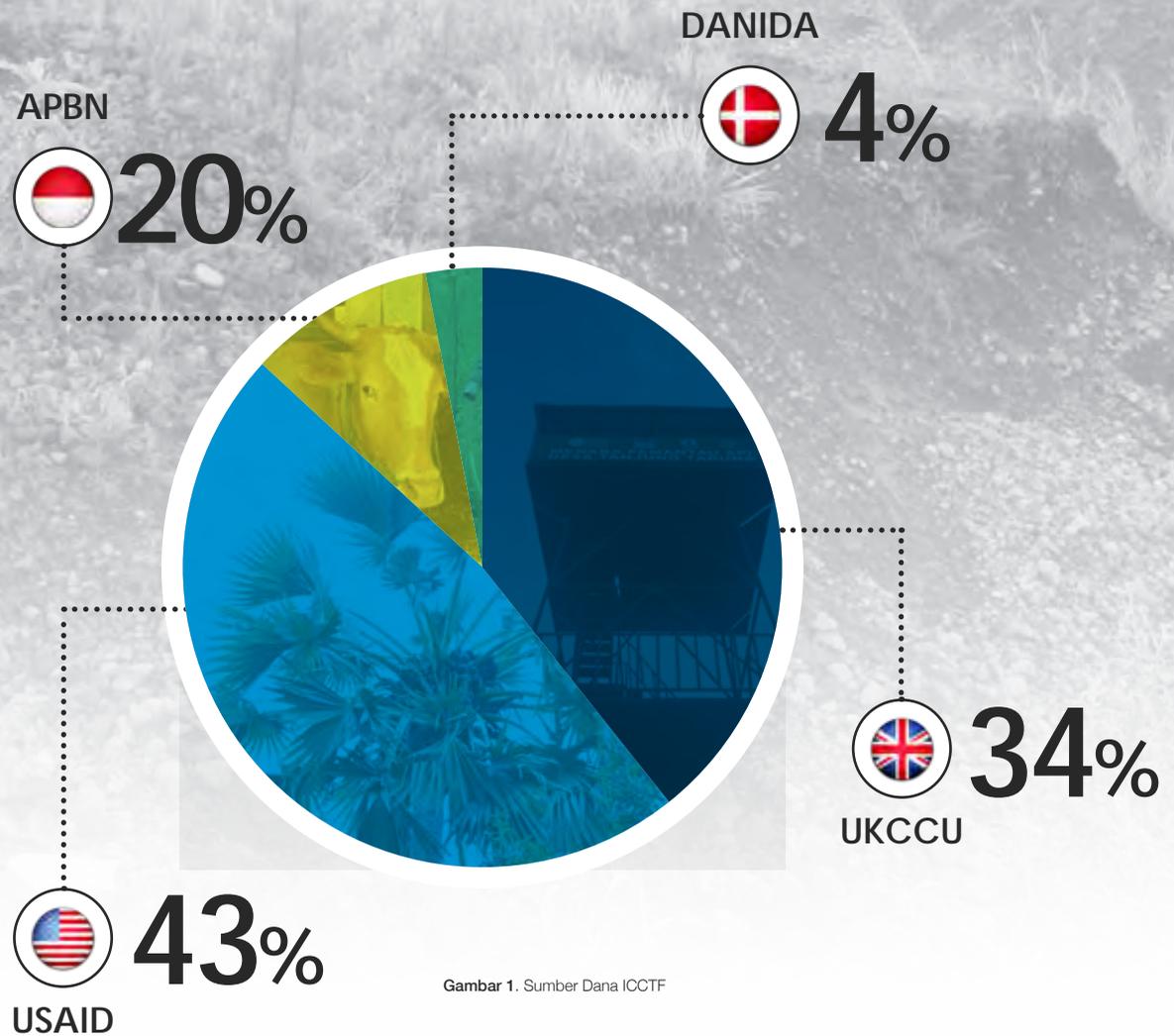
TOTAL ANGGARAN
ICCTF 2017

58,3
MILIAR
R U P I A H

Sumber Pendanaan

Total Anggaran ICCTF di tahun 2017 adalah Rp 58,3 miliar. Distribusi dana ditampilkan pada **gambar 1**. Dana dari Pemerintah Indonesia digunakan untuk dana operasional, pengembangan organisasi, pengembangan tematik fokus area, sekretariat dan komunikasi. Dana dari Kerajaan Denmark dialokasikan untuk pengembangan tematik fokus area, komunikasi dan penjangkauan (*outreach*), peningkatan kapasitas, evaluasi dan *monitoring*, serta dana operasional untuk sekretariat. Dana dari Kerajaan Inggris melalui UKCCU

dialokasikan untuk inisiatif yang berkaitan dengan pengelolaan hutan gambut dan penanganan kebakaran lahan. Dana terbesar berasal dari pemerintah Amerika melalui USAID dan digunakan untuk mendanai 20 proyek mitigasi dan 11 proyek adaptasi. Dana dari pemerintah Amerika Serikat ini juga digunakan peningkatan kapasitas staf ICCTF. ICCTF juga menerima bantuan teknis dari GIZ/INFIS selama 4 tahun. Bantuan ini setara dengan Euro 875.000 per tahun.



Gambar 1. Sumber Dana ICCTF

Dana dari Pemerintah Amerika Serikat, USAID, dan pemerintah Inggris, UKCCU, digunakan terutama untuk hibah kepada mitra-mitra pelaksana. Dana dari USAID digunakan untuk inisiatif yang bertujuan mendukung target dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).

Sementara itu, dana dari UKCCU digunakan untuk kegiatan yang terfokus pada tata kelola hutan dan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa capaian dari program ini adalah peresmian Peraturan Gubernur Jambi No 31/2016 tentang Panduan

Teknis Implementasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 2/2016 tentang Pencegahan dan Kontrol atas Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi. Capaian lainnya adalah pengelolaan lahan gambut melalui skema ekologi hutan di Desa Bangsal, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan. Melalui pendanaan UKCCU ini juga, masyarakat Dumai-Riau mampu membuat makanan ikan melalui gulma sebagai bagian dari kegiatan persiapan lahan tanpa membakar. Masyarakat di tiga desa di Kabupaten Siak, Riau mengembangkan ekowisata mangrove. Melalui dana UKCCU, telah dibangun 600 sumur bor, 3 menara pengawasan di Kalimantan Selatan.

INFORMASI KEUANGAN

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Nasional di Indonesia, ICCTF selalu memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi yang jelas dan terukur dalam setiap kegiatan terkait program dan keuangan sehingga prinsip tata kelola organisasi dapat tercapai.

Bagian Keuangan ICCTF secara rutin mengadministrasikan, menyiapkan dan melaporkan semua kegiatan pelaksanaan secara tertib dan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik. Pada tahun 2017 ICCTF mengelola dana Rupiah Murni APBN sebesar 12 miliar rupiah dan dana Hibah Luar Negeri sebesar 46,8 miliar rupiah. Total dana yang dikelola Tahun 2017 adalah 59 miliar rupiah. Capaian pada tahun 2017 adalah sebesar 58,3 miliar rupiah yaitu 99% dari total dana yang dikelola.

Untuk rincian alokasi dana tersebut, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Sumber Dana	Program	Dana Dikelola	Realisasi Dana
1.	 APBN	Kebijakan Percepatan Pembangunan Lingkup Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Indonesia	Rp 12.206.294.000,00	Rp 11.431.461.680,00 94%
2.	 DANIDA	Dukungan Tambahan <i>Environmental Support Programme (ESP3)</i> kepada <i>Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)</i>	Rp 2.347.494.879,89	Rp 2.347.494.879,89 100%
3.	 USAID	<i>USAID Support for Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)</i>	Rp 24.811.728.000,00	Rp 24.811.720.605,99 100%
4.	 UKCCU	Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia Melalui Kegiatan Lokal	Rp 19.724.706.173,47	Rp 19.724.384.173,47 100%
TOTAL			Rp 59.090.223.053,36	Rp 58.315.061.339,35 99%

MANAJEMEN PENDANAAN ICCTF 2015-2018

Sejak 2015, ICCTF adalah Satuan Kerja di bawah Kementerian PPN/Bappenas. Sebagai Lembaga Wali Amanat, ICCTF sudah mengelola dana Rupiah Murni dan Hibah Luar Negeri sejak tahun 2015 sampai dengan 2017. Total Rupiah Murni APBN dan Hibah Luar Negeri yang dikelola ICCTF sejak tahun 2015 adalah 100 miliar rupiah. Sampai 2018 nanti ICCTF diasumsikan akan mengelola dana sebesar 98,2 miliar rupiah sehingga total dana yang dikelola dari 2015 – 2018 adalah 198,5 miliar rupiah.

	SUMBER HIBAH			SUMBER APBN	DUKUNGAN TEKNIS	
	PEMBIAYAAN	USAID	UKCCU	DANIDA	APBN	BMUB GIZ/INFIS
2015	Rp 14,6 miliar	20.513 USD setara dengan Rp 288 juta	-	350.000 DKK setara dengan Rp 700 juta	Rp 13,6 miliar	
2016	Rp 27,4 miliar	981.260 USD setara dengan Rp 13,7 miliar	32.813 GBP setara dengan Rp 538 juta	1,15 juta DKK setara dengan Rp 2,3 miliar	Rp 11,2 miliar	
2017	Rp 58,3 miliar	1,7 juta USD setara dengan Rp 24,8 miliar	1,1 juta GBP setara dengan Rp 19,7 miliar	1 juta DKK setara dengan Rp 1,9 miliar	Rp 11,4 miliar	3,5 juta euro
2018 (forecast)	Rp 98,2 miliar	2,2 juta USD setara dengan Rp 31,7 miliar	2,8 juta GBP setara dengan Rp 45,7 miliar	1 juta DKK setara dengan Rp 2 miliar	Rp 19,1 miliar	
TOTAL	Rp 198,5 miliar	5 juta USD setara dengan Rp 70,27 miliar	4 juta GBP setara dengan Rp 66 miliar	3,5 juta DKK setara dengan Rp 6,9 miliar	Rp 55,4 miliar	3,5 juta euro



AUDIT

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas, Laporan Keuangan ICCTF setiap tahunnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Internasional dan Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Pada tahun 2017, audit Laporan Keuangan ICCTF dilakukan oleh KAP Wisnu B. Soewito & Rekan dengan Opini **wajar tanpa pengecualian**. Laporan Keuangan yang sudah diaudit dapat dilihat pada lampiran disamping.

Laporan Audit DANIDA

WISNU B. SOEWITO & REKAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Audit, Accounting, Tax, Consulting
Indonesia

WBS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 004/LAI/WBS/2018

Kepada Yth.
DIREKTUR EKSEKUTIF
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Kami telah mengaudit laporan keuangan *Environmental Support Programme (ESP)*, *Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* Sumber Dana dari DANIDA terlampir, yang terdiri dari laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh ketidaktepatan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk memelihara ketertarikan etika serta melaksanakan dan melaksanakan standar untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh ketidaktepatan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk memancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

WBS dan Rekan adalah anggota dari jaringan KAP yang tergabung dalam WBS dan Rekan, yang merupakan bagian dari jaringan KAP yang tergabung dalam WBS dan Rekan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai WBS dan Rekan, silakan kunjungi situs web kami di www.wbsandrekan.com.
WBS dan Rekan adalah anggota dari jaringan KAP yang tergabung dalam WBS dan Rekan, yang merupakan bagian dari jaringan KAP yang tergabung dalam WBS dan Rekan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai WBS dan Rekan, silakan kunjungi situs web kami di www.wbsandrekan.com.
Lampiran No. 004/LAI/WBS/2018

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan aktivitas *Environmental Support Programme (ESP)*, *Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* Sumber Dana dari DANIDA dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini dimaklumkan semata-mata untuk informasi dan digunakan oleh manajemen *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

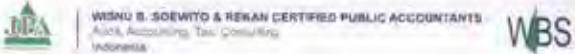
Laporan keuangan *Environmental Support Programme (ESP)*, *Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* Sumber Dana dari DANIDA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 23 Januari 2017.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
Iris Usaha No. KEP - 183/KM.6/2004

R. Dwi Kartama Soewito, CPA
Nomer Registrasi Akuntan Publik: AP-2374

Jakarta, 04 Januari 2018

Laporan Audit UKCCU



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 005/LAI/WBS/2018

Kepada Yth,
DIREKTUR EKSEKUTIF
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Kami telah mengaudit laporan keuangan *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut (Urut Mergantung Emisi Di Indonesia Melalui Kegiatan Lokal Sumber Dana dari UKCCU) selama, yang terdiri dari laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan efemeris penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk menaruh ketelitian etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk menilai apakah prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

WBS (WISNU B. SOEWITO & REKAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) is a member of the ICAI (Indonesian Institute of Certified Accountants) and is a member of the ICAI (Indonesian Institute of Certified Accountants) and is a member of the ICAI (Indonesian Institute of Certified Accountants).
Lisensi No. : SSP-010400000

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan aktivitas *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut (Urut Mergantung Emisi Di Indonesia Melalui Kegiatan Lokal Sumber Dana dari UKCCU) dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk informasi dan digunakan oleh manajemen *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
Jln Usaha No. KEP - 183/KM.6/2004



R. Dwi Karsono Sukirno, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik - AP.0158

Jakarta, 29 Januari 2018

Laporan Audit USAID



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No : 006/LAI/WBS/2018

Kepada Yth,
DIREKTUR EKSEKUTIF
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)

Kami telah mengaudit laporan keuangan *USAID Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* selama, yang terdiri dari laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk menaruh ketelitian etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk menilai apakah prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

WBS (WISNU B. SOEWITO & REKAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS) is a member of the ICAI (Indonesian Institute of Certified Accountants) and is a member of the ICAI (Indonesian Institute of Certified Accountants) and is a member of the ICAI (Indonesian Institute of Certified Accountants).
Lisensi No. : SSP-010400000

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan aktivitas *USAID Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan basis kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini dimaksudkan semata-mata untuk informasi dan digunakan oleh manajemen *Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, dan tidak digunakan untuk tujuan lain.

Laporan keuangan *USAID Support to the Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 25 Januari 2017.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN
Jln Usaha No. KEP - 183/KM.6/2004



R. Dwi Karsono Sukirno, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik - AP.0158

Jakarta, 29 Januari 2018



MITIGASI BERBASIS LAHAN

ICCTF mendanai 31 proyek mitigasi berbasis lahan dari 42 proyek yang sedang berjalan di seluruh Indonesia yang bersumber dari pendanaan USAID dan UKCCU. Proyek-proyek ini terdistribusi di 12 proyek di Sumatera, 9 proyek di Kalimantan, 8 proyek di Jawa dan masing-masing 1 proyek di Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Proyek-proyek ini meliputi proyek yang berkaitan dengan rehabilitasi lahan baik lahan mineral maupun lahan gambut, pengelolaan kebakaran hutan, penguatan masyarakat lokal melalui sumber penghidupan yang lebih baik dan peningkatan kesadaran masyarakat dan siswa atas dampak perubahan iklim.

Melalui rehabilitasi lahan, 348.560 pohon telah ditanam. Selain itu, ICCTF mendanai pengembangan *early warning system* (EWS) untuk mengatasi kebakaran hutan. Setidaknya ada 9 lokasi yang mengembangkan prosedur cara penanganan kebakaran hutan. EWS dilengkapi dengan pembangunan 9 menara pengawas dan 10 pos jaga. Sebanyak 203 sekat kanal telah dibangun. Sebanyak 15 wilayah mengembangkan rencana tata guna lahan. ICCTF juga mendanai pembangunan 647 sumur bor dan 24 unit penampungan air.

ICCTF telah melibatkan 1.317 orang di seluruh kegiatannya dan meningkatkan pemahaman siswa tentang perubahan iklim sebanyak 9150 siswa. 35 desa mengembangkan peraturan desa yang berkaitan dengan mitigasi berbasis lahan. Serta, 11 Raja-raja lokal (setingkat Kades atau Lurah) di Maluku sepakat untuk mengadopsi isu perubahan iklim ke dalam kebijakan mereka. Pada halaman berikut disampaikan penjelasan tiap-tiap proyek.



Mitigasi Berbasis Lahan



Mitigasi
Berbasis Lahan

PROGRAM
USAID

batch
1

Sebanyak 8 proyek proposal mitigasi berbasis lahan melalui pendanaan USAID pada tahap pertama yang dilaksanakan oleh: Walestra, Sesami, YPAM, JAVLEC, Yayorin, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya LOH dan STIK.

1

Mitra Pelaksana Wahana Pelestarian dan Advokasi Hutan Sumatera (Walestra)

Judul Program

Konservasi Hutan Berbasis Masyarakat dan Mitigasi Perubahan Iklim di Bentang Alam Kerinci Seblat.



Anggaran

Rp 3.274.690.000



Periode Pelaksanaan

24 bulan
(April 2016 - Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi; Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Latar belakang

Pentingnya 10 kelompok masyarakat di 10 desa terlibat dalam pengelolaan 7.000 ha hutan adat dan 5.000 ha lahan kritis yang berada di sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat, penurunan emisi dan peningkatan pendapatan.

Tujuan

Menyelamatkan kawasan hutan penyangga di Bentang Alam Kerinci seluas 338.000 ha melalui pengembangan skema perhutanan sosial yang mendukung mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Lembaga adat Parbokalo, Kerinci, Jambi membuat surat pernyataan tertulis mendukung pengelolaan untuk melindungi hutan adat. Dipertahankannya tutupan hutan minimal 7.000 ha yang dikelola melalui skema hutan desa/hutan adat. Capaian yang telah dilakukan:



- a. Tim telah melakukan kajian potensi replikasi skema perhutanan sosial melalui FGD.
 - b. Tim telah membangun kesepakatan bersama dengan masyarakat terkait dengan pengembangan perhutanan sosial di 6 lokasi untuk mendapatkan 4 lokasi yang siap difasilitasi.
 - c. FGD dan Pemetaan Kawasan Hutan yang akan di dorong Model Perhutanan Sosial di lokasi proyek.
 - d. Penyusunan kelengkapan dokumen Permohonan Perhutanan Sosial di lokasi proyek.
 - e. Pembuatan Pos Penjagaan dan Pengamanan Kawasan Hutan Adat/Hutan Desa di 10 lokasi proyek.
 - f. Pemetaan Batas Administrasi Desa di lokasi proyek.
 - g. FGD Penyusunan Rencana Kerja Hutan Adat.
 - h. Pengajuan dan Pengukuhan Hutan Adat ke pemerintah daerah.
 - i. Terbangunnya 6 papan informasi untuk 7 hutan adat.
 - j. Kegiatan patroli bulanan (*Smart Patrol*) oleh 5 Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat (KPHA) dan 1 Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).
2. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi non hasil kayu melalui pengembangan ekonomi produktif dengan capaian:
- a. Kajian partisipatif keruangan mikro desa di Desa Raden Anom.
 - b. FGD Penyusunan Perdes tentang Rencana Tata Ruang Mikro Desa di 3 desa.
 - c. Survei lapangan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta tanaman *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) di 7 lokasi.
3. Rehabilitasi Lahan kritis di bentang alam Kelinci Seblat dengan capaian:
- a. Pembangunan Pusat Pembibitan dan Perbanyakan Bibit di 10 lokasi proyek untuk merehabilitasi lahan kritis seluas 500 ha.
 - b. FGD identifikasi pengembangan ekonomi di 6 lokasi proyek.
 - c. Penyusunan *Business Plan* di Desa Limok Manaih dan telah terbentuk 2 kelompok usaha.
4. Kegiatan penyadartahuan terkait isu perubahan iklim dengan capaian 2 kali kegiatan sosialisasi tentang isu perubahan iklim di SMAN 6 dan SMAN 1 Solok Selatan.



Budidaya lebah madu oleh Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) di Desa Lubuk Gadang Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.



Pelaksanaan *smart patrol* oleh LPHN.



Pusat pembibitan di tiap desa.

2

Mitra Pelaksana Perkumpulan Sesami



Judul Program

Pemanfaatan Biogas untuk Usaha Kemandirian Energi Rumah Tangga Sekaligus Ikut Serta Dalam Upaya Mendukung Gerakan Konservasi Lingkungan.



Anggaran

Rp 996.730.000



Periode Pelaksanaan

18 bulan
(Juni 2016 - Desember 2017)



Lokasi

Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Latar belakang

Mempertimbangkan luasnya bekas galian pasir yang terabaikan, program ini mendorong reboisasi wilayah bekas galian pasir dengan tanaman yang dapat tumbuh baik karena dirawat dengan pupuk organik yang dihasilkan dari usaha biogas di masyarakat dan penggantian bahan bakar kayu hutan dengan biogas, penurunan emisi dan peningkatan pendapatan.

Tujuan

Membantu 2 kecamatan di Kabupaten Magelang untuk mengembangkan koperasi masyarakat; membangun 10 unit *digester* (6 m³), menghasilkan *bioslurry* 4-5 l per unit per hari (harga \$ 0,8/l), menghasilkan biogas untuk keluarga memasak, menurunkan biaya energi keluarga, mengurangi panen kayu untuk energi, reboisasi zona penyangga Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dengan 7.000 pohon.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Penanaman bibit pohon sebagian besar dilakukan di lahan pasir. Hal ini dapat dilakukan dengan strategi antara lain pemilihan tanaman sengon yang dapat bertahan di lahan berpasir, serta dilakukan pemilihan lahan pasir yang memiliki kandungan tanah. Selain itu,
2. Untuk lahan yang kandungan tanahnya rendah, penanaman dilakukan dalam pot dari bahan bambu. Bahan bambu dipilih karena bersifat alami dan dapat menahan tanah.
3. Sementara itu penanaman di lahan berbatu di mana air terlalu cepat meresap ke dalam tanah, dibuat penampungan air dari botol bekas yang menampung dan mengatur air mengalir perlahan ke tanaman. Kegiatan ini juga mendorong dilakukannya aktivitas guna ulang (*reuse*) botol bekas.
4. Pupuk utama yang digunakan adalah *bioslurry* dari hasil limbah cair biogas. dengan demikian proyek ini diawali dengan pembangunan *biodigester*. Hingga akhir tahun 2017, telah terbangun 10 *biodigester* yang tersebar di 3 desa, dan semuanya beroperasi dengan baik.
5. Telah dilakukan konsolidasi dan koordinasi lanjutan kepada *stakeholders*, menentukan batas lahan yang akan direhabilitasi seluas 7,5 ha. Dilakukan upaya meratakan lokasi dan penyiapan lahan tanam dengan cara padat karya masyarakat sekitar.
6. Telah dilakukan pertemuan dengan pemerintah Kecamatan Dukun, pemerintah Desa Keningar, Sumber dan Ngargomulyo guna menentukan lokasi *digester* dan keberlanjutannya. Bekerja sama dengan Tim Lelang PPK dari BLH Kab. Magelang untuk menentukan penyedia jasa pembangunan *biodigester* melalui Lelang Terbatas.
7. Rumah pengelolaan kompos telah terbangun di Desa Keningar.
8. Pembibitan tanaman konservasi telah dilakukan sebanyak 5.000 bibit di rumah pembibitan.
9. Telah terbentuk Kelompok Keningar Hijau yang terdiri dari 25 masyarakat Desa Keningar.
10. Penanaman 15.000 bibit tanaman.



Proses konstruksi *biodigester*.



Pemanenan *bioslurry*.



Pusat pembibitan.



Lahan kritis bekas tambang pasir yang direhabilitasi.

3

Mitra Pelaksana Yayasan Pengembangan Akhlak Mulia (YPAM)



Judul Program

Peningkatan Budidaya Bambu Cendani untuk Penyelamatan Lahan Kritis di Sub DAS Grenjeng DAS Serang Desa Sampetan Kecamatan Ampel.



Anggaran

Rp 415.133.250



Periode Pelaksanaan

24 bulan
(April 2016 - Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Latar belakang

Sebuah program pelibatan masyarakat Desa Sampetan, Kecamatan Ampel dalam rehabilitasi lahan kritis bagian dari area tangkapan air DAS Serang yang merupakan zona penyangga Taman Nasional Gunung Merbabu, penurunan emisi dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tujuan

Program pendukung untuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemalijuana, PDAM Boyolali, TN Gunung Merbabu, DPU, Dipertahutbun, BLH, 3 kelompok masyarakat (100 orang), 300 siswa SD, 1 unit produksi benih bambu; tumbuh 4.200 bibit bambu, restorasi 3 ha daerah kritis dengan 3.500 bambu, 300 siswa sadar tentang lingkungan, 1 kelompok masyarakat terbentuk (beranggotakan 30 orang).

Kemajuan yang telah dicapai

1. Dalam pelatihan yang dilakukan oleh YPAM, tingkat partisipasi perempuan mengalami peningkatan dari 1% di awal program menjadi 13% di tahun 2017.
2. Telah dilaksanakan FGD dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Sampetan. Dilakukan lokakarya Perencanaan Kegiatan yang dihadiri oleh perangkat desa, masyarakat Desa Sampetan, serta Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Pembentukan kelompok peduli lingkungan telah dilakukan dan mendapatkan legalitas sah secara hukum melalui kantor notaris.
4. Survei bibit bambu Petung dilakukan ke Yogyakarta dan survei tanaman buah dilakukan ke Semarang.
5. Penanaman dan perawatan bibit bambu Cendani 1.500 rumpun dilokasi rehabilitasi seluas 3 ha.
6. Lokakarya serta pendampingan manajemen dan administrasi kelompok.
7. Selain menjaga wilayah DAS, penanaman bambu juga memberikan kesempatan bagi industri kerajinan oleh masyarakat dengan memanfaatkan bambu. Pada bulan September 2017, dilakukan studi banding kegiatan kriya bambu ke Yogyakarta, di mana 10 anggota perempuan dan 5 anggota laki-laki tertarik untuk memulai usaha kriya bambu, terutama memproduksi sapu dan berbagai kerajinan berbahan bambu lainnya.



Bibit bambu Petung yang sudah tumbuh dengan baik.



Pertumbuhan Alpakat Wina di lahan warga.



Bambu Cendani untuk bahan kerajinan.

4

Mitra Pelaksana Yayasan Javlec Indonesia



Judul Program

Mitigasi Berbasis Lahan pada Kawasan Karst, DAS Kritis, dan Kawasan Konservasi.



Anggaran

Rp 3.410.770.000



Periode Pelaksanaan

24 bulan
(April 2016 - Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Latar belakang

Pentingnya melakukan mitigasi berbasis lahan di kawasan karst Gunungkidul yang memiliki DAS kritis dan kawasan konservasi guna mengurangi emisi GRK dan mempertahankan surplus cadangan air tanah untuk DIY terutama penyokong keberlanjutan DAS Opak-Oya dan DAS Bribin.

Tujuan

Menjalankan kegiatan mitigasi berbasis lahan pada kawasan karst, DAS kritis, dan kawasan konservasi.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Terlaksananya pelatihan dan praktek perhitungan *Carbon Stock* di 20 desa terdiri dari 80 orang peserta. Hasil pelatihan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman peserta 60%. Rata-rata cadangan karbon pada lokasi proyek hasil penghitungan adalah sebesar 30,01 ton CO₂ eq. Terlatihnya wakil

masyarakat dalam penghitungan karbon (CCA). Perhitungan ini melibatkan pelatih dari BPKH Jawa Madura dan Fakultas Kehutanan UGM.

2. Selain melakukan perhitungan karbon dan emisi di program yang dilaksanakannya, Yayasan Javlec Indonesia juga melakukan pendampingan perhitungan karbon terhadap 2 mitra ICCTF lainnya, yaitu Yakkum *Emergency Unit* (YEU) dan Yayasan Penyau Berau.
3. Telah dilakukan penanaman 27 jenis vegetasi bibit pohon pada 3.351,95 ha di 20 desa sebanyak 62.553 batang, untuk penambahan stok karbon pada Hutan Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat. Adanya penanaman pada sekitar 100 ha lahan kritis, dan sekitar telaga.
4. Telah dilakukan pelatihan kepada masyarakat sebanyak 3 kali.
5. Tersusunnya 11 Dokumen Rencana Kelola Hutan pada Hutan Rakyat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat. Berjalannya kajian pengelolaan hutan di lokasi proyek.
6. Tersusunnya data sementara profil desa. Fasilitasi kajian Tata Ruang di 6 desa fokus kegiatan meliputi: Desa Kedung Poh, Desa Kepek, Desa Pacarejo, Desa Putat, Desa Banyusoca, Desa Purwodadi. Menghasilkan *drafting* 6 dokumen Tata ruang Desa, 6 Dokumen Perencanaan Desa, Kajian/Naskah Akademik Kebijakan, dan 6 pertemuan multipihak.



Bibit mangga yang tumbuh baik.



Pohon Jati sebagai jaminan tunda tebang.



Pohon Jati sebagai jaminan tunda tebang.

5

Mitra Pelaksana Lembaga Olah Hidup (LOH)



Judul Program

Rehabilitasi Lahan dan Hutan Melalui Pengembangan HKm untuk Peningkatan Daya Dukung DAS Moyo.



Anggaran

Rp 1.002.270.000



Periode Pelaksanaan

24 bulan
(April 2016 - Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat

Latar belakang

Dilatarbelakangi tujuan untuk memperbaiki kawasan DAS, dikembangkanlah pengelolaan hutan masyarakat dengan pelibatan 710 KK penduduk desa Lito yang berada di daerah tangkapan DAS Moyo seluas 2.418 ha untuk melindungi 3 kecamatan dari bencana erosi dan banjir pada musim hujan dan bahaya kekeringan pada musim kemarau, penurunan emisi dan peningkatan pendapatan.

Tujuan

Berkembangnya model tata kelola ekologi secara baik dan lestari dalam meningkatkan daya dukung lahan/hutan untuk menambah sumber pendapatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Adanya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, salah satunya melalui pelatihan penerapan agroforestri dan HKm. Sebanyak 32 peserta (35%) dapat menularkan pengetahuannya pada anggota lain. Telah dilaksanakan pendampingan untuk pemeliharaan tanaman dan penanaman, pertemuan rutin kelompok, pengolahan hasil panen untuk menjadi produk olahan yang dapat dijual, serta proses belajar bersama untuk pengelolaan pembibitan.
2. Adanya upaya pemulihan kondisi sumberdaya lahan dan hutan di wilayah DAS kritis 100 ha tiap tahun, dengan menanam minimal 10 spesies lokal keanekaragaman hayati, diantaranya:
 - a. Penanaman jenis tanaman kayu kehutanan dan tanaman perkebunan telah dilakukan di 5 kelompok dengan luasan sekitar 40 ha tahun 2016.
 - b. Dilakukan evaluasi kegiatan bulanan pada HKm yang terdiri dari 5 kelompok anggota. Adanya pembelajaran dan pengetahuan dari pengalaman pelaksanaan program untuk disebarluaskan pada pemangku kepentingan dan publik.
 - c. Survei partisipatif penentuan lokasi rehabilitasi sudah dilakukan bersama KPH Ropang, Babinsa, dan pemerintah Desa.
 - d. Penanaman bibit sebanyak 67.000 bibit pada tahun 2017. Luasan areal yang ditanami adalah 92 ha (areal di dalam maupun luar HKm).
3. Telah dilakukan studi pendugaan karbon melalui kerjasama LOH dengan HKTH Samoko Lito. Kelompok Bage Tiang, Kelompok Ai Keban, KPH, ICCTF dan Kementerian PPN/Bappenas. Studi ini menghasilkan angka *biomassa* di seluruh lokasi plot sebesar 47.087 ton.
4. Pembuatan film dokumenter dilakukan secara bertahap dan akan dilaksanakan hingga akhir program.
5. 3 kelompok yang sedang dalam proses belajar pengelolaan hasil panen tanaman pangan.
6. 4 jenis produk yang sedang dalam tahap uji coba pemasaran (minyak obat sumbawa, jajan majareal, baso siong dan jahe/kunyit instan).



Bibit Jati yang tumbuh di lahan kritis pada tahun pertama.



Pusat pembibitan HKTH Samoko Desa Lito.



Bibit Jati pada tahun kedua.

6

Mitra Pelaksana Yayasan Orangutan Indonesia (Yayorin)

Judul Program

Konservasi Ekosistem Nipah dan Hutan Penyangga Bagian Timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau Sebagai Kawasan Pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKm).



Anggaran

Rp 2.576.720.000



Periode Pelaksanaan

24 bulan
(April 2016 - Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Latar belakang

Sebuah inisiatif pelibatan masyarakat lokal dalam upaya perlindungan zona penyangga Suaka Margasatwa Sungai Lamandau yang mulai terdegradasi, berupa 200 ha hutan nipah dan mangrove serta 2.000 ha hutan penyangga, penurunan emisi dan peningkatan pendapatan.

Tujuan

Mendukung pengurangan emisi dengan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi pada kawasan gambut, kawasan konservasi, kawasan bernilai konservasi tinggi dan ekosistem bakau (nipah) di blok hutan penyangga bagian timur Suaka Margasatwa Sungai Lamandau, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang juga mendukung Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Demplot pertanian tanpa bakar menggunakan 3 sistem tanam (hazton, SRI dan konvensional/tabela) sudah mulai menghasilkan bulir padi. Demplot ini kemudian dapat menjadi model yang dapat direplikasi

oleh masyarakat desa gambut di Kotawaringin Barat.

2. Demplot keramba ikan jaring apung dan kolam terpal sudah mulai direplikasi oleh masyarakat melalui pendanaan dana desa dan BKSDA Kalimantan Tengah.
3. Pelestarian Kawasan Hutan melalui penanaman pohon Jelutung dan tanaman lainnya: Masyarakat telah mencoba menanam sayuran dan tanaman buah di areal kebun/ladang yang dimiliki. Belum ada kegiatan pembakaran lahan untuk perladangan/kebun masyarakat di Desa Tanjung Putri karena dilakukan pelarangan oleh Pemda melalui PERDA. 300 KK petani pekebun di Desa Tanjung Putri tidak membakar lahan dan 114 orang petani mendukung sistem pertanian demplot tanpa bakar dengan percontohan tanaman sayuran, 120 jalur tanam dengan panjang jalur rata-rata 1 km dan sebanyak hampir 5.000 bibit tertanam dari 20.000 yang diadakan pada fase pertama.
4. Konservasi ekosistem nipah dan hutan melalui dukungan peraturan desa dan kawasan penyangga sebagai HKm melalui surat pencadangan HKm dari Bupati: Pemetaan Kawasan Ekosistem Nipah dan Hutan, 5 kelompok HKm di Kotawaringin Barat yang area petanya telah dipetakan. Penyiapan Perdes Perlindungan Ekosistem. Adanya dukungan dari Pemda berupa rekomendasi pencadangan HKm dari Bupati Kotawaringin Barat kepada KLHK. Terbentuknya kelompok Masyarakat Pengawas Api (MPA) di 2 desa. Pertemuan dengan aparat desa dan tokoh masyarakat desa untuk sosialisasi isi Perdes Perlindungan dan Pelestarian ekosistem nipah Desa Tanjung Putri. Adanya sekretariat sebagai wadah

pertemuan diskusi anggota kelompok dalam merencanakan kegiatan yang mendukung konservasi hutan.

5. Pengembangan usaha peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan melalui pengelolaan usaha pertanian rendah emisi dan perikanan melalui:
 - a. Pembangunan demplot untuk percontohan pengolahan lahan untuk pertanian tanpa bakar seluas 2.500 meter di Desa Tanjung Putri.
 - b. Pembuatan 10 karamba dan telah ditunjuk Ketua Pengelola Karamba oleh Kelompok HKm SEPAKAT. Telah dipanen dari 3 keramba atau sebanyak 20-40 kg ikan hasil budidaya (Haruan, Toman).
 - c. Pembangunan rumah usaha (*outlet*) dan sekretariat Kelompok HKm SEPAKAT.
 - d. 4 buah kolam yang dikelola oleh Kelompok Wanita Mandiri.
6. Meningkatkan pengetahuan dan dukungan konservasi Masyarakat Desa Tanjung Putri tentang manfaat melestarikan hutan dan dampak perubahan iklim: sosialisasi telah dilaksanakan dengan dihadiri 100 orang warga dan instansi terkait. Pertemuan pendampingan dan pemantauan kelompok HKm Desa Tanjung Putri dilaksanakan rata-rata 7 kali setiap bulannya.
7. Yayorin akan melakukan penghitungan emisi dengan *sampling area* untuk mewakili area pencadangan HKm ada di KHG Buluh-Kotawaringin Lama yang akan mewakili *sampling* emisi karbon seluruh area pencadangan HKm yang diusulkan. Kegiatan akan dimulai Minggu ke-3/Minggu ke-4 Februari 2018 (selama 2 Minggu) dan selesai Minggu ke-2 Maret. Untuk melakukan penghitungan ini, Yayorin akan bekerjasama dengan GAIA.



Demplo t kolam terpal budidaya ikan toman, gurame dan haruan di Desa Tanjung Putri, Kabupaten Kotawaringin Barat.



Pengelolaan tanaman nipah di Desa Tanjung Putri.



Panen hasil budidaya ikan di Desa Tanjung Putri.



Demplo t lahan pertanian tanpa bakar di Desa Tanjung Putri.



Demplo t keramba apung untuk budidaya ikan toman di Desa Tanjung Putri.

7

Mitra Pelaksana Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Judul Program

Conservation and Rehabilitation of Hutan Amanah Lestari Peat Swamp Forest as a Working Classroom for Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.



Anggaran

Rp 2.419.987.500



Periode Pelaksanaan

24 bulan

(April 2016 - Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Barito Selatan & Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Latar belakang

Pentingnya perbaikan pengelolaan hutan konsesi PT. Hutan Amanah Lestari seluas 25.804 ha yang meliputi 3 desa di dalamnya dan merupakan kawasan gambut dengan kedalaman ≥ 2 m yang potensial terbakar sebagai akibat pembakaran lahan untuk kegiatan pertanian, penurunan emisi dan peningkatan pendapatan.

Tujuan

Manajemen yang lebih baik dari PT. Hutan Amanah Lestari seluas 25.804 ha dan 4 desa di dalam wilayahnya; daerah pembiakan spesies primata Bekantan (*Nasalis larvatus*); penurunan lahan kritis; penyadartahuan informasi perubahan iklim kepada masyarakat; hutan untuk pelatihan dan penelitian dikembangkan dalam kondisi baik; 100.000 pohon baru ditanam di hutan, serta mitigasi daerah penyangga di sekitar kawasan taman nasional.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Telah tersusun Rencana Kerja Manajemen Hutan dan Kebakaran di Gambut. Dari rencana yang dihasilkan, dapat diidentifikasi peta sebaran titik api serta rencana tindak lanjutnya.
2. Penerapan solusi inovatif untuk rehabilitasi dan reforestasi lahan gambut yang terdegradasi atau bekas terbakar.
 - a. Telah diperoleh peta penutupan lahan berdasarkan citra *Landsat* 2015, data penutupan lahan berdasarkan foto udara (*drone*) serta telah dilakukan pemasangan *camera trap* di 2 titik.
 - b. Survei lapangan untuk inventarisasi data keanekaragaman fauna di area bagian barat dan timur proyek dan teridentifikasi 100 sarang Orangutan sebagai *key species*.
 - c. Dilakukan pelatihan dan percontohan yang meliputi pelatihan administrasi dan keuangan, pelatihan pertanian dengan metode hidroponik, budidaya perikanan sistem *beje* dengan 2 kolam percontohan, penanaman pohon lokal di 1,5 ha lahan.
 - d. Total 2.500 bibit Galam dan 625 bibit Balangeran telah ditanam.
3. Pemasangan Sistem Pencegahan Kebakaran dan Pemantauan Kontrol Hidrologi Lahan Gambut untuk mendapatkan data sebaran daerah rawan terbakar dan laporan cepat tanggap deteksi titik api, melalui konfirmasi email dari *Global Forest Watch*.
 - a. Tim Serbu Api telah terbentuk dan survei pemetaan kanal menggunakan *drone* telah selesai dilaksanakan.
 - b. Dihasilkan peta sebaran titik api di areal proyek 6 tahun terakhir.
 - c. Patroli hutan oleh Tim Serbu Api Kelurahan Rantau Kujang di area selatan dan timur lokasi proyek.
 - d. Patroli hutan oleh Tim Serbu Api Desa Kalanis di area barat dan timur lokasi proyek.
 - e. Dukungan Operasional Tim Serbu Api.
4. Studi lapangan mengenai emisi gas rumah kaca dan keanekaragaman hayati.
 - a. Telah dilakukan kunjungan mahasiswa dan dosen ke area proyek sebanyak 5 (lima) kali.
 - b. Pembuatan plot pengamatan semai, pancang, tiang dan pohon oleh mahasiswa.
 - c. Mahasiswa melakukan kegiatan penanaman, *monitoring* penanaman dan hidroponik, serta sosialisasi dan pelatihan HHBK.
 - d. Mahasiswa telah memperoleh banyak ilmu, pengalaman dan data selama kegiatan proyek.
5. Pelatihan pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan pembentukan HHBK seperti purun, hidroponik dan *beje* telah selesai dilaksanakan.



Hidroponik padi.



Tanaman Jelutong mulai tumbuh di gambut.



Beruang Madu.



Monyet/Beruk.



Babirusa yang tersisa di hutan HAL.



Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemanenan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta kegiatan pelatihan patroli hutan, pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan.



Mitra Pelaksana
Yayasan Teungku Chik Pante Kulu Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK)

Judul Program

Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Areal Hutan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (HP-STIK).



Anggaran

Rp 3.488.079.500



Periode Pelaksanaan

24 bulan
(April 2016 - Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh

Latar belakang

Sebuah inisiatif program untuk melindungi Hutan Pendidikan STIK yang dikukuhkan dengan SK Menhut No. SK. 724/MENHUT/II/2009 terutama untuk penurunan emisi GRK melalui rehabilitasi guna pemulihan habitat Harimau Sumatera (*Pantera tigris sumaterae*) dan Orangutan (*Pongo abelii*) yang berdampak pada penurunan emisi.

Tujuan

Manajemen hutan yang lebih baik untuk pelatihan dan penelitian yang ditetapkan berdasarkan Keputusan SK Menhut No. SK.724/MENHUT-II/2009 tentang penurunan lahan kritis; penyadartahuan mengenai informasi perubahan iklim kepada masyarakat; hutan untuk pelatihan dan penelitian dalam kondisi baik; 100.000 pohon baru dapat tumbuh baik di hutan.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Telah dilaksanakan studi analisis konflik kehutanan melalui rapat sosialisasi dan FGD.
2. Telah dilakukan pembersihan areal pembibitan dan dilakukan pengadaan bibit pohon dari 18 jenis lokal dan dari luar daerah melalui rekanan yang memiliki izin pengadaan benih (Balai Pembenihan Tanaman Hutan/ BPTH).
3. Telah dilakukan pengadaan bahan serta pembangunan sarana pembibitan.
4. Persiapan penanaman yang berkaitan dengan penyaluran bibit ke lubang tanam (penyiangan, pembersihan lahan, penyiraman bibit, pemilihan bibit) sebanyak 100.000 bibit diluas areal 80 ha.
5. Pengadaan sarana pendukung bibit (air, papan nama, obat-obatan/ herbisida, pagar pengaman tanaman).
6. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ini mencapai 50%.
7. Terdapat kendala persentase hidup tanaman. Hal ini terkait rencana pembangunan pagar yang seharusnya dilakukan pada bulan November 2017 namun belum terrealisasi hingga akhir tahun. Rencana pembangunan pagar ini terkendala administrasi, yakni belum jelasnya mata anggaran sumber pendanaan, sehingga pihak ketiga untuk pembangunan ini belum dapat menandatangani dokumen pengadaan.



Pusat pembibitan.



Areal hutan pendidikan STIK.



Bibit Pinang siap tanam.



Hutan nipah Yayorin.



Mitigasi
Berkas Lahan

PROGRAM USAID

batch
2

Sebanyak 12 proposal proyek mitigasi berbasis lahan melalui pendanaan USAID pada tahap kedua yang dilaksanakan oleh: Konsorsium Gaia , Fakultas Kehutanan UGM , Konsorsium FWI, Universitas Jember, Yayasan Terumbu Karang Indonesia, Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo, Yayasan Penyu Berau, Yayasan Palung, Yayasan Tiara Pusaka, Yayasan Leuser Internasional, *Indonesian Forestry and Governance Institute (IFGI)* dan Pusat Penelitian Karet.

1 Mitra Pelaksana Konsorsium Gaia-DB, CFES, dan LMDH Puncak Lestari



Judul Program

Rehabilitasi Hulu DAS Ciliwung Berbasis Masyarakat
(Ciliwung 0 Km).



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Latar belakang

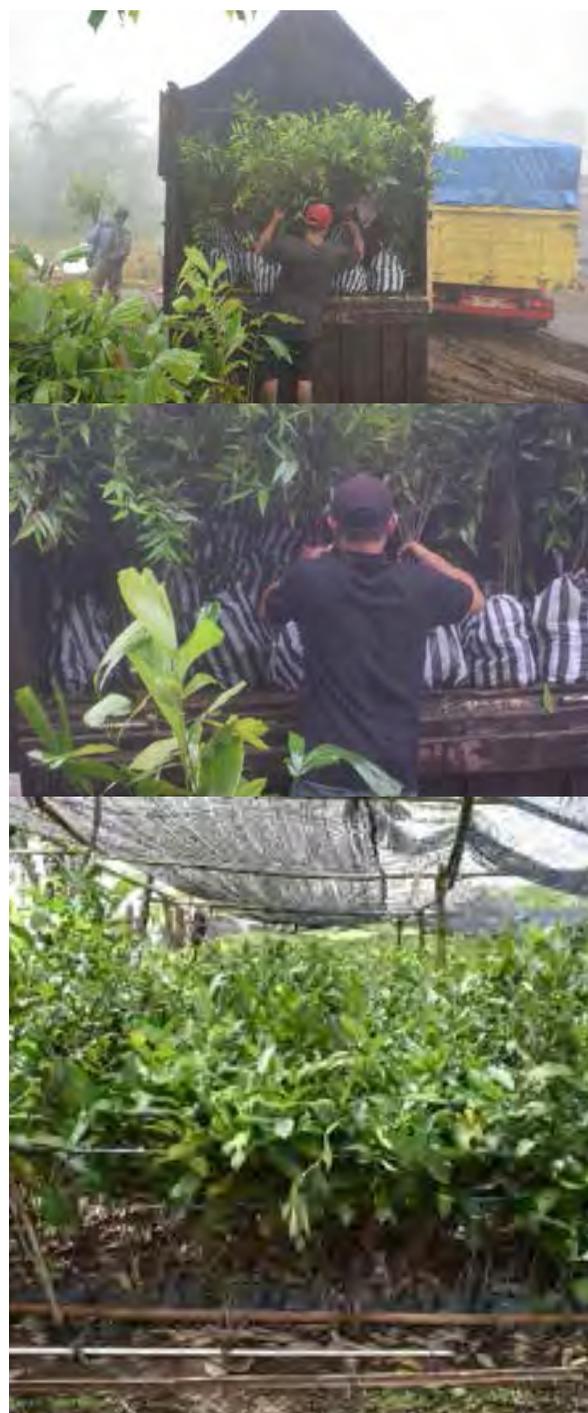
Lahan hulu DAS Ciliwung rusak dengan rata-rata kerapatan pohon hanya 86 pohon/ha. Sasaran proyek ini adalah memperbaiki lahan rusak tersebut dengan sistem agroforestri dengan target 400 pohon/ha.

Tujuan

Terehabilitasinya ekosistem hulu DAS Ciliwung melalui *agroforestry system* berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Penyusunan rencana pengelolaan hutan lestari di hutan pangkuan desa (HPD) Desa Tugu Utara di kawasan penyangga CA Telaga Warna melalui Sosialisasi, Finalisasi Laporan Pemetaan Blok Rehabilitasi secara partisipatif.
2. Penerapan sistem *agroforestry* dan perlindungan hutan pangkuan desa (HPD) Desa Tugu Utara di kawasan penyangga CA Telaga Warna melalui Survei analisa HHBK, survei penelitian rantai pasok produk unggulan desa dan *workshop* pengelolaan hutan serta *workshop* pendokumentasian dan pembuatan publikasi dari desa.
3. Menyusun *platform* pengelolaan pengetahuan rehabilitasi ekosistem yang berkelanjutan dengan *workshop* penyusunan *knowledge management* dan pendampingan kelompok pengelolaan hutan.
4. Pendampingan penyusunan *knowledge management*.
5. Mulai dikembangkan dan diterapkannya pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sumber daya hutan non kayu dan jasa lingkungan.



Bibit yang siap tanam.

2

Mitra Pelaksana
**Fakultas Kehutanan
Universitas Gadjah Mada**



Judul Program

Model Reforma Agraria untuk Peningkatan Produktivitas Sumberdaya Hutan Dalam Upaya Percepatan Pencapaian Kedaulatan Pangan, Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Emisi GRK.



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

Latar belakang

Perlunya percepatan model pembangunan kawasan tertinggal yang berupa hutan negara melalui perbaikan tatakelola hutan tanpa program konversi lahan hutan. Parameter target yang akan dicapai adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu model reforma agraria yang dijanjikan dalam Nawa Cita.

Tujuan

Peningkatan produktivitas lahan hutan dengan penerapan teknologi dan budidaya pertanian semi organik dalam upaya mengurangi emisi GRK melalui reforma agraria.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Teradopsinya *demonstration plot integrated forestry* dan *farming system* melalui pengembangan benih Padi Gogo dalam mendukung *output* 1 yaitu "Terbangunnya demplot IFFS seluas 50 ha.
2. Pembuatan peta penutupan lahan dilakukan dengan metode penginderaan jauh dengan teknik interpretasi foto udara telah terlaksana pada 8 HPD Desa yang berada dalam wilayah KHDTK Getas – Ngandong.
3. Sudah tersusun Rencana dan Kelembagaan Pengelolaan Hutan secara Partisipatif.
4. Sudah mulai adanya inisiasi kebijakan lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang sesuai dengan program mitigasi dan perubahan iklim.



Lahan kritis hutan jati.



Persiapan penanaman.



Padi yang telah ditanam.

3

Mitra Pelaksana
**Konsorsium Forest Watch Indonesia,
 Pusat Pengkajian Perencanaan dan
 Pengembangan Wilayah (P4W)–LPPM IPB**



Judul Program

Penguatan Kolaborasi Para Pihak Dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Hulu DAS Ciliwung.



Anggaran

Rp 1.983.360.000



Periode Pelaksanaan

16 bulan (Februari 2017 - Mei 2018)



Lokasi

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Latar belakang

Catatan *Forest Watch* Indonesia (FWI) menyebutkan bahwa laju kehilangan hutan di DAS Ciliwung pada periode 2000 sampai 2009 mencapai hampir 5.000 ha atau setara dengan luas Kota Sukabumi. Kemudian pada tahun 2013 hanya menyisakan tutupan hutan alam seluas 3.400 ha atau sekitar 8,98 persen dari luas total DAS Ciliwung.

Tujuan

Terwujudnya Kolaborasi Para Pihak (Pemerintah desa, kelompok tani hutan, Perum Perhutani, Balai TN. Gede Pangrango, Pemkab Bogor, PTPN Gunung Mas dan PT Sumber Sari Bumi Pakuan) dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Lahan yang Rendah Emisi di Hulu DAS Ciliwung, Kabupaten Bogor.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Meningkatkan partisipasi para pihak dalam menjaga luasan hutan tersisa dan meningkatkan perbaikan sumber daya lahan di kawasan hulu DAS Ciliwung melalui analisis statistik dan *overlaying* peta penggunaan lahan dan penutupan hutan & lahan dengan fungsi kawasan di Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan.
2. Membentuk kelompok masyarakat pelaku aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak dengan pembangunan kebun bibit di Kampung Cibulao dan Tugu Selatan serta pendampingan perawatan kebun bibit.
3. *Workshop* Pengelolaan Kopi seri I, II, III dan IV Budidaya, konservasi tanah dan air sebagai aktivitas dan praktik pertanian kopi organik serta pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan.
4. Sudah tersedianya peta blok rehabilitasi yang disiapkan secara partisipatif dan kolaboratif. Penanaman direncanakan akan dimulai di bulan Februari 2018.



Rumah pembibitan.



Survei densitas hutan.

4

Mitra Pelaksana
Universitas Jember



Judul Program

Pengelolaan Kawasan Rehabilitasi Taman Nasional Meru Betiri Melalui Pengembangan Desain Demonstrasi Plot dengan Prioritas Jenis Tanaman yang Memiliki Fungsi Penutupan Lahan Sepanjang Tahun.



Anggaran

Rp 1.996.055.637



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Jember, Jawa Timur

Latar belakang

Kawasan rehabilitasi TNMB yang berada di desa Wonoasri seluas 290 ha, dengan rata-rata densitas tegakan pohonnya <16% atau 234 batang/ha dan diversitas jenis juga masih sangat rendah ($H < 1$). Selain itu stratifikasi kawasan selama 15 tahun terakhir sangat homogen karena hanya terdiri atas dua strata yaitu tegakan pohon dan tanaman pertanian atau hortikultura.

Tujuan

Meningkatkan diversitas tumbuhan endemik dan stratifikasi kawasan rehabilitasi TNMB sebagai kawasan lindung berdasarkan indikator biofisik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan mengembangkan kluster ekonomi kreatif.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Survei dan evaluasi tegakan untuk pengayaan MPTS.
2. *Workshop* ekonomi kreatif serta sosialisasi hutan lorong dan pekarangan di Dusun Curah Lele sebagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Adanya persiapan rehabilitasi lahan seluas 285 ha. Pemeliharaan bibit Pakem dan Kemiri sebagai *demonstration plot* hutan sekunder di lahan rehabilitasi *Resort Wonoasri* TNMB.
4. Penghitungan stok karbon (*baseline*) nilai ekologi hutan sekunder TNMB.
5. Penambahan pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah untuk peningkatan organik karbon (SOM $\pm 1\%$), KTK, kejenuhan basa dan pH dari level rendah menjadi tinggi.



Tanaman hutan yang tumbuh di hutan lorong.



Diskusi di iklim rehabilitasi.



Demplot program ICCTF - Universitas Jember.

5

Mitra Pelaksana
Yayasan Terumbu Karang Indonesia



Judul Program

Belitung *Mangrove Park*: Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Sebagai Taman Wisata *Mangrove* dalam Upaya Rehabilitasi Ekosistem dan Sekuestrasi Karbon.



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Belitung, Bangka Belitung

Latar belakang

Dampak kerusakan ekosistem akibat pertambangan timah Bangka Belitung berupa kolam-kolam bekas tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya vegetasi. Setelah daratan penuh lubang tambang, maka terjadi pembukaan lahan tambang timah di daerah pesisir, dan lahan tambang telah merambah ke kawasan hutan *mangrove* dan hutan pantai. Hilangnya hutan *mangrove* dan hutan pantai berkontribusi secara tidak proporsional dengan emisi karbon, hilangnya keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kerentanan penduduk pantai. Di satu sisi, Pemerintah Belitung menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 100.000 orang per tahun.

Tujuan

Mengurangi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem dan masyarakat Kabupaten Belitung dengan melakukan rehabilitasi *mangrove* pada lahan bekas tambang, melalui hak pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Pengelola HKm Juru Seberang Bersatu Desa Juru Seberang, Kec. Tanjung Pandang, Belitung-Babel binaan Yayasan Terangi meraih Juara I Penghijauan Tingkat Kabupaten dan Juara III Tingkat Nasional dalam kategori Kelompok Pemegang HKm.
2. Pendampingan perawatan bibit untuk rehabilitasi *mangrove* 300 ha yang rusak akibat tambang.
3. Sudah dilakukan pembibitan, penanaman dan pemetaan *mangrove* di HKm Juru Seberang.
4. Pembuatan peta stok karbon (*baseline*).
5. Adanya peningkatan kemampuan pengelolaan taman wisata *mangrove* 20 orang untuk pengembangan ekowisata bahari.
6. Penyelesaian pembangunan menara sampai lantai.
7. Pendampingan pembersihan lahan dan pembuatan tiang pancang *mangrove track* 300 m.



Sampling karbon di mangrove.



Bibit rehabilitasi mangrove.



Piagam penghargaan juara 2 kabupaten.



Piagam penghargaan juara 3 nasional untuk rehabilitasi lahan HKm.

6

Mitra Pelaksana Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo



Judul Program

Pemulihan dan Perlindungan Ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitarnya.



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

13 bulan (Februari 2017 - Februari 2018)



Lokasi

Kabupaten Pelalawan, Riau

Latar belakang

Berkurangnya fungsi ekologis TNTN akibat berubahnya 75% tutupan hutan menjadi perkebunan sawit, belukar dan tumbuhan invasif sehingga mengakibatkan daya dukung hutan TNTN untuk spesies terancam punah menjadi berkurang. Tekanan yang tinggi terhadap TNTN antara lain juga disebabkan karena masyarakat tidak merasa mendapatkan manfaat dari keberadaan TNTN dan terdegradasinya kearifan lokal.

Tujuan

Melakukan serangkaian kegiatan sehingga dapat mengurangi jumlah lahan yang terdegradasi di TNTN melalui kegiatan pemulihan ekosistem, melindungi hutan tersisa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Penanaman pohon untuk pemulihan 375 ha lahan terdegradasi berbasis masyarakat.
2. Fasilitasi pemanfaatan HHBK untuk kerajinan tangan dalam bentuk pelatihan, produksi, pemasaran.
3. Kelompok perempuan dilatih untuk pembibitan dan pencarian bibit serta pembibitan untuk peningkatan kesejahteraan 120 KK.
4. Patroli rutin oleh penduduk LKB, Air Hitam dan Situgal untuk perlindungan 20.000 ha lahan melalui penguatan kearifan lokal.



Pusat pembibitan.



Tim patroli menemukan kebakaran lahan dan melakukan pemadaman.



Tim patroli menemukan jembatan yg dibangun oleh perambah hutan.

7

Mitra Pelaksana Yayasan Penyau Berau



Judul Program

Pengelolaan Kawasan Hutan *Mangrove* Secara Terpadu sebagai Wujud Mitigasi Perubahan Iklim untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau.



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

16 bulan (Maret 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Latar belakang

Hutan *mangrove* Kecamatan Batu Putih termasuk di dalam kawasan konservasi Taman Pesisir Kepulauan Derawan, yang merupakan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Berau. Ancaman terbesar dari kawasan *mangrove* di Batu Putih adalah adanya alih fungsi lahan atau deforestasi.

Tujuan

Terbangunnya model pengelolaan kawasan konservasi laut daerah dan hutan *mangrove* di Kecamatan Batu Putih oleh unit pengelola tingkat Kecamatan yang mendukung efektifitas pengelolaan kawasan konservasi laut Kabupaten Berau dengan mengembangkan kegiatan ekowisata yang dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Adanya pengelolaan kawasan hutan *mangrove* secara lestari melalui ekowisata yang menjamin kelestarian sumberdaya hutan *mangrove* yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Batu Putih melalui pendampingan kelompok HKm untuk wisata *mangrove* serta pembangunan *tower mangrove* dan *track mangrove*. Kawasan ekowisata ini sudah didukung dengan SK Kepala Kampung.
2. Pembangunan kebun bibit *mangrove*, dan pendampingan pembibitan *mangrove* untuk penambahan stok karbon di lahan seluas 20 ha di Kecamatan Batu Putih.
3. Pembuatan alat pemecah ombak dengan konstruksi sederhana (APO) di Kampung Batu Putih.



Pelatihan perhitungan karbon.



Jembatan *mangrove track*.



Lokasi pelabuhan dan parkir untuk pusat wisata.

8

Mitra Pelaksana Yayasan Palung



Judul Program

Pengelolaan Beberapa Alternatif Sumber Mata Pencarian Masyarakat secara Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Penting Lahan Gambut di Sekitar Kawasan Taman Nasional Gunung Palung.



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat

Latar belakang

Pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung, belum optimalnya pencegahan dan restorasi di kawasan bekas kebakaran serta pengelolaan Lahan gambut yang berkelanjutan oleh masyarakat.

Tujuan

Ekosistem gambut di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Palung dapat dipertahankan fungsi ekologisnya dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati berkat adanya pengelolaan sumber mata pencarian masyarakat yang berkelanjutan.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Pembangunan 20 sekat kanal untuk perbaikan pengelolaan kebun dan sawah menjadi lebih produktif dan adaptif terhadap kondisi ekosistem gambut.
2. Pendampingan perawatan demplot *agroforestry*.
3. Persiapan lahan penanaman padi rawa di 5 desa.
4. Dilakukannya sekolah lapang di 5 area bekas terbakar tentang pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.
5. *Workshop* Pengembangan HHBK di 5 desa (minyak kelapa dan gula nipah) untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan oleh masyarakat di kawasan hutan dan lahan umum.
6. Sudah terdapat unit usaha HHBK berbasis gambut di desa (gula nipah, minyak kelapa, arang dan asap cair tempurung kelapa, anyaman pandan dan lidi nipah).
7. Dilakukannya *workshop* pemasaran untuk perbaikan sistem budidaya, penanganan pasca panen, dan perbaikan sistem pemasaran.



Sekat kanal.



Survei keanekaragaman hayati.



Pelatihan bagi kelompok wanita.

9

Mitra Pelaksana
Yayasan Tiara Pusaka**Judul Program**

Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Mitigasi Gas Rumah Kaca dan Pemanasan Global Berbasis Lahan Melalui Pengembangan Pertanian Organik di Pulau Saparua.

**Anggaran**

Rp 2.000.000.000

**Periode Pelaksanaan**

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)

**Lokasi**

Kabupaten Maluku Tengah, Maluku

Latar belakang

Pola hidup masyarakat lokal Pulau Saparua yang suka membakar sampah dan suka membakar lahan untuk aktivitas Pertanian serta masih menggunakan pupuk dan pestisida organik sebagai penyumbang emisi GRK.

Tujuan

Meningkatkan mitigasi GRK dan pemanasan global melalui perubahan perilaku masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan lahan (pertanian organik).

Kemajuan yang telah dicapai

1. Peningkatan sosialisasi GRK kepada Raja-raja dan Latupati agar dapat terlibat secara aktif mengatasi permasalahan gas rumah kaca dan pemanasan global.
2. Ditandatanganinya kesepakatan 11 Raja dan diundangkannya ke 11 Negeri sebagai bagian Jaringan mitigasi gas rumah kaca dan pemanasan global.
3. *Workshop* penanaman hortikultura organik, pembuatan pupuk dan pestisida organik serta pelatihan pupuk dan pestisida organik yang dilanjutkan pendampingan penanaman dan persiapan pendederan pala sebagai bagian aktivitas berkebun dan bertani dengan teknik ramah lingkungan.



Panen sawi organik.



Panen timun organik.



Panen kangkung organik.

10

Mitra Pelaksana Yayasan Leuser Internasional



Judul Program

Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung dan Peningkatan Cadangan Karbon pada Agroforestri Kopi Melalui Penerapan Budidaya Ramah Lingkungan.



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Bener Meriah, NAD

Latar belakang

Perubahan iklim yang terjadi berdampak pada keberlangsungan produksi kopi. Ketidakpastian iklim dan peningkatan suhu udara menimbulkan periode kemarau yang lebih panjang, perubahan dalam siklus hujan dan intensitasnya, perubahan periode panen serta meningkatnya serangan hama dan penyakit.

Tujuan

Memulihkan hutan lindung dan daerah tangkapan air di kawasan hutan lindung yang pernah dirambah oleh masyarakat, serta peningkatan cadangan karbon dan pendapatan petani kopi melalui pengayaan tanaman dan penerapan teknologi *Climate Smart Coffee Production System*.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Perawatan bibit di pusat bibit untuk rehabilitasi Hutan lindung seluas 100 ha dengan tanaman jenis Meranti, Sengon, Jengkol, Pete, dan Alpukat, sebanyak 20.000 batang oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Meningkatnya kesadaran 100 KK masyarakat Desa Pepanyi dan Nosar Baru, Kecamatan Permata, terhadap lingkungan dan meningkatnya kemampuan teknik budidaya dan pasca panen.
3. Penanaman tanaman pagar dan pelindung produktif jenis Jeruk dan Alpukat, sebanyak 4.000 batang oleh KSM.
4. Penyiapan kandang ternak budidaya ternak sapi jenis lokal.
5. Pendampingan pembuatan kompos untuk pupuk organik.



Kopi organik arabika siap panen.



Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).



11

Mitra Pelaksana Indonesian Forestry and Governance Institute (IFGI)



Judul Program

Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Lahan di Sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk Pencegahan Alih Fungsi Hutan Rakyat Melalui Peningkatan Produktivitas Lahan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Lebak, Banten

Latar belakang

Alih fungsi Hutan Rakyat di Kabupaten Lebak untuk penggunaan lainnya (pertambangan dan pemukiman) yang tinggi disebabkan rendahnya produktivitas Lahan. Masyarakat cenderung untuk menjual lahannya bagi peruntukan lainnya dikarenakan *added value* yang rendah dan dirasakan tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi pendapatan masyarakat.

Tujuan

Perbaikan tata kelola hutan rakyat yang mendukung peningkatan produktivitas lahan secara ramah lingkungan untuk pencegahan alih fungsi lahan hutan rakyat di Kabupaten Lebak.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Adanya *Pilot Site Agroforestry* seluas 100 ha di 9 desa di Kecamatan Cigemblong, Lebak, Banten melalui pendampingan penanaman Nilam dan tanaman buah Capuran.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat model *agroforestry* dengan pendampingan penanaman HHBK di Lahan dan *workshop* HHBK.
3. Bekerjasama dengan eksporter Nilam di Jakarta dan Perusahaan lainnya sebagai jaminan pemasaran produk Hutan Rakyat.
4. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk dukungan pengembangan *agroforestry*.
5. Sudah mulai dilakukannya penghitungan karbon dan direncanakan akan selesai pada bulan Maret 2018.



Pusat pembibitan.



Pengolahan tanaman rempah menjadi jamu.

12

Mitra Pelaksana Pusat Penelitian Karet



Judul Program

Penurunan Emisi CO₂ di Lahan Gambut dengan Pengaturan Tata Kelola Air Menggunakan *Water Level - Canal Blocking* Berbasis Komposit Karet Alam.



Anggaran

Rp 2.000.000.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Februari 2017 - Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir,
Sumatera Selatan

Latar belakang

Kegagalan pengelolaan tata air lahan gambut antara lain disebabkan belum optimalnya penerapan sistem *canal blocking* yang tepat dan baik. *Canal blocking* yang digunakan saat ini belum sepenuhnya mempertimbangkan faktor disain penentuan *water level* yang tepat dari lahan gambut dan juga belum mempertimbangkan aspek sifat material seperti: kekuatan, keawetan dan kemudahan operasional. Material *canal blocking* yang ada menggunakan kayu, di mana ketersediaan kayu semakin sedikit, sehingga mengganggu kelestarian lingkungan.

Tujuan

Peningkatan kualitas dan produktivitas lahan gambut dan peningkatan kualitas udara di sekitar lahan gambut melalui pengelolaan tata air tanpa bakar di Desa Sungai Rengit Kabupaten Banyuasin dan Desa Patra Tani Kabupaten Ogan Ilir.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Pelaksanaan demplot agroforestri di Sungei Rengit sebagai bentuk peningkatan produktivitas lahan.
2. Aplikasi prototipe produk berupa *canal blocking* dengan material komposit karet. Perkembangan saat ini adalah pembangunan 1 unit *canal blocking* dan *monitoring* pembasahan.
3. Sosialisasi pengelolaan dan rencana kerja tingkat desa untuk memetakan sosial ekonomi masyarakat dan *roadmap* pengembangan ekonomi serta kelembagaan masyarakat di Desa Sungai Rengit.
4. Pembuatan dan pemasangan *canal blocking*.



Peninjauan lokasi calon *canal blocking*.



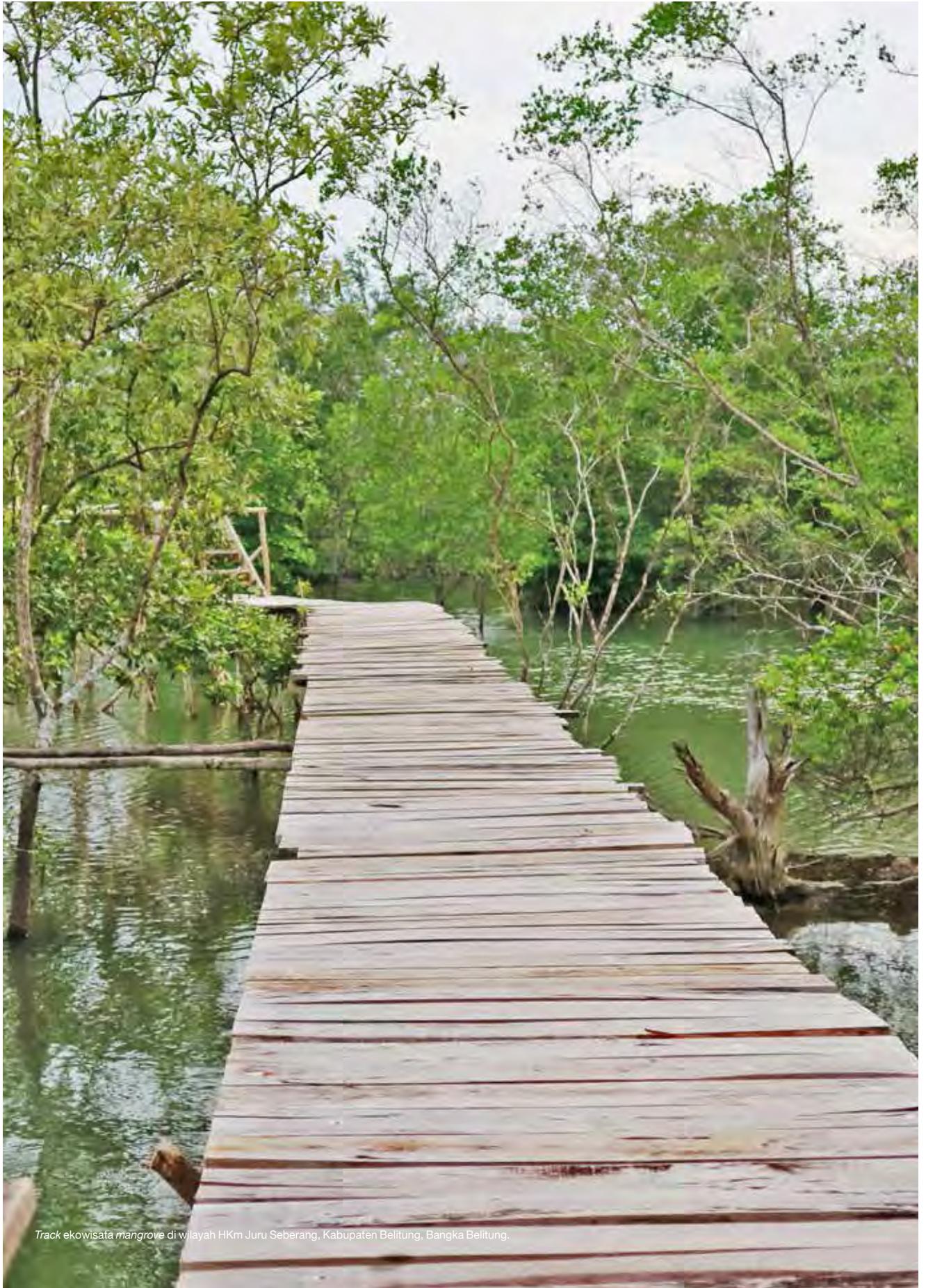
Kanal yang akan diblok.



Kanal yg telah selesai dibangun.



Pengukuran sampel tanah.



Track ekowisata mangrove di wilayah HKm Juru Seberang, Kabupaten Belitung, Bangka Belitung.



Mitigasi
Berbasis Lahan

PROGRAM UKCCU

Sebanyak 11 proyek mitigasi berbasis lahan melalui pendanaan UKCCU dilaksanakan di 5 Provinsi yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah dan dilaksanakan oleh 11 lembaga/ konsorsium: Yayasan Mitra Insani, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FAPERIKA) Universitas Riau, Riau Women Working Group (RWWG), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL) selaku Ketua Konsorsium Restorasi Gambut Jambi, Walhi Sumatera Selatan, Perkumpulan Hutan Kita Institute, Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan, Konsorsium Walhi Kalimantan Barat, Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat Dayak Pancur Kasih (PPK), Pusat Pengendalian Kebakaran dan Rehabilitasi Hutan (P2KLH) Universitas Palangkaraya, dan Yayasan Borneo Nature Indonesia.

1

Mitra Pelaksana Yayasan Mitra Insani



Judul Program

Mitigasi Perubahan Iklim melalui Peningkatan Peran serta Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut berbasis Kesatuan Hidrologi Gambut.



Anggaran

Rp 4.349.834.000



Periode Pelaksanaan

15 bulan (Januari 2017 – Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, Riau

Latar belakang

Hilangnya hutan gambut menimbulkan banyak persoalan di Riau, yaitu kerusakan ekosistem dan biodiversitas gambut, penurunan muka air akibat rusaknya siklus hidrologi dan kebakaran lahan. Kebakaran lahan umumnya dan terberat terjadi di lahan gambut karena tidak hanya terbakar di permukaan tetapi juga di bawah permukaan.

Tujuan

Meningkatkan pengelolaan hutan dan lahan gambut melalui kolaborasi langsung dengan pemerintah di tingkat nasional dan daerah.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Koordinasi para pihak di 2 kabupaten yakni Siak dan Pelalawan.
2. Tersusunnya brief kebijakan anggaran tata kelola gambut di Kabupaten Siak dan Pelalawan.
3. Rencana Aksi Restorasi Gambut di 2 kabupaten (Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan) sebagai bentuk dukungan terhadap Rencana Aksi Restorasi BRG dan TRG Daerah.
4. Restorasi gambut di 7 desa wilayah target Badan Restorasi Gambut melalui pembangunan 19 buah *canal blocking*.
5. Tersusunnya Perdes tentang karhutla di 7 desa lokasi.
6. Pendampingan penyusunan dokumen Hutan Desa di 2 desa.
7. Pembuatan demplot tanaman yang bermanfaat berupa *pilot site agroforestry*: 17.500 bibit.
8. Pengembangan ekowisata *mangrove* di 3 desa.
9. Pembentukan dan pelatihan 5 kelompok MPA serta pemberian peralatan pemadam kebakaran.
10. Pengembangan radio komunitas untuk diseminasi dan penyadartahuan isu kebakaran hutan dan kesehatan.
11. Diseminasi penyadartahuan isu kebakaran dan kesehatan di 14 sekolah dan 5 puskesmas.
12. Tersusunnya *Standard Operating Procedures (SOPs)* dan *Early Warning System (EWS)* respon kebakaran di 7 desa.



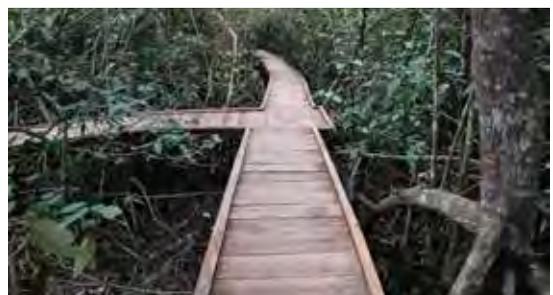
Sekat kanal di Kampung Penyengat sebagai bentuk kegiatan *Rewetting*.



Siaran oleh warga di radio komunitas untuk diseminasi penyebarluasan informasi mengenai karhutla.



Pemeriksaan sekat kanal sebagai bagian dari *monitoring* yang dilakukan masyarakat.



Track ekowisata *mangrove* untuk mendukung pengelolaan wisata *mangrove*.

2

Mitra Pelaksana
**Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Riau**



Judul Program

Konservasi Hutan Gambut Melalui Usaha Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sungaitohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.



Anggaran

Rp 1.697.992.000



Periode Pelaksanaan

16 bulan (Januari 2017 – April 2018)



Lokasi

Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau

Latar belakang

Kawasan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau menjadi salah satu wilayah terdepan NKRI dan menjadi andalan dalam restorasi gambut nasional. Wilayah gambut disana kondisinya termasuk yang rentan terhadap ancaman kehilangan luasan. Kebakaran hutan dan alih fungsi lahan menjadi faktor penyebab pokoknya dari ancaman tersebut. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka luasan rawa gambut berikut hutannya akan menurun dan akan mempengaruhi stok karbon pada nilai standar potensi hutan normal (setidaknya 35-100 ton CO₂ eq).

Tujuan

1. Mengkaji ekosistem rawa gambut secara bio-ekologis.
2. Mengkaji upaya konservasi ekosistem rawa gambut berdasarkan aspek ekologi untuk pengembangan usaha budidaya ikan.

3. Memberikan keterampilan kepada masyarakat lokal mengenai aspek pemeliharaan ikan dan pengolahan hasil perikanan bermutu prima hingga menjadi produk yang siap dipasarkan.
4. Membina masyarakat lokal dalam hal konservasi rawa gambut yang berkelanjutan serta pemasaran hasil perikanan budidaya maupun olahannya.
5. Merintis pendirian laboratorium lapangan untuk penelitian ekosistem rawa gambut.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Pembentukan 4 kelompok masyarakat (32 orang) disertai Pelatihan Budidaya Perikanan.
2. Pembentukan 5 kelompok masyarakat (20 orang) dan Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan.
3. Penanaman 4.000 bibit *mangrove*.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan budidaya ikan, pengolahan hasil ikan, konservasi dan revegetasi, pelatihan pemasaran dan ekowisata.
5. Melakukan restorasi ekosistem gambut melalui kegiatan revegetasi, konservasi dan ekowisata seluas kurang lebih 500 ha; dengan penanaman 42.260 bibit tanaman kelapa dan sagu untuk revegetasi dan konservasi serta pemanfaatan kawasan gambut untuk *agroforestry*.
6. Pengembangan Komunitas Ekowisata *Mangrove*.
7. Membangun *pilot site* pemanfaatan kawasan gambut secara lestari dan bernilai ekonomi berupa kolam budidaya ikan seluas 2 ha sebagai wujud '*rewetting*' kawasan rawa gambut.
8. Penyusunan 2 jenis peta wilayah Desa Sungaitohor.



Pelatihan pengolahan hasil perikanan.



Penyiapan demplot kolam budidaya ikan.



Kolam budidaya ikan.

3

Mitra Pelaksana Riau Women Working Group



Judul Program

Inisiasi Kelompok Perempuan dalam Mengurangi Emisi yang Berasal dari Kebakaran Hutan, Kebun dan Gambut di Kelurahan Pelintung, Guntung, Mundam dan Teluk Makmur Kotamadya Dumai (Pendekatan Kolaborasi Kelompok Perempuan dan Masyarakat Peduli Api dalam Penanggulangan Karhutla untuk Mengurangi Emisi Karbon).



Anggaran

Rp 2.561.944.000



Periode Pelaksanaan

14 bulan (Januari 2017 – Februari 2018)



Lokasi

Kota Dumai, Riau

Latar belakang

Pengelolaan Tata Ruang di 4 kelurahan (Kelurahan Pelintung, Guntung, Mundam dan Teluk Makmur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu kesatuan hidrologis gambut Giam Siak Kecil) menjadi perkebunan sawit serta pembukaan kanal di sekitar wilayah proyek berdampak pada kekeringan lahan gambut di wilayah tersebut sehingga rentan terjadi kebakaran pada saat musim kemarau. Berdasarkan analisis riwayat titik api dari NASA *Firm Confidence* di atas 70 sebanyak 683 titik api dari tahun 2012-2014.

Tujuan

1. Pengelolaan lahan dan hutan wilayah gambut berbasis masyarakat.
2. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan dan hutan wilayah gambut.
3. Pelibatan Kelompok Perempuan dalam upaya mitigasi berbasis lahan.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Penyusunan dokumen Rencana Aksi dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran.
2. Pembentukan 4 kelompok masyarakat (40 orang) disertai dengan pendampingan dan pelatihan *agroforestry*.
3. Terbangunnya *agroforestry* di ekosistem gambut dan promosi *agroforestry* di ekosistem gambut melalui penanaman 600 tunas Jahe dan 1.000 bibit Jelutung.
4. Pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 4 kelompok dan pemberian peralatan pemadam kebakaran.
5. Diseminasi dan sosialisasi karhutla melalui pencetakan 2.000 buah poster.
6. Penyusunan dokumen *Standard Operating Procedures* (SOPs) dan *Early Warning System* (EWS) respon kebakaran.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat dengan pelatihan pembuatan pelet ikan dari gulma gambut (Pakis dan Kelakai).
8. Pemberian bantuan 4 unit mesin pembuat pelet ikan.



Demplo *agroforestry* tanaman jahe merah yang ditanam kelompok perempuan Kelurahan Guntung.



Pembangunan sekat kanal di lokasi proyek.



Pelet ikan sebagai hasil produksi untuk memenuhi pakan ikan dan dijual.

4

Mitra Pelaksana
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL) selaku Ketua Konsorsium Restorasi Gambut Jambi



Judul Program

Membangun Model Pertanian Berkelanjutan dan Pemulihan Ekosistem Gambut Terbakar Berbasis Tata Guna Lahan.



Anggaran

Rp 4.094.759.000



Periode Pelaksanaan

15 bulan
(Januari 2017 – Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi

Latar belakang

Sebagai kawasan konservasi gambut prioritas di Indonesia, bentang alam Berbak terus mengalami penurunan luas dan fungsinya akibat berbagai tekanan, seperti penggunaan untuk lahan pertanian, perkebunan HTI dan sawit, pembalakan liar dan pemukiman. Pembangunan konstruksi kanal untuk kepentingan perkebunan sawit, HTI,

illegal logging, kawasan pertanian dan pemukiman merupakan pendorong utama subsidensi gambut dan memberikan dampak serius kerusakan hutan dan lahan gambut. Banjir pada saat musim hujan, kebakaran pada saat kemarau, penurunan muka air hingga beberapa meter serta terjadinya interupsi air laut ke kawasan pertanian dan pemukiman adalah dampak yang terjadi akibat rusaknya ekosistem hutan dan rawa gambut.

Tujuan

Mendukung upaya pencapaian target mitigasi dan restorasi lahan gambut pemerintah nasional dan daerah berbasis perbaikan tata guna lahan gambut.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dan lahan gambut melalui kolaborasi langsung dengan pemerintah nasional dan daerah melalui:
 - Penyusunan dokumen kebijakan pemerintah daerah terkait rencana

aksi daerah untuk tatakelola gambut di tingkat provinsi.

- *Launching* Pergub 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla.
 - Pembangunan 6 *canal blocking* di lokasi target program untuk mendukung *rewetting* gambut.
 - Pembentukan kelompok tani *agroforestry* di 3 desa (45 orang) seluas masing-masing 2 ha.
 - Pembuatan demplot *agroforestry* dan penanaman 10.000 bibit.
 - Pembentukan Sekolah Lapangan *agroforestry*.
2. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan strategi-strategi pencegahan kebakaran dan kampanye bahaya kebakaran serta praktek-praktek baik masyarakat/ *community best practices* melalui:
 - Pembentukan 5 kelompok MPA di 5 desa (50 orang).
 - Penyusunan dokumen SOP dan EWS pemadaman Karhutla.



Praktek pelaksanaan strategi pencegahan kebakaran oleh masyarakat.



Sekat kanal di lokasi proyek KRG Jambi.



Launching Pergub no.31 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Perda no.2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian karhutla oleh Gubernur Jambi.

5

Mitra Pelaksana Walhi Sumatera Selatan



Judul Program

Perlindungan dan Pengelolaan Gambut Melalui Skema Desa Ekologis.



Anggaran

Rp 1.381.999.000



Periode Pelaksanaan

15 bulan
(Januari 2017 – Maret 2018)



Lokasi

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Latar belakang

Sistem pertanian Desa Bangsal di lahan gambut masyarakat hanya mengandalkan padi tadah hujan yang panen hanya 1 kali dalam setahun. Sementara itu, informasi dan bantuan sangat minim. Masyarakat pernah

beberapa mengalami gagal panen karena praktek budidaya di lahan gambut yang belum optimal, sehingga dampak ekonominya mempengaruhi 1 sampai 2 tahun ke depan.

Tujuan

1. Mendorong percepatan pengembangan desa ekologis di wilayah gambut dalam rangka pengurangan emisi melalui kegiatan lokal.
2. Melakukan perencanaan pengelolaan lahan gambut dalam bentuk *agroforestry site* yang berbasis kearifan lokal.
3. Inisiasi Kebijakan lokal terkait dengan program mitigasi dan perubahan iklim.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Adanya Praktek Pengelolaan Lahan

Gambut untuk Pertanian yang agroekologis dalam kaitannya dengan pengurangan emisi karbon dan perbaikan di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) melalui pembangunan 2 buah *canal blocking*.

2. Terbangunnya rencana Tata Kelola Lahan Gambut dalam bentuk *Pilot Site Agroforestry* dengan pembentukan dan pendampingan 2 kelompok *agroforestry* di 2 desa.
3. Penanaman 1.000 bibit pada demplot *agroforestry*.
4. Diseminasi Karhutla untuk 500 orang.
5. Pembentukan 2 kelompok MPA di 2 desa (20 orang).
6. Inisiasi kebijakan lokal terkait dengan mitigasi perubahan iklim berupa penyusunan dokumen rencana aksi di 2 desa.
7. Penyusunan dokumen SOP dan EWS respon kebakaran.



Kelompok perempuan Desa Bangsal memanen sayur di demplot *agroforestry* di lahan gambut.



Hand tractor, bantuan alat ICCTF kepada kelompok KOMPAG Desa Nusantara untuk peningkatan hasil pertanian.



Salah satu demplot *agroforestry* untuk tanaman padi organik di Desa Nusantara.

6

Mitra Pelaksana Perkumpulan Hutan Kita Institute



Judul Program

Pembangunan Demplot dan Pilot Restorasi Gambut di Kawasan Hutan Rawa Gambut Bekas Terbakar sebagai Lokasi Percontohan di Lokasi Prioritas Program Badan Restorasi Gambut Kabupaten MUBA dan OKI di Sumatera Selatan.



Anggaran

Rp 4.238.705.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan
(Januari 2017 – Mei 2018)



Lokasi

Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan

Latar belakang

Lahan Gambut terbakar di Sumatera Selatan, 410.962 ha, di Kabupaten OKI 57% (234.277 ha) dan di MUBA 24.5% (100.584 ha). Kejadian tersebut bukan hanya berdampak secara langsung bagi masyarakat lokal dan adat tetapi

juga berdampak secara nasional dan internasional. Negara diprediksi mengalami kerugian sebesar Rp 221 triliun akibat Karhutla dan kabut asap yang terjadi di tahun 2015. Belum optimalnya keterlibatan *stakeholder* dalam upaya pencegahan dan upaya restorasi kawasan hutan gambut bekas terbakar.

Tujuan

1. Mendorong kebijakan di tingkat Kabupaten dan desa terkait dengan restorasi gambut dan pencegahan kebakaran.
2. Terwujudnya demplot yang menjadi contoh untuk dilakukannya pengembangan *agroforestry* di lahan gambut, khususnya daerah yang bekas terbakar.
3. Mendorong peningkatan kapasitas bagi pemerintah dan masyarakat.
4. Mendorong munculnya inisiatif lokal terhadap restorasi dan penanganan kebakaran di lahan gambut.
5. Terwujudnya alternatif perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut berbasis inisiatif lokal desa.

Kemajuan yang telah dicapai

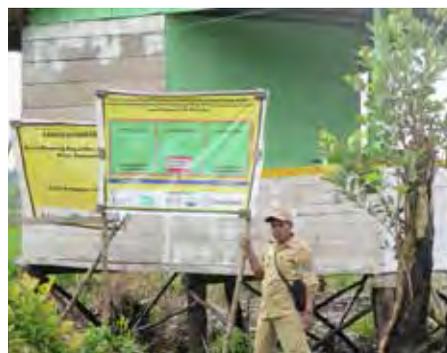
1. Penyusunan 2 dokumen rencana aksi dan 2 dokumen kebijakan pembentukan Pokja Restorasi Gambut Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Kemiring Ilir.
2. Pembentukan, pendampingan dan pelatihan bagi 4 kelompok masyarakat tani.
3. Pengembangan demplot *agroforestry* di ekosistem gambut dan promosi *agroforestry* di ekosistem gambut di 4 desa seluas 26 ha.
4. Penanaman 10.000 bibit.
5. Pilot sites menggunakan aturan dan prosedur mengenai restorasi dan *rewetting* lahan paska kebakaran terdiri dari Pembangunan 10 tabat.
6. Terlaksananya kegiatan pelatihan mengenai pemadaman kebakaran untuk anggota masyarakat dan staf pemerintah setempat melalui pembentukan 4 kelompok MPA (100 orang).
7. Penyusunan dokumen SOP dan EWS respon kebakaran.
8. Desiminasi mengenai isu kebakaran dan kesehatan pada 100 siswa dan cetak 500 poster.



Salah satu warga Desa Menang Raya yang siap melakukan penanaman di lahan gambut.



Lokasi demplot *agroforestry* lahan bekas terbakar.



Kepala Desa Teluk Makmur yang sedang berfoto di depan rumah pantau kebakaran hutan dan lahan yang merupakan hibah ICCTF.

7

Mitra Pelaksana Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan



Judul Program

Memperkuat Partisipasi Masyarakat dengan Optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan di Hutan Desa untuk Restorasi dan Menjaga Kelestarian Ekosistem Gambut Bentang Pesisir Padang Tikar.



Anggaran

Rp 3.626.169.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan
(Januari 2017 – Mei 2018)



Lokasi

Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat

Latar belakang

Bentang Pesisir Padang Tikar terdiri dari KHG Batu Ampar yang kondisi biofisik kawasan hidrologis gambutnya masuk dalam kategori rusak dimana sepanjang Januari 2015 s/d September 2016 ada 83 titik api sehingga perlu dilakukan upaya restorasi. Kemudian, KHG Tanjung Harapan masih relatif bagus sehingga perlu perlindungan dan optimalisasi hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan sehingga kondisinya tetap terjaga dengan baik dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

Belum adanya sinergitas dan minimnya keterlibatan *stakeholder* terkait dalam upaya pencegahan dan restorasi lahan gambut bekas terbakar.

Tujuan

1. Mendorong adanya implementasi kebijakan pada level provinsi, kabupaten, dan desa tentang restorasi gambut dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar.
2. Terciptanya model restorasi gambut berbasis masyarakat di Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar.
3. Mendorong peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya restorasi dan penanganan kebakaran di lahan gambut.
4. Mendorong munculnya inisiatif lokal terhadap restorasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan berbasis masyarakat.
5. Munculnya alternatif pendapatan masyarakat dari hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem gambut.
6. Mendorong pemahaman masyarakat berkaitan dengan penyebab dan bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Adanya kolaborasi langsung dengan pemerintah nasional dan daerah dengan penyusunan dokumen data baseline di Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar sebagai tolak ukur penyusunan rencana aksi restorasi.
2. Penyusunan dokumen rencana aksi restorasi gambut berbasis masyarakat di Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar.
3. *Pilot sites* menggunakan aturan dan prosedur mengenai restorasi dan *rewetting* lahan pasca kebakaran dengan pembangunan 15 sumur bor, pembangunan 1 *tower* pemantau api dan pengembangan sistem informasi desa.
4. Terbangunnya *agroforestry* di ekosistem gambut dan promosi *agroforestry* di ekosistem gambut Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar melalui penanaman 18.000 bibit tanaman yang bernilai ekonomis tinggi.
5. Terlaksananya kegiatan pelatihan mengenai pemadaman kebakaran untuk anggota masyarakat dan staf pemerintah melalui Pembentukan 10 kelompok MPA di 10 desa (50 orang).
6. Diseminasi dan pelatihan isu kebakaran dan kesehatan di 10 desa dan 10 sekolah.



Persiapan penanaman di lahan gambut bekas terbakar.



Pelatihan pencegahan karhutla untuk MPA.



Lokasi penanaman kelapa di areal gambut bekas terbakar di Desa Tasikmalaya.

8

Mitra Pelaksana
**Konsorsium
Walhi Kalimantan Barat**



Judul Program

Fasilitasi Perbaikan Kawasan Hutan Rawa Gambut Terdegradasi Akibat Kebakaran di 4 Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat.



Anggaran

Rp 5.754.183.700



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Januari 2017 – Mei 2018)



Lokasi

Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Latar belakang

Pada tahun 2015, setidaknya terjadi 2.495 titik kebakaran di Kalimantan Barat dan paparan asapnya menyebabkan 10.010 orang menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Kebakaran ini menghancurkan 42.183 ha lahan, yang dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 24.529 ha dan HTI 1.728 ha dan selebihnya di lahan *open access* dan wilayah kelola masyarakat (Walhi Kalbar, 2015). Dari total luas kawasan yang terbakar, 25.613 ha adalah kawasan rawa gambut yang masuk dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB). Hingga saat ini belum optimalnya pengelolaan dan perlindungan ekosistem rawa gambut dari alih fungsi penggunaan lahan.

Menjalankan kegiatan mitigasi berbasis lahan untuk menahan laju kerusakan hutan dan rehabilitasi bekas kebakaran pada kawasan ekosistem rawa gambut di 4 kabupaten Kalimantan Barat.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Tersusunnya 1 laporan kajian kekinian kondisi kerusakan dan pemanfaatan lahan gambut di 4 kabupaten.
2. Pembangunan 8 *canal blocking*, pembangunan 24 embung dan pembangunan 24 sumur bor untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran.
3. Pembangunan 4 menara pemantau api.
4. Penanaman 6.000 bibit rotan Jernang di areal gambut seluas 20 ha.
5. Terlaksananya pemulihan dan rehabilitasi lahan gambut bekas terbakar seluas 100 ha yang ditanami 50.000 bibit tanaman di 8 demplot di 4 kabupaten.
6. Terlaksananya pelatihan pemadaman kebakaran lahan gambut melalui pembentukan 4 kelompok MPA & pemberian alat damkar.
7. Penyusunan dokumen SOP dan EWS kebakaran hutan di 4 kabupaten.
8. Desiminasi bahaya kebakaran hutan dan dampaknya pada 50 sekolah, 50 puskesmas dan pencetakan 6.000 buah poster.

Tujuan



Menara pantau untuk pemantauan karhutla yang merupakan bantuan dari ICCTF.



Foto bersama MPA pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.



Diseminasi dan kampanye pencegahan karhutla melalui media televisi.

9

Mitra Pelaksana Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat Dayak Pancur Kasih (PPK)



Judul Program

Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan, melalui Pencegahan Karhutla dan Reforestasi untuk Kesejahteraan Masyarakat.



Anggaran

Rp 3.292.945.000



Periode Pelaksanaan

17 bulan (Januari 2017 – Mei 2018)



Lokasi

Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat

Latar belakang

Pemanfaatan ruang Kalimantan Barat yang didominasi oleh penguasaan investasi skala besar dan merusak menyebabkan kerusakan ekosistem dan berdampak pada menurunnya kualitas daya dukung ekologis, masyarakat kehilangan aset produksi, berupa tanah, air bersih, hutan dan ancaman punahnya keanekaragaman hayati serta meningkatnya konflik agraria.

Tujuan

Menjalankan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Karhutla sebagai upaya mitigasi perubahan iklim pada kawasan gambut bekas terbakar dan rentan/berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang akan datang.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Terlaksananya pelatihan pengorganisasian dan pembentukan kelompok tani bagi 14 kelompok tani (510 orang).
2. Terlaksananya pelatihan restorasi gambut, pencegahan dan penanggulangan karhutla bagi 14 kelompok (510 orang).
3. Terbangunnya *agroforestry* ekosistem gambut dan kawasan konservasi melalui penanaman 47.500 bibit tanaman yang bernilai tinggi.
4. *Media gathering* bagi 11 media lokal.
5. Penyusunan 7 dokumen SOP pencegahan karhutla.



Liputan kegiatan proyek mengenai kegiatan Pancur Kasih dan ICCTF.



Lokasi penanaman di lahan gambut bekas terbakar.



Pelatihan pengorganisasian dan pembentukan kelompok tani.

10

Mitra Pelaksana
Pusat Pengendalian Kebakaran dan Rehabilitasi Hutan (P2KLH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya



Judul Program

Pembuatan Sumur Bor dan Sekat Bakar untuk Pencegahan Kebakaran Gambut di Kalimantan Tengah.



Anggaran

Rp 4.507.181.000



Periode Pelaksanaan

18 bulan
(Januari 2017 – Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Pulang Pisau,
Kalimantan Tengah

Latar belakang

Sebagai upaya untuk mencegah terulangnya kejadian kebakaran lahan dan hutan rawa gambut seperti kejadian pada tahun 2015 yang merupakan kebakaran gambut terparah sepanjang sejarah, dan menjadi isu nasional. Kebakaran gambut akan mengancam

kubah gambut di Kalimantan Tengah yang seluas 1.492,846 ha. 60% kejadian kebakaran lahan dan hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah terjadi di Kabupaten Pulang Pisau dan oleh karena itu kabupaten Pulang Pisau merupakan prioritas untuk pemulihan restorasi gambut.

Tujuan

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk pembasahan gambut untuk pencegahan kebakaran lahan dan hutan gambut.
2. Penguatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada desa target.
3. Menyiapkan rencana aksi untuk pencegahan kebakaran.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api pada tingkat desa dan pelatihan 12 kelompok MPA dari 6 desa (120 orang) serta pemberian bantuan alat pemadaman kebakaran.

2. Pelatihan pembuatan sumur bor bagi 120 orang MPA.
3. Pembangunan 600 sumur bor masing-masing 100 unit pada tiap desa target, menggunakan aturan dan prosedur mengenai restorasi dan *rewetting* lahan paska sesuai ketentuan pada Badan Restorasi Gambut (BRG).
4. Pembangunan 3 menara pemantau api di Desa Taruna Jaya, Desa Pilang dan Desa Gohong.
5. Pembangunan sekat bakar sejauh 5 km dengan lebar 4 meter yang ditanami dengan pohon tahan api, seperti *Shorea Balangiran*, Jelutung dan Sago.
6. Penanaman tanaman tahan api di sepanjang jalur sekat bakar sebanyak 5.000 bibit.
7. Pembuatan alat pembuat sumur bor sebanyak 12 buah dimana masing-masing 2 unit pada tiap desa, untuk menunjang pembangunan sumur bor.



Menara pantau yang dibangun untuk pemantauan pencegahan karhutla yang merupakan bantuan dari ICCTF.



Kunjungan DPR RI dilokasi pembangunan sumur bor di lokasi proyek.



Pembuatan sumur bor.

11

Mitra Pelaksana Yayasan Borneo Nature Indonesia



Judul Program

Peatland Protection and Restoration in the Sabangau River catchment, Central Kalimantan.



Anggaran

Rp 1.468.145.000



Periode Pelaksanaan

15 bulan
(Januari 2017 – Maret 2018)



Lokasi

Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah

Latar belakang

Perlu adanya perlindungan dan pemulihan 50.000 ha hutan rawa gambut dalam LAHG, berdasarkan sejarah lokasi ini mengalami degradasi dikarenakan

pengeringan (*drainase*), penebangan dan kebakaran hutan. Pentingnya melestarikan kubah gambut dan keanekaragaman hayati di daerah ini; karena ketebalan gambut mencapai lebih dari 12 m, berdasarkan publikasi (Huijnen et al. 2016), sekitar 14,2 Tg C akan terlepas jika seluruh kawasan 50.000 ha LAHG mengalami kebakaran dengan rata-rata kedalaman 26 cm.

Tujuan

Mengurangi emisi karbon melalui pembasahan kembali lahan gambut sehingga mengurangi kehilangan dari degradasi dan oksidasi; untuk meningkatkan penyerapan karbon melalui reboisasi; dan untuk mengurangi kehilangan karbon dari pembakaran dengan membentuk dan memperkuat komunitas tim pemadam kebakaran.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar dikawasan Sabangau, Kalimantan Tengah area prioritas seluas 5.190 ha, melalui Pembangunan 150 *canal blocking*.
2. Rehabilitasi lahan gambut melalui kegiatan reforestasi seluas 272 ha dengan penanaman 1.700 bibit tanaman lokal.
3. Perlindungan kawasan hutan rawa gambut di kawasan LAHG dari ancaman kebakaran hutan dan lahan melalui peran serta masyarakat dengan Pembentukan dan pelatihan 2 kelompok MPA.
4. Penyusunan 2 dokumen rencana aksi pencegahan karhutla.
5. Penyadartahuan dan penguatan kapasitas melalui desiminasi karhutla di 2 sekolah dan 2 puskesmas (150 orang).



Penanaman oleh masyarakat di lahan gambut bekas terbakar di kawasan Sebangau.



Bibit yang disiapkan masyarakat untuk penanaman lahan gambut bekas terbakar di kawasan Sebangau.



Pembangunan DAM yang merupakan kegiatan *rewetting* di kawasan gambut.



ADAPTASI & KETANGGUHAN

ICCTF mendanai 11 proyek yang berkaitan tentang adaptasi dan ketangguhan melalui pendanaan USAID. Proyek-proyek ini terdistribusi di 2 proyek di Nusa Tenggara Timur, 2 proyek di Nusa Tenggara Barat, 1 proyek di Jawa Barat, satu proyek di Jawa Tengah, 1 proyek di Jogjakarta, 1 proyek di Sulawesi Selatan, 1 proyek di Gorontalo, 1 proyek di Maluku dan 1 proyek di sepanjang pesisir selatan laut Jawa.

Pada fokus area ini, model proyeksi atas perubahan iklim selama 30 tahun di NTT dan Subang, Jawa Barat dikembangkan. Kerawanan atas dampak perubahan iklim bagi masyarakat sepanjang pesisir laut Jawa, Subang, Gorontalo dan Rote Ndao dipetakan. Proyeksi atas perubahan iklim dan pemetaan kerawanan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat tentang cara beradaptasi atas dampak perubahan iklim. Begitu juga dengan nelayan di sepanjang pesisir Selatan Laut Jawa harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan iklim. Petani bisa beradaptasi dengan perubahan iklim melalui metode pertanian SRI, yaitu cara bertanam yang bisa menghemat air dan beradaptasi atas perubahan iklim.

Sebagai capaian, inisiatif yang didanai oleh ICCTF bersama mitranya telah menanam 2.000 pohon, membangun 200 sumur resapan, dan 100 tangki penampungan air. Inisiatif di fokus area ini telah melibatkan 81 desa dan memberikan manfaat langsung kepada 3.225 petani dan 140 nelayan. Inisiatif-inisiatif ini masih berjalan. Pada halaman berikut disampaikan penjelasan tiap-tiap proyek.





Adaptasi & Ketangguhan



Adaptasi &
Ketangguhan

PROGRAM USAID

batch
1

Sebanyak 7 proyek proposal adaptasi dan ketangguhan melalui pendanaan USAID tahap pertama yang dilaksanakan oleh: Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yayasan Transformasi Kebijakan Publik Indonesia (YTKPI), YAKKUM Emergency Unit (YEU), Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan IPA Institut Pertanian Bogor (Geomet FMIPA IPB), Pusat Perubahan Iklim ITB, dan Pusat Kajian Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

1

Mitra Pelaksana **Yayasan Lingkungan Hidup Seloliman (YLHS)**

Judul Program

Konservasi Sumber Mata Air Blok Utara Lereng Pegunungan Dieng Kabupaten Batang sebagai Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.



Anggaran

Rp 1.000.000.000



Periode Pelaksanaan

15 bulan
(April 2016 – Juni 2017)



Lokasi

Kabupaten Batang,
Jawa Tengah

Latar belakang

Sebuah program adaptasi yang diusahakan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat dan untuk membantu persediaan air PDAM Batang melalui sumber air Bismo yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan di 2 desa yaitu Desa Bismo dan Desa Keteleng. Peningkatan peresapan air penting dilakukan dengan memperbanyak sumur resapan dan memperbaiki area tutupan lahan, selain itu juga berpengaruh pada peningkatan stok karbon.

Tujuan

Menjaga kestabilan debit mata air Bismo dan sekitarnya, melestarikan serta mengembalikan fungsi daerah imbuhan sebagai daerah resapan air melalui upaya adaptasi dan mitigasi yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan.



Kemajuan yang telah dicapai

1. Telah dilakukan kajian lokasi program. Pada kondisi normal, produksi air PDAM sekitar 240 l/det dari mata air Bismo untuk penduduk Kabupaten Batang. Penurunan debit sumber air Bismo mencapai 20-30%.
2. Telah dilakukan pelatihan penentuan titik lokasi sumur resapan dan telah di tentukan 200 titik yang telah disetujui oleh pemilik lahan dan KSM.
3. Terbangunnya 200 unit Sumur Resapan di daerah imbuhan mata air Bismo yaitu di Desa Bismo dan Desa Keteleng, yaitu masing-masing desa sebanyak 100 sumur resapan.
4. Tumbuhnya 2.000 pohon di Desa Keteleng dan Bismo untuk mendukung konservasi sumber mata air setempat di bawah pengelolaan KSM Bismo Sejahtera dan KSM Tirta Kamulian.
5. Peraturan Desa Tata Kelola Lingkungan desa Keteleng telah dibuat dan disosialisasikan dengan didampingi KLHS, BLH dan Biro Hukum Pemkab Batang yang secara tidak langsung membantu manajemen perawatan dan pemanfaatan pohon dan sumur resapan. Perdes telah ditandatangani oleh kepala desa dan telah disosialisasikan kepada masyarakat pada 8 Agustus 2016 di Desa Keteleng.
6. Telah terbentuk KSM yang demokratis mewakili unsur masyarakat dan aparat desa.
7. Dokumen kerjasama terkait perlindungan sumber MA Bismo telah ditandatangani para pihak meliputi Dinas Lingkungan Hidup, PDAM, KSM dan Kepala Desa Keteleng.
8. Forum antar *stakeholder* perlindungan MA Bismo yakni "Forum Komunikasi Sendang Kemuliaan" telah terbentuk pada 31 Maret 2017.



Sumur resapan.



Situasi kawasan desa yang diintervensi.

2

Mitra Pelaksana Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada

Judul Program

Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Budidaya Padi SRI (*System of Rice Intensification*) terhadap Perubahan Iklim Regional dengan Pendekatan Model Integrasi Iklim-Tanaman-Tanah-Air di Nusa Tenggara Timur.



Anggaran

Rp 1.000.000.000



Periode Pelaksanaan

24 bulan (April 2016 - Maret 2018)



Lokasi

Nusa Tenggara Timur

Latar belakang

Pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim yang mengakibatkan musim kemarau lebih panjang di Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu berupa pengenalan dan penelitian penerapan metode penanaman padi yang adaptif (memanfaatkan keterbatasan tersedianya air untuk menghasilkan produksi yang tinggi) yaitu SRI (*System Rice Intensification*), dan menjadi bahan acuan perencanaan produksi beras NTT yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Tujuan

1. Proyeksi iklim di masa mendatang dan investigasi hubungan antara produktivitas pertanian dan indeks iklim global yang diwakili oleh *Southern Oscillation Indeks*/Indeks Osilasi Selatan (SOI) dan *Sea Surface Temperature*/Suhu Permukaan Laut (SST).
2. Dikembangkan model optimasi yang sesuai dalam penanaman padi *System of Rice Intensification* (SRI) yang memiliki potensi dikembangkan dengan produktivitas yang tinggi. Model optimasi tersebut meliputi iklim, air, manajemen pemupukan yang sesuai dengan pertumbuhan tanaman.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Finalisasi kajian pengaruh indeks iklim global (SOI dan SST) terhadap produksi pertanian di NTT untuk membantu ketangguhan pertanian setempat.
 - a. Pengenalan kegiatan cek lokasi dan sosialisasi tentang Proyeksi Iklim dan Strategi Adaptasi Budidaya Padi SRI (*System of Rice Intensification*) terhadap Perubahan Iklim Regional dengan pendekatan model integrasi iklim-tanaman-tanah-air di Nusa Tenggara Timur ke PEMDA dan ke petani.
 - b. Telah ditetapkan lokasi demplot di Desa Baumata dan Kelurahan Tarus dan benih padi sudah ditanam di 2 lokasi demplot tersebut dengan penerapan metode SRI.
 - c. Sudah dipasang alat telemetri untuk membantu memonitor kondisi iklim dan tanaman secara *real time*, serta sedang dilakukan pengembangan *dashboard* pengelolaan data.
 - d. Dokumen proyeksi iklim 30 tahun ke depan sudah selesai disusun namun tanpa menggunakan *modelling* dan skenario iklim.
2. Peningkatan produktivitas lahan (ton/ha) dengan metode SRI.
 - a. Sedang dilakukan pengumpulan data sekunder yang berhubungan dengan sosial ekonomi di dua desa target. Panen pertama dengan metode SRI hasilnya bagus.
 - b. Terhitung akhir Desember 2016, panen demplot padi SRI telah tercapai dengan peningkatan 20% dibanding cara konvensional.
 - c. *Pilot* implementasi teknologi SRI untuk pertanian padi kering di wilayah rentan masih berjalan. Pertanian telah 2 kali panen dengan hasil produksi melebihi hasil panen pertanian konvensional.
 - d. Penyusunan rekomendasi metodologi SRI yang adaptif untuk masukan RPJMD masih berjalan.



Padi SRI siap panen.



Telemetri.



Panen Raya padi SRI.



Alat pengukur curah hujan.



Padi SRI siap panen.

3

Mitra Pelaksana Yayasan Transformasi Kebijakan Publik Indonesia (YTKPI)



Judul Program

Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Daerah untuk Mengintegrasikan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Daerah.



Anggaran

Rp 1.000.000.000



Periode Pelaksanaan

14 bulan (April 2016 – Mei 2017)



Lokasi

Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, Gorontalo

Latar belakang

Pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait perubahan iklim yang dirancang dalam RPJMD. Hal ini mengingat ancaman bencana yang tertinggi di propinsi Gorontalo adalah banjir dan kekeringan, memiliki lahan kering yang terluas dengan indeks kekeringan tertinggi berada di kabupaten Gorontalo dan gagal panen mencapai 50%. Kabupaten Gorontalo termasuk 50 kabupaten terentan di Indonesia.

Tujuan

Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sasaran dalam menyusun strategi adaptasi perubahan iklim untuk jangka pendek dan menengah yang efektif dan efisien sesuai dengan kerentanan wilayahnya.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Adanya kompilasi data tentang kerentanan Kabupaten Gorontalo, kapasitas pemerintah daerah terkait serta inisiatif lokal berdasarkan hasil analisa yang pernah dibuat sebelumnya.
2. Pokja Iklim Kabupaten Gorontalo terbentuk dan sudah dikukuhkan dengan SK Bupati. Terbentuknya dan adanya rencana kerja dari kelompok kerja adaptasi perubahan iklim di daerah sasaran yang difasilitasi oleh Bappeda dan melibatkan para pemangku kepentingan serta didukung oleh pemimpin daerah.
3. Telah disusun metode analisa *Capacity Development Need* Kajian sebagai bahan analisa. Telah dilakukan kompilasi data kerentanan dan resiko melalui studi literatur dan tersusun dokumen: Pengembangan Kaji Cepat Kebencanaan Iklim (kerentanan, resiko dan pilihan adaptasi) di Kabupaten Gorontalo, sebagai acuan RPJMD.
4. Dokumen RPJMD tahun 2016-2021 Kabupaten Gorontalo telah disahkan. Bab Strategi dan Arah Kebijakan Rekomendasi Strategi Adaptasi Perubahan Iklim telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD tersebut.
5. Tahap perencanaan pembangunan Kabupaten Gorontalo berdasarkan Adaptasi Perubahan Iklim tahun 2017 diwujudkan melalui *Joint Plan* 2017 yang terdiri dari 24 kegiatan dalam RENJA dan RKA 2017. Kegiatan ini akan menelan biaya Rp 54 miliar dari APBD Kabupaten Gorontalo 2017 sekitar Rp 500 miliar. Inilah wujud komitmen Pemkab Gorontalo dalam menghadapi perubahan iklim.
6. Tersusun dan terdiseminasikannya Strategi API dan rencana advokasi kepada para pemangku kepentingan.



Analisa kerentanan.



Diskusi kebijakan adaptasi perubahan iklim.

4

Mitra Pelaksana
**YAKKUM Emergency Unit
(YEU)****Judul Program**

Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat yang Adaptif Iklim di Gunungkidul, Yogyakarta.

**Anggaran**

Rp 1.000.000.000

**Periode Pelaksanaan**

24 bulan (April 2016 – Maret 2018)

**Lokasi**

Kabupaten Gunungkidul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Latar belakang

Pentingnya pengembangan padi yang dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim di Gunungkidul, dan perbaikan wilayah tangkapan air karena masyarakat merasa terjadi penurunan hasil panen dan terjadinya kekeringan telaga di kecamatan Purwosari yang mengakibatkan penambahan biaya hidup untuk membeli air.

Tujuan

Terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan lestari, baik dalam aspek penyediaan, distribusi dan aksesibilitas melalui sistem pembangunan pertanian pangan yang tangguh terhadap keragaman dan perubahan iklim.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Kelompok Tani Hutan (KTH) Ngudi Rahayu Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul binaan YEU meraih juara I tingkat nasional dalam pelaksanaan praktek pertanian/ peternakan organik dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Sudah dilakukan survei dan analisis tingkat kerawanan pangan, kapasitas dan kerentanan desa terhadap bencana

dan dampak perubahan iklim. Terdapat 4 desa yang memiliki dokumen pemetaan risiko bencana dan perubahan iklim dan 4 desa memiliki dokumen rencana aksi masyarakat untuk ketahanan pangan adaptif iklim.

3. Telah disepakatinya rencana konservasi Telaga Makam dengan melibatkan masyarakat Dusun Temon yang melibatkan 8 RT. Sudah dilaksanakan konservasi telaga dengan menanam pohon konservasi dan pembangunan infrastruktur.
4. Pertanian adaptif iklim dimulai dengan adanya 2 desa meminjamkan tanah untuk kegiatan percontohan sawah organik dan pemuliaan benih padi. Pelatihan pembuatan pupuk organik dan pakan ternak organik (*silase*). Pasca pelatihan sampai dengan akhir September 2016 sudah ada 3 kelompok yang mempraktikkan pembuatan pupuk organik secara swadaya dengan sistem arisan. Hal menarik dari pelaksanaan kegiatan ini, masing-masing kelompok tani mau melakukan swadaya bahan dasar pupuk organik yang berupa kotoran ternak, seresah (daun kering) dan tenaga.
5. Sampai bulan Desember, demplot padi organik sudah tumbuh dengan baik. Salah satu demplot padi sudah berbuah. Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan pestisida organik dan aplikasinya.
6. *Monitoring* persiapan tanam pertanian organik adaptif iklim untuk di Kecamatan Purwosari dan Panggang.
7. *Monitoring* hasil pembuatan pupuk organik dan dan pestisida hayati di 8 desa di Kecamatan Panggang dan Purwosari.
8. Dokumen kajian terdiri dari 8 dokumen kajian. Empat dokumen kajian telah disampaikan ke ICCTF untuk 4 desa di Kecamatan Purwosari. Empat dokumen kajian untuk Kecamatan Panggang masih dalam proses penyusunan.
9. Adanya surat rekomendasi untuk replikasi dari Badan Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Panggang untuk 4 desa & MoU kerjasama antara YEU dengan BPP.



Masyarakat binaan YEU mendapat juara 1 nasional kelompok tani hutan.



Panen padi organik.



Trofi juara 1 kelompok tani hutan.

5

Mitra Pelaksana
**Departemen Geofisika dan
Metereologi, Fakultas Matematika dan
IPA, Institut Pertanian Bogor**

**Judul Program**

Strategi Manajemen Pertanian Iklim
Berdasarkan Penguatan Ketahanan
Masyarakat terhadap Perubahan Iklim.

**Anggaran**

Rp 995.000.000

**Periode Pelaksanaan**

18 bulan
(April 2016 – Oktober 2017)

**Lokasi**

Subang, Jawa Barat

Latar belakang

Kabupaten Subang merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Barat yang sering mengalami banjir dan kekeringan karena perubahan iklim. Untuk itu Kabupaten Subang perlu mengembangkan opsi adaptasi terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Tujuan

Mengembangkan alat pengambilan keputusan berbasis iklim untuk strategi manajemen pertanian dalam upaya penyusunan adaptasi perubahan iklim.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Telah tersusun Dokumen Profil dan Proyeksi Iklim Regional Wilayah Subang, Jawa Barat yang dibangun berdasarkan data curah hujan harian NASA MIROC5 dan CSIRO dengan resolusi 25 km peta dan data-data kejadian bencana terkait iklim dan iklim ekstrim, data proyeksi iklim dengan skenario Berdasarkan RCP 4.5, peta proyeksi curah hujan dan suhu berdasarkan data proyeksi iklim dengan skenario lain periode 2025–2035, pembahasan informasi proyeksi iklim, peta proyeksi curah hujan dan suhu Kabupaten Subang dan detail dari 5 kecamatan paling rentan, dan informasi proyeksi karakteristik iklim Kabupaten Subang

dan detail dari 5 kecamatan paling rentan.

2. Telah dilakukan pendampingan pembentukan TIM IKLIM Kabupaten Subang dengan tiga kali pertemuan, dan selanjutnya tim tersebut akan dikukuhkan dengan SK Bupati Subang. Tim ini dibentuk untuk membantu pengarusutamaan strategi adaptasi dalam kebijakan pemerintah dan masyarakat.
3. Model interelasi antara daerah iklim, karakteristik fisik, dan produksi pertanian; pembuatan peta karakteristik fisik (tutupan lahan, topografi, kemiringan), area produksi untuk komoditas utama pertanian, dan zona agroklimat untuk komoditas utama pertanian; peta tematik interelasi antara zonasi iklim, karakteristik fisik, dan produksi pertanian; serta panduan memanfaatkan zona agroklimat untuk rencana pembangunan pertanian saat ini dan masa depan.



Validasi lahan sawah.



Panen padi.



Rapat penyusunan tim iklim.

6

Mitra Pelaksana
**Pusat Perubahan Iklim,
Institut Teknologi Bandung**



Judul Program

Adaptasi Perikanan Tangkap terhadap Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Selatan Pulau Jawa Berbasis Kajian Risiko.



Anggaran

Rp 998.250.000



Periode Pelaksanaan

15 bulan
(April 2016 - Juni 2017)



Lokasi

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; Pangandaran dan Cilacap, Jawa Tengah; Banyuwangi, Jawa Timur

Latar belakang

Wilayah Penangkapan Perikanan (WPPRI) 573 yang membentang dari Pantai Selatan Jawa bagian Barat sampai Nusa Tenggara yang luas dan produktif akan terkena dampak perubahan iklim, oleh karenanya

diperlukan inovasi sistem tangkap yang dikembangkan dengan melibatkan masyarakat terutama di sentra penangkapan Jawa Barat (Kabupaten Sukabumi dan Pangandaran), Jawa Tengah (Cilacap) dan Jawa Timur (Banyuwangi).

Tujuan

Mengurangi risiko yang dialami oleh sektor perikanan tangkap Indonesia sebagai dampak dari perubahan iklim beserta sub-sektor turunannya terkait penghidupan masyarakat pesisir sehingga tangguh (*resilient*) terhadap dampak perubahan iklim.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Tersusunnya *draft* dokumen proyeksi iklim dan opsi-opsi adaptasi yang terkait dengan keterjangkauan sektor perikanan tangkap pada lokasi penangkapan ikan di laut (*fishing ground*) yang dinamis berdasarkan profil risiko perubahan iklim.
2. Telah dilakukan pengumpulan data

dan informasi melalui FGD, survei dan *workshop*. Data dan informasi mengenai basis sains, bahaya dan kerentanan telah diperoleh dari 4 lokasi pelabuhan (PPS Cilacap, PPN Pelabuhan Ratu, PPN Banyuwangi dan PPI Pangandaran).

3. Dikembangkannya strategi adaptasi perikanan lengkap berdasarkan kajian untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap yang tangguh terhadap perubahan iklim.
4. Tersusunnya dokumen profil risiko dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan tangkap di wilayah pesisir selatan pulau.
5. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim di sektor perikanan tangkap untuk pemerintah pusat dan daerah.
6. Tersusunnya rekomendasi teknis dan modul implementasi strategi penangkapan ikan yang tangguh terhadap perubahan iklim.



Nelayan kecil yang terdampak perubahan iklim.



Workshop 'Adaptasi Perikanan Tangkap terhadap Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Selatan Pulau Jawa Berbasis Kajian Risiko'.



Focus Group Discussion 'Adaptasi Perikanan Tangkap terhadap Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Selatan Pulau Jawa Berbasis Kajian Risiko'.

7

Mitra Pelaksana
**Pusat Kajian Antropologi
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
 Universitas Indonesia**

Judul Program

Establishment of Regional Networks for a Rural Response to Climate Change with Farmers, Scientists, and Extension.



Anggaran

Rp 1.000.000.000



Periode Pelaksanaan

24 bulan
(April 2016 – Maret 2018)



Lokasi

Indramayu, Jawa Barat;
Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat

Latar belakang

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengamati dan memahami perubahan cuaca secara ilmiah guna meningkatkan ketangguhan dan kemampuan petani dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim di Lombok Timur dan Indramayu. Pelatihan ToT terhadap petani maju di SFSSs (*Science Field Shops*)/Warung Ilmiah Lapangan (WIL) yang melibatkan penyuluh pertanian dan instansi terkait akan mempercepat penyerapan dan penyebarannya di lokasi target.

Tujuan

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan adaptasi petani-petani di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Lombok Timur, dan sejumlah kabupaten

yang lain di Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim serta mempertahankan ketangguhan ekosistem dan produksi tanaman pangan.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Menjadikan penyuluh pertanian (staf dari BP4K), penyuluh masyarakat mandiri, dan Kelompok Pengamat Cuaca Harian (KPCH) sebagai agen perubahan yang berada di masyarakat dalam rangka mendampingi petani untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.
2. Memfasilitasi peningkatan pembelajaran agrometeorologi di Indramayu dan Lombok Timur. Terdapat penambahan 120 petani di Indramayu dan Lombok Timur yang



Alat ukur curah hujan (omplong).



Panen padi.



- belajar dalam Warung Ilmiah Lapangan (WIL) melalui klub satelit.
3. Melaksanakan pelatihan untuk penyuluh dan petani pemandu di Indramayu dan Lombok Timur (dan kabupaten lain) serta pendampingan penyuluh dan pemandu.
 - a. Telah dilakukan 2 pelatihan ToT di Indramayu untuk pemandu utama KPCH.
 - b. Telah dilakukan 2 pelatihan ToT di Lombok Timur untuk petani pemandu dan penyuluh dari BP4K.
 4. Replikasi warung ilmiah lapangan melalui pembentukan klub-klub satelit di wilayah lain di dalam/luar Indramayu dan Lombok Timur.
 - a. Di Indramayu terbentuk satu klub satelit baru di Desa Pranggong.
 - b. Di Lombok Timur terbentuk 8 klub satelit baru di 3 kecamatan.
 - c. Pendampingan evaluasi panen WIL (Warung Ilmiah Lapangan).
 - d. Pertemuan Berugak.
 - e. Pengukuran curah hujan.
 - f. Eksperimen petani Pandanwangi.
 - g. *Workshop* WIL di Indramayu dan Lombok Timur.
 5. Pengintegrasian WIL dalam kebijakan pemerintah daerah.
 - a. Di Indramayu, lokakarya antara Puska UI, KPCH dan BKP3 dan dilanjutkan dengan ToT.
 - b. Di Lombok Timur, kerja sama dengan BP4K terwujud melalui kesepakatan pelaksanaan ToT yang melibatkan penyuluh Kab. Lombok Timur.
 6. Diseminasi hasil kegiatan aktivitas WIL didiseminasikan ke komunitas petani yang lebih luas, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait/berkepentingan.
 - a. 4 tulisan makalah konferensi internasional (2 telah dipresentasikan di London pada Mei 2016), 2 tulisan untuk kompendium internasional, 3 tulisan untuk *Inside Indonesia* dan satu tulisan untuk Jurnal ASEAS.
 - b. Satu liputan dalam majalah *Farming Matters*, liputan ToT di Lombok Timur oleh Corong Rakyat dan saluran televisi lokal.
 - c. Publikasi melalui website *science fieldshops* dan INSAM.



Standarisasi omplong.



Adaptasi &
Ketangguhan

PROGRAM USAID

batch

2

Sebanyak 4 proyek proposal adaptasi dan ketangguhan melalui pendanaan USAID tahap kedua yang dilaksanakan oleh: Perkumpulan Relawan CIS Timor, Yayasan Baileo Maluku, Yayasan FIELD (*Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy*), dan Yayasan Rumah Energi.

1

Mitra Pelaksana Perkumpulan Relawan CIS Timor



Judul Program

Ketahanan Pangan dan Air Menuju Masyarakat Tangguh Iklim
Kabupaten Rote Ndao.



Anggaran

Rp 1.000.000.000



Periode Pelaksanaan

16 bulan (Maret 2017 – Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Rote Ndao, NTT

Latar belakang

Beberapa pola pemberian air tanaman yang dilakukan masyarakat Rote Ndao dalam kaitannya dengan faktor pembatas berbasis lahan kering yaitu sebagian besar mengandalkan air tadah hujan untuk mengairi lahan pertaniannya. Menurunnya produktivitas pertanian dan gagal panen karena kesalahan pilihan tanaman akibat pergeseran musim hujan dan kemarau akibat dampak perubahan iklim.

Tujuan

Meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin melalui pengembangan pertanian hortikultura lahan kering yang ramah lingkungan serta perbaikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Pendampingan persiapan dan penanaman hortikultura untuk demplot budidaya pertanian hortikultura pada lahan seluas 6 ha.
2. Penyusunan dokumen kajian analisa kerentanan dan adaptasi perubahan iklim kabupaten, RAD-API Kabupaten Rote Ndao dan RADES-API di 3 desa dengan melibatkan para pemangku kepentingan kabupaten/desa:
 - Terlaksananya 1 kali sosialisasi program dengan Pemda Kab. Rote Ndao.
 - Terlaksananya 1 kali sosialisasi program dengan pemerintah desa dan para pemangku kepentingan.
3. *Baseline* dan *Endline survey* untuk diseminasi praktek baik API komunitas dan komitmen keberlanjutan program Pemerintah Daerah/Desa.



Diskusi penyusunan tim iklim.



Diskusi pemetaan kerentanan.

2

Mitra Pelaksana Yayasan Baileo Maluku



Judul Program

Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berbasis Rumah Tangga Rentan untuk Adaptasi dan Ketangguhan terhadap Dampak Perubahan Iklim.



Anggaran

Rp 1.000.000.000



Periode Pelaksanaan

16 bulan (Maret 2017 – Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku

Latar belakang

Musim Timur sejak bulan Mei - September dan Musim Barat pada bulan Desember - Februari menyebabkan terjadinya badai dan gelombang pasang disertai tingkat curah hujan yang tinggi. Tahun 2014 sampai 2015 terjadi 2 kali banjir rob setiap tahun pada bulan April dan Desember dengan ketinggian mencapai \pm 50 cm dan menutupi wilayah kota hingga mencapai lebih dari 700 meter dari pesisir pantai. Hal ini, mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas pencaharian hidup dari masyarakat dan kesulitan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap hari. Dirasakan belum cukup intervensi serius untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan kelompok rentan.

Tujuan

Penduduk dan pemerintah di Desa Kabofin dan Desa Tasinwaha memiliki rencana serta strategi adaptasi dan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim yang terumuskan dalam rencana dan program pembangunan desa yang terintegrasi dalam pembangunan kabupaten.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Sosialisasi program di tingkat kabupaten.
2. Pra penilaian kerentanan di 2 kecamatan dan 7 desa di Kab. Kepulauan Aru untuk menyusun dokumen hasil kajian tentang kapasitas dan kerentanan terhadap perubahan iklim dan baseline pendapatan/ekonomi masyarakat di tiap desa.
3. FGD untuk penggalian gagasan tentang rencana strategi adaptasi dalam rangka Penyusunan rencana strategi adaptasi dan ketangguhan di 3 desa.
4. Pertemuan pembentukan dan perencanaan kegiatan 12 kelompok budidaya perikanan.
5. Pertemuan pembentukan 10 kelompok budidaya pertanian.



Kajian kerentanan bersama masyarakat.



Diskusi dengan warga.



Sosialisasi perubahan iklim.

3

Mitra Pelaksana
Yayasan FIELD
(Farmer Initiatives for Ecological
Livelihoods and Democracy)



Judul Program

Membangun Ketahanan Pangan dan Ekonomi Kelompok Rentan melalui Pertanian Berkelanjutan di Wilayah Rawan Kekeringan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.



Anggaran

Rp 1.000.000.000



Periode Pelaksanaan

16 bulan (Maret 2017 – Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan

Latar belakang

Semakin parahnya musim kemarau yang terlihat dari pengalaman pada tahun 2014 dan 2015 berturut-turut, yang menyebabkan lebih dari 1.000 ha lahan pertanian terancam kekeringan dan gagal panen. Hal ini diperparah dengan tidak berfungsinya Bendungan Tabo-tabo secara maksimal. Dari segi produksi padi, pemerintah Kabupaten Pangkep menyatakan bahwa produksi padi saat ini tidak mencapai target. - Jika hal ini terjadi terus menerus akan memperburuk keadaan dari segi produksi dan ketersediaan pangan masyarakat Pangkep.

Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi budidaya kelompok rentan (petani kecil & perempuan) sebagai strategi untuk adaptasi terhadap perubahan iklim lokal.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan pemerintah (informasi tentang: pangan, teknologi pertanian dan iklim).
3. Terjembatannya komunikasi para pihak (petani, pemerintah, swasta, LSM) terkait pangan dan adaptasi perubahan iklim.

Kemajuan yang telah dicapai

1. Pelatihan kapasitas petani dalam adaptasi perubahan iklim:
 - Sekolah Lapang (SL) Adaptasi Iklim: 2 kali produksi pupuk dan pestisida organik.
 - Sekolah Lapang (SL) Pekarangan dan Tambak.
2. Lahan model penerapan pertanian tangguh terhadap perubahan iklim: produksi hortikultura organik.
3. Sekolah Lapangan Pekarangan telah dilaksanakan di 3 desa yaitu Desa Kanaungan, Desa Bara Batu, dan Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dengan total peserta sebanyak 77 orang, dan sudah berjalan hingga 7 pertemuan.



Sekolah lapang tambak.



Sekolah lapang pekarangan.



Ibu-ibu kelompok tani di sekolah lapang.

4

Mitra Pelaksana Yayasan Rumah Energi



Judul Program

Adaptasi Perubahan Iklim dengan Penerapan *Bioslurry* di Lombok (ASA-Lombok).



Anggaran

Rp 1.000.000.000



Periode Pelaksanaan

16 bulan (Maret 2017 – Juni 2018)



Lokasi

Kabupaten Lombok Utara, NTB

Latar belakang dengan adanya dugaan “*anomaly*” sebagai akibat perubahan iklim yang terjadi pada curah hujan dan pergeseran musim kering ke kemarau, masyarakat desa Salut yang bergantung kepada pertanian akan menghadapi resiko gagal panen. Dengan resiko ini, masyarakat harus menemukan cara untuk meningkatkan daya sangga air, meningkatkan nutrisi dalam tanah agar produktivitas lebih baik dan menanam tanaman sela untuk memperkaya variasi produksi dan sebagai antisipasi kegagalan dalam musim tanam padi atau jagung.

Tujuan

1. Mengembangkan sistem pertanian dengan merehabilitasi lahan yang rendah unsur organisnya dan rendah daya sangga airnya, dengan menggunakan *bioslurry*.
2. Menyediakan akses air bersih yang berkelanjutan dengan pemanenan dan penyimpanan air hujan yang bisa terjangkau masyarakat, yang juga akan membantu masyarakat berjaya dengan lahan pertaniannya.
3. Mengembangkan kapasitas masyarakat sasaran dengan teknologi terapan, sistem pertanian dan teknik berkomunikasi yang efektif.
4. Meningkatkan pemakai *bioslurry* dan sarana pemanenan dan penyimpanan air hujan.

Kemajuan yang telah dicapai

Pembangunan bak air 100 unit (volume 10 -17 ton/unit) sudah selesai dilaksanakan melalui pemberdayaan pekerja atau tukang bangunan setempat (lokal).



Pembangunan bak penampungan air.



Ujicoba pompa air manual.



Tampungan *bioslurry*.



Bapak Niko, pendamping petani lokal di Desa Baumata, sedang mendemonstrasikan cara kerja alat telemetri untuk proyeksi iklim.



Isu perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan hidup, tetapi juga terkait pembangunan nasional secara menyeluruh yang membutuhkan kerja sama multi sektoral dan multi *stakeholders*. Pelibatan masyarakat luas untuk mengatasi isu perubahan iklim menjadi kunci seluruh inisiatif. Publikasi dan perluasan jangkauan komunikasi pembelajaran program menjadi kunci penting untuk memperkuat citra baik ICCTF yang sudah terbentuk dengan mempromosikan program-program unggulan penanganan perubahan iklim yang diinisiasi dan didukung oleh ICCTF, sekaligus mengkampanyekan pentingnya mendukung target pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penerapan kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.



Komunikasi & Penjangkauan

Media memegang peranan penting sebagai agen penyebaran informasi, mengarusutamakan inisiatif dan program penanggulangan perubahan iklim yang didukung pendanaannya oleh ICCTF kepada pemerintah daerah, komunitas, dan para pemangku kepentingan, serta mengedukasi publik tentang isu perubahan iklim dan peran ICCTF di dalamnya. Publikasi media secara lebih lanjut dapat mendorong pemerintah daerah, mitra dan para *stakeholders*

untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam mengarusutamakan perubahan iklim dan ikut mensukseskan program-program ICCTF yang diimplementasikan oleh para mitra pelaksana di daerah.

Untuk itu, ICCTF tidak hanya mendanai pelaksanaan proyek-proyek tetapi juga mendukung peningkatan kesadaran publik atas perubahan iklim melalui publikasi dan penjangkauan media. Sepanjang tahun 2017 sebanyak kurang lebih 221 kali dengan rincian pemberitaan sebanyak 70 kali di media cetak, 136 kali di media online, 10 kali liputan di televisi

seperti Metro TV, CNN, DAAI TV, TVRI, dan TV One, serta 5 kali liputan Radio (I-Radio dan RRI).

Selain itu pada tahun 2017 ICCTF juga menyelenggarakan kegiatan Kunjungan media dan *stakeholders* ke lokasi program ICCTF di Magelang, Yogyakarta, dan Kupang. Melalui kegiatan ini ICCTF memfasilitasi para jurnalis dari berbagai media untuk mendokumentasikan pembelajaran program yang berhasil dan menyebarkannya kepada publik melalui berbagai bentuk keluaran liputan. ICCTF, juga memproduksi video profil dan foto-foto kegiatan. Selain menyelenggarakan dan partisipasi kegiatan di dalam negeri, ICCTF juga ikut dalam forum-forum perubahan iklim Internasional.



1

Keikutsertaan dalam UNFCCC COP 23

UNFCCC COP 23 diadakan pada tanggal 6-17 November 2017 di Bonn, Jerman. Partisipasi Bappenas dan perwakilan ICCTF di UNFCCC - COP 23 bertujuan untuk menyebarkan kebijakan Rencana Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia dan untuk meningkatkan dukungan internasional terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan National Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) melalui pengelolaan dana perubahan iklim dari *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF).

United Nations Framework Convention on Climate Change – Conference of the

Parties (UNFCCC – COP) merupakan salah satu agenda penting negara-negara di dunia yang fokus terhadap persoalan perubahan iklim. Forum yang pada tahun 2017 ini digelar di Bonn, Jerman pada 6 - 17 November 2017, menekankan kembali komitmen negara pihak UNFCCC dalam menghadapi isu perubahan iklim. Berbagai rangkaian persidangan dalam ajang UNFCCC-COP 23 telah menghasilkan serangkaian keputusan dan kesimpulan penting terkait isu perubahan iklim. Pertemuan ini juga bertujuan mendorong kemajuan implementasi *Paris Agreement* yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia.

Pada tahun ini, Fiji, sebagai salah satu negara kepulauan kecil yang paling berisiko dari kenaikan permukaan air laut dan badai ekstrem, ditunjuk sebagai negara penyelenggara COP ke 23. Meskipun karena alasan praktis, COP 23 diselenggarakan di Bonn, Jerman.

Beberapa rangkaian persidangan UNFCCC COP-23, CMP-13, CMA-1.2, SBI-47, SBSTA-47, APA-1.4 pada tanggal 6 - 17 November 2017 menghasilkan serangkaian keputusan dan kesimpulan penting terkait isu perubahan iklim. Utamanya, forum negosiasi global ini juga menghasilkan kesepakatan tentang teks untuk



menyusun modalitas, prosedur dan panduan operasionalisasi *Paris Agreement* yang cukup maju tertuang di dalam *decisions* COP 23 (Dec. 1/CP.23) "*Fiji Momentum for Implementation*" yang terdiri dari finalisasi *Paris Agreement Work Programme*, mandat dan fitur *Talanoa Dialogue* yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, serta implementasi dan ambisi pre-2020.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan perubahan iklim tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan kebijakan "Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)". Kebijakan ini disusun untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam. Pembangunan Rendah Karbon mendukung pencapaian tujuan ke-13 Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yakni tentang *Climate Action*.

Upaya tersebut juga sejalan dengan artikel 3.4 UNFCCC yang menyatakan secara tegas bahwa kebijakan perubahan iklim harus terintegrasi dengan program pembangunan nasional. Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran strategis dalam memastikan pengarusutamaan isu perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Untuk mendukung implementasi PPRK tersebut, Pemerintah membentuk tiga sekretariat untuk pengarusutamaan perubahan iklim dalam rencana pembangunan maupun pendanaan, yaitu Sekretariat Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Sekretariat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF).

Pada tahun 2017, Kementerian PPN/Bappenas didukung Sekretariat ICCTF, RAN-GRK, RAN-API, serta mitra pembangunan (GIZ INFIS, DANIDA, ICRAF) berpartisipasi aktif dalam

memperjuangkan misi dan kepentingan nasional melalui jalur negosiasi dan jalur penjangkauan (*outreach/campaign*), di antaranya melalui penyelenggaraan *side event*, *parallel event* dan partisipasi di Paviliun Indonesia. Keikutsertaan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dalam UNFCCC COP 23 ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan dan inisiatif *Low Carbon Development Plan/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)* di Indonesia serta menggalang dukungan internasional untuk implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) melalui pengelolaan pendanaan perubahan iklim oleh *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF).

Pada kesempatan ini Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat ICCTF, RAN-GRK dan RAN-API serta mitra pembangunan (GIZ dan ICRAF) telah menyelenggarakan event dengan tema "*Low Carbon Development Plan*" di Indonesia Paviliun pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 dan *Parallel Event* dengan tema "*Mobilizing Domestic & International Resources to Support Indonesia's Low Carbon*





Development Plan" di Grand Event Room, Hotel Grand Kameha Bonn pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017.

Selain itu, Delegasi RI dari Kementerian PPN/ Bappenas yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas juga berpartisipasi aktif dalam berbagai macam kegiatan *side event*, *parallel event* dan paviliun yang diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Nasional, Mitra Pembangunan (Bilateral/Multilateral), Sektor Swasta dan NGO/CSO Internasional. Termasuk diantaranya adalah beberapa pertemuan high level yang membahas kerja sama untuk pendanaan perubahan iklim serta pemaparan pembelajaran implementasi program perubahan iklim di lapangan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas juga turut menghadiri dan menyampaikan sambutan dalam beberapa pertemuan strategis untuk menyebarluaskan implementasi kebijakan dan inisiatif *Low Carbon Development Plan/Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon* (PPRK) yang telah dilaksanakan di Indonesia serta menggalang dukungan internasional untuk pelaksanaan RAN-

GRK dan RAN-API melalui ICCTF yang direspon secara baik dan positif oleh para mitra pembangunan, sektor swasta maupun NGO/CSO Internasional. Para pihak tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungannya atas kebijakan ini serta akan memberikan bantuan secara teknis maupun pendanaan untuk pengembangan insiatif ini kedepannya. Hasil yang diperoleh dari partisipasi Kementerian PPN/ Bappenas dalam UNFCCC COP 23 ini antara lain adalah mendapatkan masukan bagi pengembangan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Untuk kebijakan mitigasi, pembelajaran yang diperoleh antara lain tentang penyusunan payung hukum, potensi pendanaan, sistem kelembagaan, pengembangan teknologi, dan publikasi penanganan perubahan iklim. Sedangkan untuk adaptasi, pembelajaran yang diperoleh antara lain integrasi isu adaptasi dengan SDG's dan Kebencanaan, pengarusutamaan *gender, goal & indicator*, peranan sektor swasta, serta penguatan aksi ditingkat tapak. Selain itu, hasil proses perundingan UNFCCC COP 23 juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan terkait implementasi NDC dan *Paris Agreement pre-2020*.

Selain masukan kebijakan, partisipasi dalam UNFCCC COP 23 ini juga memberikan dampak yang

signifikan bagi identifikasi pendanaan penanganan perubahan iklim di Indonesia. ICCTF sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk mengelola pendanaan perubahan iklim di Indonesia mendapatkan kesempatan yang berharga untuk memperkenalkan portofolio program-program yang telah berhasil dilaksanakan selama tahun 2010-2017 serta mempromosikan rencana program-program unggulan kedepannya (*concept note proposal*) kepada para mitra pembangunan yang potensial secara langsung. ICCTF juga berkesempatan untuk meningkatkan *networking* dan potensi kerjasama dengan para Ahli dan NGO/CSO Internasional untuk mengembangkan berbagai kajian, model dan program tentang perubahan iklim di Indonesia yang dikaitkan dengan ekonomi, sosial dan parameter lainnya. Selain itu, juga dibangun *networking* dengan para mitra pembangunan dan pihak swasta yang diharapkan dapat memberikan dukungan pendanaan dan menjalin kerjasama dalam implementasi program – program penanganan perubahan iklim.

Potensi pendanaan yang berhasil diidentifikasi antara lain dari pihak BMUB-Jerman yang mencapai 35 – 45 juta Euro untuk bidang Perubahan Iklim, Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia yang diharapkan dapat diakses berbagai pihak di Indonesia yang salah satunya oleh ICCTF. Pemerintah Jepang juga turut menyampaikan komitmennya untuk mendukung implementasi PPRK terutama bidang adaptasi. Selain itu, potensi investasi pihak swasta nasional (KADIN) dan internasional (KfW, dll) untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia juga menjadi perhatian untuk dapat dioptimalkan oleh ICCTF kedepannya.

Dengan hasil yang sangat baik dari keikutsertaan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas dalam UNFCCC COP 23 menjadi modal yang berharga bagi pengembangan kebijakan PPRK dan pendanaan perubahan iklim melalui ICCTF kedepannya. Untuk itu, hasil-hasil yang diperoleh tersebut akan dimaksimalkan dan ditindaklanjuti melalui berbagai rangkaian kegiatan sistematis dan terarah oleh Kementerian PPN/Bappenas dan ICCTF pada tahun 2018 untuk mewujudkan target pembangunan nasional yang rendah karbon dan mendukung target/komitmen penanganan perubahan iklim global.

2 Lokakarya Internasional Aliansi Penelitian Restorasi Gambut

Perwakilan MWA ICCTF berpartisipasi dalam “Lokakarya Internasional Aliansi Penelitian Restorasi Lahan Gambut” pada 10-14 Mei 2017 di Brisbane, Australia. Lokakarya ini diselenggarakan oleh Sekolah Ilmu Bumi dan Lingkungan dan Sekolah Ilmu Biologi di Universitas Queensland. Dalam lokakarya ini, Sekretaris MWA ICCTF menyampaikan presentasi dan masukan mengenai pembentukan lingkungan internasional restorasi gambut yang berpotensi menjadi mitra kolaborasi masa depan ICCTF.

3 Talkshow Inclusive Green Economic Growth 2017

ICCTF memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan kegiatan “*Inclusive Green Economic Growth*” yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kampus Dramaga. Kegiatan ini dilakukan dari tanggal 28 September sampai 1 Oktober 2017 untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan siswa bidang ilmu ekonomi dan manajemen berbasis pertanian. Pada tanggal 1 Oktober 2017, perwakilan ICCTF hadir sebagai salah satu narasumber yang memperkenalkan ICCTF dan perannya dalam pendanaan perubahan iklim nasional maupun internasional. *Talkshow* ini juga menghadirkan Endah Murniningtyas sebagai ahli SDG yang menyampaikan pentingnya ekonomi hijau di Indonesia.

nt Plan (Indonesia's - LCDP):
Implementation

Moderator
Mr. Ping Yawergana
Researcher, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Keynote Speaker

Japan's Support for Low Carbon Development through Mitigation

Adaptation Actions in Indonesia

H.E. Mr. Masaharu Nakagawa
Minister of Environment, Japan

Policy and Planning

Prof. Bambang Brodjonegoro
Minister of National Development

Legislative Outlook

Dr. Hestya Widya Yudhanegara
Vice Chairman of Commission

Indonesia

Strategic

Development in Indonesia

International Development

LUMENS

Dr. Sonya D.

World Agroforestry Centre

"Governance of

Hainan Luoyue

Research Institute for

Berlin

Bonn

ion COP 23

4

Kunjungan & Liputan Media ke Lokasi Program ICCTF

ICCTF menyelenggarakan Kunjungan dan Liputan Media ke Lokasi Program ICCTF sebanyak dua (2) kali sepanjang tahun 2017. Lokasi program ICCTF-SESAMI (Magelang) dan ICCTF-JAVLEC (Yogya) dipilih sebagai lokasi kunjungan media dan *stakeholder* yang pertama pada tanggal 7 - 8 Agustus 2017, dan lokasi program ICCTF-FTP UGM (Kupang) untuk kunjungan yang kedua pada 20 - 23 Oktober 2017. Total sebanyak 16 jurnalis media berpartisipasi dalam kegiatan kunjungan dan liputan media ke Kupang dan 7 jurnalis media pada kunjungan media yang pertama di Magelang-Yogya. Seluruh media yang ikut berpartisipasi menghasilkan keluaran berupa publikasi di media tier 1 nasional seperti Kompas, The Jakarta Post, koran Tempo, Metro TV News, CNN TV, TVRI, Mongabay, koran Sindo, Kompas.com, Republika, Bisnis Indonesia, ANTARA, Kompas TV, dan Media Indonesia.

Kegiatan kunjungan dan liputan media ke lokasi program ICCTF ini merupakan salah satu agenda penting dalam upaya mengarus-utamakan inisiatif dan pembelajaran program penanganan perubahan iklim yang didukung pendanaannya oleh ICCTF kepada pemerintah daerah, komunitas, mitra pembangunan, pemangku kepentingan lainnya, serta mengedukasi publik tentang isu perubahan iklim dan peran ICCTF di dalamnya. Publikasi media secara lebih lanjut dapat mendorong pemerintah daerah, mitra dan para *stakeholders* untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam mengarusutamakan perubahan iklim dan ikut mensukseskan program-program ICCTF yang diimplementasikan oleh para mitra pelaksana di daerah.



5

Media Gathering ICCTF 2017

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi ICCTF untuk menjaga relasi dengan media dan menjaga media tetap terupdate tentang kegiatan dan program ICCTF yang sedang berjalan. Kegiatan ini dikemas secara informal, dengan menitikberatkan konsep acara dalam bentuk bincang-bincang ringan dan menghibur. Tahun 2017, ICCTF menyelenggarakan *media gathering* bersama *Vanantara Communication*,

di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 8 Desember 2017 dengan mengusung tema: "Perubahan Iklim Jaman Now: Menyelaraskan Pembangunan Ekonomi dengan Keberlanjutan Lingkungan". Pada kesempatan ini, ICCTF menghadirkan narasumber Direktur Lingkungan Hidup Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF, Direktur Eksekutif ICCTF, Team Leader PMU Proyek USAID dan UKCCU. Selain itu ICCTF turut

6 Kunjungan ke Redaksi Media Kompas

Sebagai bagian dari upaya membangun dan memperkuat hubungan baik ICCTF dengan media, dan memperkenalkan profil ICCTF dan visi misi lembaga ICCTF ke media *mainstream* nasional, Harian KOMPAS. Dalam kesempatan tersebut Direktur Eksekutif ICCTF memperkenalkan program dan upaya-upaya yang telah dilakukan ICCTF serta komitmen ICCTF dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. Redaksi KOMPAS menyampaikan bahwa isu perubahan iklim adalah sesuatu yang

sulit untuk dipahami sehingga penting membahasakan fenomena perubahan iklim dengan sederhana dan mudah dimengerti. Penyajian informasi program-program yang sukses dan dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat merupakan salah satu cara yang mudah untuk menyampaikan ke khalayak, dan media akan membantu proses diseminasi informasi tersebut. Tujuannya agar masyarakat luas dapat memahami konsep perubahan iklim secara mudah dan ikut berpartisipasi aktif di dalamnya.



mengundang pemuda pegiat lingkungan dari Bali untuk membagi pengalaman dan perspektif pemuda tentang perubahan iklim dan kontribusi dalam bentuk aksi nyata di kehidupan sehari-hari.



7 Radio Talkshow ICCTF di I-Radio

Radio Talkshow merupakan salah satu kegiatan komunikasi ICCTF yang bertujuan untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat luas tentang peran ICCTF dalam mendukung kebijakan pemerintah tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) dan kontribusi ICCTF dalam menangani dampak perubahan iklim di Indonesia. *Talkshow* ini dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu pada 26 September 2017 dengan mengusung tema “Peran ICCTF dalam Upaya Perubahan Iklim Indonesia” serta 24 Oktober 2017 bertema “Peran ICCTF dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Rendah Karbon”. ICCTF memperkenalkan kepada publik narasumber utama dalam *talkshow* tersebut yaitu Direktur Lingkungan Hidup Bappenas selaku Sekretaris MWA ICCTF dan Direktur Eksekutif ICCTF. Selain memaparkan tentang kebijakan pembangunan rendah karbon, narasumber juga menyampaikan program-program ICCTF yang telah dilakukan dalam upaya mendukung kebijakan terkait perubahan iklim di Indonesia yang fokus ke tiga ranah utama yaitu mitigasi berbasis lahan, energi, serta adaptasi dan ketangguhan iklim.



8 Sosialisasi dan Ekspose Program ICCTF ke Bappeda & Stakeholders Terkait

ICCTF perlu merancang keberlanjutan program-program yang telah diimplementasikan dengan menggandeng pemerintah daerah, Bappeda, dinas terkait di daerah serta seluruh elemen sosial kemasyarakatan untuk ikut serta memelihara dan mengelola program agar terjaga keberlanjutannya. Dalam rangka menjaga keberlanjutan program dan mengarusutamakan program-program ICCTF ke dalam kebijakan daerah, maka tim komunikasi dan PMU ICCTF menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan ekspose program ICCTF ke Bappeda dan *Stakeholder* terkait di tingkat provinsi. Tahun 2017, ICCTF menyelenggarakan sosialisasi dan ekspose program di tiga provinsi yaitu Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kegiatan ini akan dilanjutkan pelaksanaannya di provinsi lainnya yang menjadi wilayah intervensi ICCTF pada tahun 2018 .

Integrasi saluran-saluran komunikasi ICCTF di media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram

Penerbitan *advertorial* ICCTF di koran Tempo

Penerbitan *opinion article* di Koran Tempo

Pembuatan materi komunikasi lembaga

Distribusi rilis kegiatan ICCTF

Monitoring media

Produksi *merchandise* ICCTF

Produksi *Marketing kit*, *company profile* ICCTF, buku Panduan Adaptangguh, serta *factsheet* program

PENYUSUNAN & PENYEBARAN MATERI KOMUNIKASI LEMBAGA

DUKUNGAN DALAM KEGIATAN-KEGIATAN KOMUNIKASI & PENJANGKAUAN

▶ **Launching Pergub Jambi**

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU) mendorong inisiasi penyusunan rencana aksi pencegahan & penanggulangan kebakaran hutan dan lahan gambut dengan terlibat secara aktif dalam proses penyusunan hingga peresmian Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi No.31 Tahun 2016. ICCTF dan UKCCU membina kerja sama dalam kerangka "Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia melalui Kegiatan Lokal" dengan nilai pendanaan sebesar £ 3.000.000,00 (Tiga Juta Poundsterling) dengan target program di lima (5) lokasi prioritas yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.



▶ **Launching PEP Online dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon oleh Sekretariat RAN-GRK dan Kementerian PPN/Bappenas**



ICCTF mendukung terlaksananya kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon yang dirumuskan oleh Kementerian PPN/Bappenas, salah satunya dengan ikut berkontribusi dalam kegiatan "Launching PEP Online dan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon" yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2017 di Bappenas. ICCTF membantu proses pembuatan rilis berita, distribusi kepada media, dan penyelenggaraan konferensi pers *Launching Kebijakan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia*, bekerja sama dengan Biro Humas Bappenas dan *Vanantara Communication*. Berdasarkan hasil *monitoring*, seluruh pemberitaan media yang dihasilkan memiliki perspektif positif.

▶ **Launching Aksi Kerja Bersama Restorasi Gambut**

ICCTF bersama dengan BRG mengundang media lokal dan nasional untuk datang dan meliput hasil implementasi program yang didukung pendanaannya oleh ICCTF-UKCCU di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan menghadirkan narasumber-narasumber nasional Kepala BRG, Duta Besar Norwegia, Perwakilan Kedutaan Inggris, Anggota DPR Komite IV, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, serta Manajer Program P2KLH Universitas Palangkaraya.



Sebagai tambahan, ICCTF berbagi proses pembelajaran dan pengalaman pada jangkauan yang lebih luas melalui diskusi, *workshop* dan konferensi. ICCTF berbagi pengalaman selama diskusi "*Stern Review on the Economist of Climate Change*" pada bulan Oktober 2017. ICCTF berbagi pengalamannya tentang mekanisme pendanaan yang berkelanjutan ketika pengembangan strategi Karbon Biru Indonesia pada bulan November 2017. Inisiatif Karbon Biru Indonesia adalah sebuah inisiatif yang di koordinasikan oleh Bappenas sebagai upaya untuk mengarusutamakan isu-isu yang berkaitan dengan karbon biru ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

ICCTF berdiskusi dengan mahasiswa Universitas Indonesia ketika *talkshow* "*UI Youth Environmental Action 2017*" di kampus UI Depok. Mahasiswa dari Universitas Indonesia dan perwakilan mahasiswa dari 15 universitas di Indonesia berbagi pengalaman mereka berkaitan tentang isu perubahan iklim.

ICCTF melaksanakan sebuah *workshop* yang berkaitan tentang Energi terbarukan pada bulan Desember 2017.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menggunakan 23% energi terbarukan dari total energi yang digunakan pada tahun 2025 dan meminimalisir penggunaan energi fosil yang bersubsidi. GIZ *Green Chillers* mempresentasikan *Green Cooling Program* (IGCP). EnerBi an NGO berbagi pengalaman tentang pengembangan solar panel di Gunungkidul DIY. EnerBi menceriakan tentang bagaimana upaya konstruksi yang dimulai dengan diskusi bersama masyarakat paling sedikit satu tahun. Hal ini bisa meningkatkan rasa kepemilikan yang berpengaruh untuk pemeliharaan. GIZ GE LAMA mempresentasikan POME Bio Gas (*Palm Oil mill effluent*). PT PGI mempresentasikan proyek Biomass. PT PGI bekerja bersama masyarakat di Pulau Mendol Kepulauan Riau untuk membangun *on grid biomass* energi, 900 kW. IDEAS *Consultant* berbagi pengalaman mereka tentang pellet kayu. Kadin bercerita tentang proyek solar panel. Secara umum, *workshop* tentang energi terbarukan ini menggambarkan bahwa energi terbarukan merupakan masa depan energi Indonesia, namun masih membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat.



Kinerja Organisasi

Administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai satu-satunya Lembaga Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia yang merupakan instrumen yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia untuk mencapai target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam RAN/RAD-GRK dan RAN API, ICCTF berusaha terus memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tantangan dan kesempatan yang lebih besar yaitu dengan membuat Sistem tatakelola SDM yang kuat dan terarah. Sistem tatakelola SDM yang kuat ini untuk menjamin proses SDM yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh ICCTF adalah melakukan studi/kajian analisa beban kerja (ABK). Analisa beban kerja (ABK) digunakan untuk mendeteksi, memonitor, mengevaluasi serta untuk mengetahui secara lebih objektif jumlah kebutuhan pegawai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan/unit, prestasi kerja jabatan/unit. Dengan mengimplementasikan kegunaan hasil kajian analisis beban kerja maka diharapkan organisasi akan dapat memperoleh tingkat efisiensi yang lebih baik/tinggi dari para pegawai/karyawan, yang pada gilirannya diharapkan akan mampu meningkatkan tingkat produktivitas organisasi/perusahaan.

Selain daripada itu ICCTF juga memberikan perhatian khusus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Beberapa bentuk peningkatan kapasitas staf yang telah dilaksanakan tahun 2017, diantaranya adalah:

1. **Training IPSAS untuk Staf Keuangan ICCTF**

Hasil 8 staf Keuangan ICCTF sudah mempunyai sertifikasi IPSAS *online* kajian dengan nilai yang memuaskan.

2. **Training Keahlian Sesuai Bidang Keahlian**

ICCTF memberikan kesempatan kepada setiap staf untuk mengajukan usulan untuk mengikuti training keahlian bagi bidang masing-masing staf dalam rangka untuk meningkatkan keahlian di bidang masing-masing staf. Salah satu training keahlian yang telah dilakukan adalah *training* pengadaan barang dan jasa oleh Staf Pengadaan ICCTF dan telah berhasil mendapatkan sertifikat pengadaan.

3. **Capacity Building Staff**

ICCTF mengagendakan *capacity Building* untuk staf 2 (dua) kali dalam setahun dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Tujuan dari *Capacity Building* ini adalah meningkatkan keterampilan dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat didasarkan pada kecakapan dalam mengidentifikasi pokok permasalahan serta meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan dan pemberdayaan yang disesuaikan dengan situasi. Pada tahun 2017 ini, ICCTF mengadakan *Capacity Building 2* (dua) kali yaitu di Sumatera Barat dan Jawa Timur.

Sementara itu, untuk meningkatkan kenyamanan bekerja para staf ICCTF dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana bekerja secara rutin seperti pemeliharaan alat-alat komputer, pemeliharaan email server secara berkala, serta pemeliharaan kantor rutin.

Management Information System

Tahun 2017 ini ICCTF sudah aktif menggunakan *Enterprise Resources Planning* (ERP) berbasis *Oracle Database*. ERP ini berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multi modul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi dalam ICCTF, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan laporan serta informasi yang lebih akurat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Sistem ERP yang diterapkan di sekretariat ICCTF mengintegrasikan 3 buah modul yakni :

1. **Oracle Financials** (*General Ledger, Account Receivable, Account Payables, Fixed Asset dan Cash Management*)
2. **Oracle Purchasing** (*Supplier Management, Pembelian*)
3. **Oracle Grant Accounting** (*Project Planning*)

Dengan mengintegrasikan 3 buah modul tersebut diatas, maka semua data administrasi keuangan, sumber daya manusia, aset dan kegiatan yang dilakukan oleh ICCTF dalam mengelola 42 Mitra Pelaksana Hibah sudah diintegrasikan ke dalam sistem ERP ICCTF untuk dikonsolidasi dan untuk mendapatkan integrasi serta akurasi data yang lebih baik.

Rencana ke Depan

Sesuai arahan Menteri PPN/Bappenas, ICCTF diharapkan dapat berperan aktif dalam penyaluran dana bagi sektor energi terbarukan. Bidang ini sangat memerlukan perhatian terutama di daerah-daerah kepulauan yang terpencil. Beberapa skema pendanaan untuk bidang ini telah mulai dibahas pada pertemuan COP 23 yang lalu di Bonn, Jerman.

Memperhatikan kepentingan Indonesia di kancah dunia dalam hal pendanaan perubahan iklim, maka berbagai kesempatan yang ada seharusnya menjadi sasaran ICCTF ke depan. Bidang kemaritiman adalah salah satu modal ICCTF dalam mengantisipasi pendanaan perubahan iklim di Indonesia. *Blue carbon* adalah salah satu ekosistem yang memiliki kemampuan tinggi untuk menyerap karbon. Indonesia mempunyai luas hutan mangrove dan padang lamun terluas di dunia. Kedua, ekosistem *blue carbon* ini menjadi modal ICCTF sebagai *pioneer* dalam bidang ini.

Beberapa kegiatan utama ICCTF di tahun 2018 sebagai berikut:

ICCTF 2018 Milestone

Kuartal 1 Jan-Mar

- Penutupan Proyek USAID *Batch 1*
- Pengelolaan Tambahan Pendanaan DANIDA dan UKCCU
- Perhitungan Emisi dan Karbon
- Amandemen *Bylaw* ICCTF
- Penyusunan SOP ICCTF
- Optimalisasi Sosial Media ICCTF

Kuartal 2 Apr-Jun

- Penutupan Proyek UKCCU (11 Mitra Pelaksana)
- *Call for Institution* Proyek Baru USAID dan UKCCU
- Validasi Penghitungan Emisi dan Karbon
- *Media Visit* USAID & UKCCU
- ICCTF *Days*

Kuartal 3 Jul-Sep

- Penutupan Proyek USAID *Batch 2*
- Pengembangan proposal baru untuk *fundraising* (GCF, GEF, NAMA *Facility*)
- *Progress New ICCTF (Institutional Arrangement)*

Kuartal 4 Okt-Des

- UNFCCC COP-24
- *Indonesia Low Carbon Development Initiative Conference* di Bali
- ICCTF *Annual Report* 2018
- ICCTF *Annual Work Plan* 2019
- Pendanaan Baru ICCTF (COREMAP, IBC-METRO, dll.)





Lampiran



Lampiran

Kompilasi Publikasi

DAFTAR PUBLIKASI LIPUTAN MEDIA TENTANG PROGRAM ICCTF 2017

Sepanjang tahun 2017, implementasi program-program yang didukung pendanaannya oleh ICCTF-UKCCU dalam kerangka program “Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut untuk Mengurangi Emisi di Indonesia melalui Kegiatan Lokal” di lima provinsi prioritas telah menunjukkan beberapa kemajuan yang berarti. Hasil-hasil kerja di lapangan tersebut, beberapa dipublikasikan oleh media massa lokal dan nasional, dengan menyoroti hasil dan kemajuan program masing-masing.

Demikian halnya dengan publikasi ICCTF yang didanai oleh USAID, menunjukkan peningkatan publikasi yang signifikan di tahun 2017. Pendekatan PR melalui publikasi media dinilai lebih efektif dalam mencapai target *audiens* dibandingkan dengan pendekatan melalui iklan di media. Penyadartahuan masyarakat melalui publikasi media menjadi saluran yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat dan dengan bahasa awam yang lebih sederhana.

Berikut adalah publikasi ICCTF di tahun 2017 yang berhasil di kliping oleh ICCTF:

No.	Media	Tipe Publikasi	Judul	Tanggal Terbit	Narasumber	Penulis
1.	Antara	Portal berita online	Dubes Inggris dijadwalkan <i>Launching</i> Perda Karhutla Jambi	12 Maret 2017	Ida Suryani, Kedutaan Inggris	
2.	Antara	Portal berita online	Moazzam: Pemerintah Inggris dukung Perda dan Pergub Karhutla	13 Maret 2017	H.E Moazzam Malik, Duta Besar Inggris untuk Indonesia	
3.	Tribunnews Jambi	Portal berita online dan cetak	Dubes Inggris untuk Indonesia: <i>Congratulate</i> Jambi	13 Maret 2017	H.E Moazzam Malik, Duta Besar Inggris untuk Indonesia	
4.	Suara Indonesia	Portal berita online	Dubes Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, Dukung Pergub Jambi	13 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> Zumi Zola, Gubernur Jambi H.E Moazzam Malik, Dubes Inggris untuk Indonesia 	
5.	Jambi Ekspres	Portal berita online	Dubes Inggris Sambangi Jambi Hari Ini, Ada Apa ya?	13 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> H.E Moazzam Malik, Dubes Inggris untuk Indonesia Amirzan, Kasubag Humas Setda Provinsi Jambi 	
6.	Kabarserasan.com	Portal berita online	Terbitkan Pergub Tentang Karhutla, Zola Dapat Dukungan Dubes Inggris	13 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> H.E Moazzam Malik, Dubes Inggris untuk Indonesia Zumi Zola, Gubernur Jambi Kolonel Inf. Refrizal, Dansatgas Karhutla Jambi 	
7.	Kompas	Koran	" <i>Bioslurry</i> " Efektif untuk Penyubur Tanaman.	8 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> Ines Septy Arsiningtyas, Petugas bidang konservasi Yayasan Sedyas Samahita Memetri Indonesia Purwanti, Petani Cabai Desa Keningar Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	
8.	Kompas	Koran	Pelestarian Alam Harus Sekaligus Menyejahterakan	9 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> Panji Anom, Manajer Program Javlec Darmiyanto Ketua Kelompok Tani dan Hutan Kemasyarakatan Ngudimakmur Drajat Eko Saputro, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Putat 	
9.	Kompas.com	Online	Meningkatkan Stok Karbon Tak Hanya Lewat Penanaman Hutan Saja	9 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> Panji Anom, Manajer Program Javlec Darmiyanto Ketua Kelompok Tani dan Hutan Kemasyarakatan Ngudimakmur Drajat Eko Saputro, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Putat 	
10.	Kompas.com	Online	Pakai " <i>Bioslurry</i> ", Panen Cabai Petani Ini Melimpah	8 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> Sukijo (46), Petani cabai di Dusun Banaran, Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Ines Septi Arsiningtyas, Program Officer Divisi Konservasi Sesami Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas 	
11.	Sindonews.com	Online	Menghijaukan Lahan Bekas Tambang Lereng Merapi	13 Agustus 2017		
12.	Sindo	Koran	Menghijaukan Lahan Bekas Tambang Lereng Merapi	13 Agustus 2017		

No.	Media	Tipe Publikasi	Judul	Tanggal Terbit	Narasumber	Penulis
13.	Tempo	Koran	Bertanam Sengon di Gunung Pasir	15 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> Ines Septy Asriningtyas, Program Officer Divisi Konservasi Sesami Sarpono, Warga Desa Keningar Sukijo, Ketua Kelompok Keningar Hijau 	Ahmad Rafiq
14.	Republika	Koran	Energi Terbarukan dari Kotoran Sapi	28 Agustus 2017	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Yayasan Sedya Samahita Memetri Indonesia Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas 	RR Laeny Sulistyawati
15.	Kompas	Koran	"Bioslurry", Si Pupuk "Ajaib"	4 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> Purwanto, Desa Keningar kec Dukun Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Gambir, Program Officer Divisi Konservasi Sesami Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas 	Larasati Ariandne Anwar
16.	Mongabay .com	Online	Memulihkan Lahan-lahan Bekas Tambang Pasir di Desa Sekitar Merapi	10 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> Ines Septi Arsiningtyas, Program Officer Sesami Purwanto, warga Keningar Sukijo, Ketua Kelompok Tani Keningar Hijau Agus Widodo, Kepala Sub Bidang 17.Litbang Pemsosbud, Bappeda Magelang 	Nuswantoro
17.	Mongabay .com	Online	Menabung Karbon, Merawat Hutan ala Petani Gunungkidul	14 September 2017	<ul style="list-style-type: none"> Darmiyanto, warga Kampung Dempul Panji Anom, Manajer Program Javlec Drajat Eko Saputro, Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Putat 	Nuswantoro
18.	Republika	Online	Budi Daya Sistem SRI Tingkatkan Produksi Padi di Kupang	21 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Bayu Dwi Apri Nugroho, Program Manager Project SRI ICCTF-FTP UGM Yohanes Tayruba, Kepala Dinas Pertanian NTT 	Christiyaningsih
19.	Republika	Online	Gubernur NTT: Budidaya Padi SRI Layak Direplikasi	21 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Frans Lebu Raya, Gubernur NTT Yanes Sain, Anggota Kelompok Petani Desa Tarus Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM 	Christiyaningsih
20.	Netral News	Online	Teknik Penanaman Padi dengan SRI, Hasilnya Mencengangkan	21 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Yanes Sain, Anggota Kelompok Petani Desa Tarus Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	Lince Eppang (dikutip dari Antara)
21.	Cendana News	Online	Pola Tanam Padi "SRI" Cocok Diterapkan di Kupang	21 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Yanes Sain, Anggota Kelompok Petani Desa Tarus Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	Koko Triarko (dikutip dari Antara)

No.	Media	Tipe Publikasi	Judul	Tanggal Terbit	Narasumber	Penulis
22.	Teras News	Online	Padi SRI Tingkatkan Hasil Panen Hingga 100 Persen	21 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Yanes Sain, Anggota Kelompok Petani Desa Tarus • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	Teras News
23.	Sindo News	Online	Panen Raya Padi SRI di Kupang Tengah	21 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bayu Dwi Apri Nugroho, Program Manager Project SRI ICCTF-FTP UGM • Yohanes Tayruba, Kepala Dinas Pertanian NTT • Franky Jan Saelan SE MP, Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang • Benjamin Naha, Kepala Bidang Operasi Pemeliharaan Daerah Irigasi Dinas PU Provinsi NTT • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian & Biosistem • Ir. Rohmat Supriadi, Kepala Biro Renortala Bappenas • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF • Yohanes Tay Ruba, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT 	Ali Masduki
24.	Media Indonesia	Online	SRI Tingkatkan Produksi Padi Sampai 100%	21 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	Palce Amalo
25.	Kaskus .co.id	Online	SRI Tingkatkan Produksi Padi Sampai 100%	21 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	OL-4 (dikutip dari Media Indonesia)
26.	Kompas .com	Online	Kekurangan Air Bukan Hambatan Bertani di NTT, Ini Rahasiannya	22 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Yanes Sain, Anggota Kelompok Petani Desa Tarus • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM • Bayu Dwi Apri Nugroho, Program Manager Project SRI ICCTF-FTP UGM • Ir. Rohmat Supriadi, Kepala Biro Renortala Bappenas 	Lutfy Marizal Putra
27.	Sindo News	Online	Tingkatkan Produktivitas Padi dengan Metode SRI	22 Oktober 2017	Nikodemus Nainiti, Penanggung jawab lapangan pengembangan padi dengan metode SRI dari Universitas Kristen Arta Wacana (UKAW) Kupang	Ali Masduki
28.	Republika	Cetak	Gubernur NTT: Budi Daya Padi SRI Layak Direplikasi	22 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Yanes Sain, Anggota Kelompok Petani Desa Tarus • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM 	Christiyaningsih
29.	Kompas.id	Online	Hasil Panen Meningkatkan Tanpa Perlu Banyak Air	22 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	Brigitta Isworo

No.	Media	Tipe Publikasi	Judul	Tanggal Terbit	Narasumber	Penulis
30.	Bisnis Indonesia	Online	Hadapi Perubahan Iklim, Sistem <i>Monitoring</i> Pertanian Padi Diuji Coba	22 Oktober 2017	Bayu Dwi Apri Nugroho, Program Manager Project SRI ICCTF-FTP UGM	Juli Etha Ramaida Manalu
31.	Antaranews	Online	Iklim NTT Cocok Kembangkan Padi SRI	22 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Dr Ir Leta Rafael Levis, Pengamat Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM 	Hironimus Bifel
32.	The Jakarta Post	Online	<i>Harvest Day</i>	23 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF • Bayu Dwi Apri Nugroho, Program Manager Project SRI ICCTF-FTP UGM 	Djemi Amnifu
33.	The Jakarta Post	Cetak	<i>Harvest Day</i>	23 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF • Bayu Dwi Apri Nugroho, Program Manager Project SRI ICCTF-FTP UGM 	Djemi Amnifu
34.	Tempo.co	Online	ICCTF dan UGM Kembangkan Bibit Padi SRI di Kupang	23 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ir. Rohmat Supriadi, Kepala Biro Renortala Bappenas • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT 	Yohanes Seo
35.	Lintas NTT	Online	Metode SRI Tingkatkan Produksi Padi Sampai 100%	23 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	Canra Liza (diambil dari Media Indonesia, Palce Amalo)
36.	Kompas	Cetak	UGM Kembangkan Sistem Telemetri untuk Pertanian	23 Oktober 2017	Chusnul Arif, Ilmuwan dari IPB	Brigitta Isworo
37.	Kompas.com	Online	Bisakah SRI Menggantikan Cara Bertani Orang Indonesia?	24 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bayu Dwi Apri Nugroho, Program Manager Project SRI ICCTF-FTP UGM • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM 	Lutfy Marizal Putra
38.	Koran Sindo	Cetak	Panen Raya Padi SRI	24 Oktober 2017	Bayu Dwi Apri Nugroho, Program Manager Project SRI ICCTF-FTP UGM	Ali Masduki
39.	Bisnis Indonesia	Cetak	Inovasi dari Timur	24 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Yanes Sain, Anggota Kelompok Petani Desa Tarus • Chusnul Arif, Ilmuwan dari IPB 	Juli Etha Ramaida Manalu
40.	Realita.co	Online	Gubernur NTT Minta Petani NTT Tingkatkan Metode SRI	24 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	(.bud)

No.	Media	Tipe Publikasi	Judul	Tanggal Terbit	Narasumber	Penulis
41.	Mongabay .co.id	Online	Adaptif Perubahan Iklim, Padi SRI Diperkenalkan Untuk Wilayah Bercurah Hujan Rendah	24 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM • Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF • Dr. Polce Nainiti, Dosen Universitas Kristen Arta Wacana 	Ebed De Rosary
42.	Bisnis Indonesia	Online	Teknologi dan Bendungan Bantu Kupang Hadapi Perubahan Iklim	25 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Nikodemus Nainiti, Penanggung jawab lapangan pengembangan padi dengan metode SRI dari Universitas Kristen Arta Wacana (UKAW) Kupang • Chusnul Arif, Ilmuwan dari IPB • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT 	Juli Etha Ramaida Manalu
43.	Cendana News	Online	Tanam Padi SRI Cocok di NTT	25 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Yohanes Tay Ruba, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT 	Ebed De Rosary
44.	Cendana News	Online	Tiga dari Target Tujuh Bendungan Sudah Dibangun di NTT	25 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Frans Lebu Raya, Gubernur NTT • Yonas Tanui, Warga di Kupang 	Ebed de Rosary
45.	Trubus.id	Online	Tekan Peredaran Emisi, Kementerian PPN/Bappenas Ciptakan Aplikasi Pemantau	25 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Agung
46.	Sindo News	Online	Bappenas Luncurkan Aplikasi PEP Online	25 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Ali Masduki
47.	Bisnis .tempo.co	Online	Bappenas Targetkan Emisi Karbon Turun 26 Persen, Ini Caranya	25 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas • Tjatur Sapto Edy, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat 	Imam Hamdi
48.	Beritasatu .com	Online	Pertumbuhan Ekonomi Harus Disertai Peningkatan Kualitas Lingkungan	25 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Ant/gor
49.	Katadata .co.id	Online	Perpres Soal Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Akan Diterbitkan	25 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Arief Kamaludin
50.	Kontan .co.id	Online	Pengusaha Tak Perlu Panik Soal Aturan Karbon	25 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Siti Rohmatullah
51.	Bisnis .tempo.co	Online	Bappenas Luncurkan Aplikasi Pemantau Rendah Karbon Online	25 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Imam Hamdi
52.	Koran Jakarta .com	Online	Pertumbuhan Harus Sejalan Peningkatan Kualitas Lingkungan	26 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Muhammad Adimaja
53.	Koran Tempo	Cetak	Pemerintah Atur Program Rendah Karbon	26 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas • Tjatur Sapto Edy, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat 	Retno Sulistyowati
54.	Media Indonesia	Cetak	Pembangunan Rendah Karbon Harus Jadi Arus Utama	26 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas • Tjatur Sapto Edy, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat 	Ths

No.	Media	Tipe Publikasi	Judul	Tanggal Terbit	Narasumber	Penulis
55.	Kontan	Cetak	Aturan Pembangunan Rendah Karbon Akan Diperkuat	26 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Siti Rohmatullah
56.	Koran Sindo	Cetak	PEP Online	26 Oktober 2017	Bambang Brodjonegoro, Menteri Bappenas	Ali Masduki (BERITA FOTO)
57.	Metro TV	TV	Hasil Panen Padi di Kupang Meningkat 100 Persen dengan Metode SRI	26 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	Resdhi Wibawa
58.	Media Indonesia	Cetak	Metode SRI Tingkatkan Produksi Padi Sampai 100%	27 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF 	Palce Amalo
59.	The Jakarta Post	Cetak	<i>SRI Rice Cultivation Yield Significant Results in NTT</i>	27 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> Murtiningrum, Sekretaris Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian UGM Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF Ir. Rohmat Supriadi, Kepala Biro Renortala Bappenas Frans Lebu Raya, Gubernur NTT Yanes Sain, Anggota Kelompok Petani Desa Tarus 	Djemi Amnifu
60.	Kompas	Cetak	Proyek Perubahan Iklim Dongkrak Ekonomi Warga	9 Desember 2017	Upaya pengendalian perubahan iklim memberikan dampak ganda, yaitu menekan emisi gas rumah kaca dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat	Elsa
61.	www.suronews.com	Online	ICCTF, Kurangi Efek Gas Rumah Kaca Untuk Perubahan Iklim Lebih Baik	9 Desember 2017	ICCTF sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam wujud nyata mengatasi Perubahan Iklim untuk Indonesia dan Dunia	
62.	Media Indonesia	Cetak	Pembangunan Rendah Karbon Diutamakan	11 Desember 2017	Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam penanggulangan perubahan iklim ialah penerapan kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK)	Denny

RINGKASAN BERITA

PUBLIKASI LIPUTAN MEDIA TENTANG PROGRAM ICCTF
AGUSTUS-DESEMBER 2017

"Bioslurry" Efektif untuk Penyubur Tanaman

Pemupukan dengan *bioslurry* lebih efektif dibandingkan dengan pupuk kimia. Pemanfaatan urine sapi untuk pupuk itu dipraktikkan di Desa Keningar, Sumber, dan Ngargomulyo di Kecamatan Dukun, Magelang, Jawa Tengah. *Bioslurry* lebih bernutrisi daripada pupuk kandang biasa karena mengandung banyak urea dan nitrogen. Bentuknya yang cair juga memudahkannya diserap tanaman. Purwanti, petani cabai dari Desa Keningar, mengungkapkan, perubahan tanaman yang dipupuk dengan *bioslurry* sangat drastis. Tanaman cabainya subur, berbuah lebat, dan produktif selain itu dengan pupuk *bioslurry*, ia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli pupuk. Program *bioslurry* ini merupakan salah satu proposal pemenang sayembara yang diadakan Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (ICCTF) yang bernaung di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan, program yang mereka ajukan harus sesuai dengan misi pemerintah terkait rencana aksi nasional untuk gas rumah kaca dan perubahan iklim.

Sumber : Kompas, hal 16

Pelestarian Alam Harus Sekaligus Mensejahterakan

Pemanfaatan hak guna hutan kemasyarakatan dan hutan negara untuk menyejahterakan warga penting dilakukan. Itu bertujuan agar pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana memberikan pemberdayaan keuangan. Manajer Program Javlec Panji Anom menjelaskan, jika tak dimanfaatkan finansial, warga menganggap menjaga hutan menjadi beban. Jadi muncul risiko pencurian kayu. Javlec adalah lembaga swadaya masyarakat penerima dana hibah dari Dana Perwakilan Perubahan Iklim Indonesia di bawah Bappenas. Organisasi nonpemerintah itu membina 20 desa di Gunungkidul. Warga ditingkatkan kapasitas dalam menjaga hutan negara dan hutan masyarakat seluas 700 hae. Penguatan kapasitas itu berupa pelatihan pembinaan tata kelola hutan, prosedur tebang pilih, penanaman tanaman tumpang sari dan pemanfaatan desa wisata.

Sumber : Kompas, hal 16

Meningkatan Stok Karbon Tak Hanya Lewat Penanaman Hutan Saja

Mitigasi emisi karbon terhadap perubahan iklim akibat efek rumah kaca tidak hanya berbicara soal penanaman pohon semata. Sinergitas harus ditempuh untuk menyelaraskan antara perencanaan kelola hutan, tata ruang desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari 20 desa yang mencakup sembilan kecamatan di Gunungkidul, stok karbon di atas permukaan tanah hanya 31,04 ton per hae. Jumlah itu termasuk buruk. Standar kelayakan stok karbon ideal yang ditetapkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berada pada kisaran 35-100 ton per hae. Untuk menambahkan stok karbon, Javlec mendistribusikan bibit 26.690 tanaman

kayu, 39.810 tanaman buah, dan 900 tanaman pelindung ke masyarakat. Javlec merupakan salah satu mitra pelaksana yang telah lolos seleksi pendanaan yang dikelola *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) pada tahun 2016. Dana hibah tersebut berasal dari *United States Agency for International Development*.

Sumber: Kompas.com

<http://sains.kompas.com/read/2017/08/09/150600323/meningkatan-stok-karbon-tak-hanya-lewat-penanaman-hutan-saja>

Pakai "Bioslurry", Panen Cabai Petani Ini Melimpah

Sukijo (46), petani di Dusun Banaran, Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, boleh bersenang diri. Tiga hari ke depan, dia akan kembali memanen cabai yang ditanamnya di lahan seluas 1.200 meter. Saat panen, dia bisa mendapatkan 35-40 kilogram cabai setiap tiga hari sekali dari 2.000 pohon. Siklus tanaman cabai mengalami perubahan setelah Sukijo tak lagi menggunakan pupuk kimia. Tanaman ini mampu bertahan hidup selama satu tahun dengan pupuk organik, sedangkan dengan pupuk kimia hanya mampu

hidup selama lima bulan. Pupuk organik tersebut merupakan hasil akhir dari pengolahan kotoran sapi dalam pembuatan biogas yang disebut *bioslurry*. Untuk membuatnya, para petani dibantu oleh Perkumpulan Sesami yang mendapat pendanaan dari *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) sejak 2016.

Sumber: Kompas.com
<http://sains.kompas.com/read/2017/08/08/160300823/pakai-bioslurry-panen-cabai-petani-ini-melimpah>

Menghijaukan Lahan Bekas Tambang Lereng Merapi

Lahan bekas tambang pasir banyak terdapat di sekitar gunung Merapi, salah satunya tambang kawasan Sumup di Kecamatan Dukun, Magelang Jawa Tengah. Pasca penambangan pasir, lokasi tersebut berubah menjadi lahan kritis yang kandas, gundul, dan sulit digunakan untuk usaha pertanian karena tingkat kesuburannya rendah. Namun masyarakatnya di kawasan sekitar tak henti mencari cara untuk kembali menghijaukan lahan kritis tersebut. Penerapan sejumlah teknologi pertanian seperti pupuk organik membuat lahan kritis tersebut kembali menjadi wadah subur bagi tanaman petani.

Kelompok Tani Hutan Ngudi Makmur melakukan inventarisasi hutan negara yang dikelola masyarakat di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (08/8/2017). *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) bersama Javlec melakukan pendampingan tata ruang desa yang didorong untuk menjadi bagian dari mitigasi perubahan iklim. Salah satunya, dengan adanya pengelolaan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat agar memiliki daya dukung dengan dijalankannya pendampingan untuk mendorong percepatan penambahan stok karbon di areal hutan.

Sumber:

1. Sindonews.com: <https://photo.sindonews.com/view/23827/pemberdayaan-kelompok-tani-hutan-untuk-mitigasi-berbasis-lahan>
2. Koran Seputar Indonesia, hal 10



Bertanam Sengon di Gunung Pasir

Kondisi Desa Keningar yang di penuh bekas penambangan pasir, mulai berubah sejak setahun terakhir. Yayasan Samahita Memetri Indonesia (Sesami) mulai menginisiasi masyarakat untuk mengkonservasi bekas tambang dengan menanam pohon sengon. Sengon segera di pilih lantaran memiliki kecepatan tumbuh yang cukup baik. Namun menumbuhkan sengon di lahan berpasir bukanlah hal yang mudah harus ada *treatment* khusus agar tanaman bisa tumbuh dengan baik. Melalui kegiatan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, Sesami menggunakan teknologi sederhana warga yang bergabung dalam Kelompok Keningar Hijau bekerja bakti membuat instalasi *biodigester*, sistem untuk mempercepat pembusukan bahan organik.

Sumber: Koran Tempo, hal 20



Energi Terbarukan dari Kotoran Sapi



Warga tiga desa di Magelang, Jawa Tengah, tak lagi pusing memikirkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran mereka berkurang drastis setelah adanya program pemanfaatan energi terbarukan dari kotoran sapi menjadi biogas yang dilakukan oleh Yayasan Sesami yang di-support Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Ketua Sesami, Yulius Krisdiyanto mengatakan, wilayah ini merupakan bekas galian tambang pasir lereng Merapi yang di eksploitasi pada 2005 sampai 2013 lalu, prihatin dengan keadaan alam Sesami mencanangkan program ini. Sementara itu, Kasubdit Litbang Pemberdayaan Sosial Bappeda Magelang Agus Widodo, berterimakasih kepada pihak ICCTF karena support yang diberikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Magelang untuk konservasi lingkungan.

Pupuk Cair dari Biogas. Yayasan Sesami di-support Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) berhasil memanfaatkan limbah atau *bioslurry* menjadi pupuk cair. Warga Desa Ngargomulyo, Kamis, mengakui *bioslurry* membuat tanaman lebih subur sehingga hasil panen yang didapat lebih optimal. Alhasil ia mendapatkan keuntungan penghasilan hingga Rp. 10 ribu sampai Rp. 20 ribu per kg. Sementara itu Ketua Kelompok Keningar Hijau, Sukijo mengatakan motivator seperti Sesami dibutuhkan. Sesami telah mengajarkan cara pembibitan bibit, pengolahan kompos, *bioslurry* hingga pembuatan *biodigester*. Ia berharap program ini berlanjut dan ada kerjasama dengan pemerintah desa, termasuk alokasi dana desa.

Sumber : Republik, hal 17

“Bioslurry”, Si Pupuk “Ajaib”. Proyek bioslurry baru diluncurkan beberapa bulan terakhir

Di tiga desa di Kecamatan Dukun, yakni Keningar, Sumber dan Ngargomulyo, ada 10 *biodigester*. Fungsi utama *biodigester* ialah menghasilkan gas yang berasal dari *bioslurry*. Sedangkan *bioslurry* itu sendiri adalah kotoran sapi bercampur urine dan air yang juga dicampur dengan *molase* dan zat lain yang dapat digunakan pula untuk membuat pupuk cair. Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrilzam mengatakan diperlukan riset lebih lanjut mengenai pemanfaatan *bioslurry* oleh dinas pertanian dan bersama perguruan tinggi. Diharapkan jika ditemukan hasil baku, kedepan *bioslurry* bisa dikembangkan di daerah lain.

Sumber: Kompas, hal 14



Memulihkan Lahan-lahan Bekas Tambang Pasir di Desa Sekitar Merapi

Desa Keningar yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Merapi mengalami kesulitan setiap kali terjadi erupsi. Menurut Sarpono, warga desa setempat, mengatakan bahwa kala erupsi desanya rusak tertutup pasir dan batu sehingga tanaman pertanian rusak dan pohon-pohon mati. Namun, menurut Sarpono setelah ada kerjasama dengan Sesami, LSM yang mendapat dana dari ICCTF ini, warga sangat terbantu dalam memetakan kembali lahan yang terkena erupsi dan juga memanfaatkan biogas dan *bioslurry*. Tercatat bahwa ICCTF memberikan bantuan dana hampir Rp 1 miliar untuk satu program dari Juli 2016-Desember 2017. Dalam catatan ICCTF, pemilik lahan pasca tambang yang menerima manfaat ada 200 keluarga di Keningar, 798 keluarga Ngargomulyo, dan 12 dusun di Sumber.

Sumber: www.mongabay.co.id
Url Link: <https://goo.gl/x7xqUV>

Menabung Karbon, Merawat Hutan ala Petani Gunungkidul

Darmiyanto, warga Kampung Dempul, Dusun Gebang, Desa Girisuko, Panggang, Gunungkidul, tinggal di sekitar kawasan hutan, sekaligus Ketua Kelompok Tani Ngudi Makmur. Ia bersama dengan tim Kelompok Tani melakukan cara yang unik untuk merawat hutan. Setiap pohon jati diberikan penanda pada batangnya. Penanda yang berupa kain putih berukuran 20 x 30 cm tersebut berisi map *tally sheet* pohon tunda tebang anggota kelompok tani. Ini catatan berisi jenis, keliling, dan kondisi pohon. Seperti catatan berupa nanti ditebang pada 2035 dan penjarangan baru sekitar 2020. Bagi petani, catatan ini membantu mencegah penebangan sebelum waktunya. Lebih dari itu, data sangat berguna dalam menghitung kandungan karbon. Pemberian keterangan pada pohon-pohon jati di hutan itu jadi pengetahuan yang diterapkan anggota Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KT-HKm) dalam menjaga kelestarian hutan.

Sumber: www.mongabay.co.id
Url Link: <https://goo.gl/j4yGFO>

Usaha Adaptasi Desa Terhadap Perubahan Iklim Melalui Budidaya Padi SRI (*System Of Rice Intensification*) "Berhasil Meningkatkan Hasil Panen Sampai 100% di Desa Tarus & Baumata, NTT"

Budidaya Sistem SRI Tingkatkan Produksi Padi di Kupang

Budidaya dengan *system of rice intensification* (SRI) terbukti mampu menaikkan produksi padi. Berdasarkan hasil penelitian oleh fakultas teknologi universitas gajah mada yang setahun terakhir mengembangkan sistem di desa Bautama dan kelurahan Tarus, kabupaten kupang, NTT. *System of rice intensification* merupakan salah satu alternatif budidaya padi sawah yang lebih hemat air dan rendah emisi. Proyek penelitian ini didanai *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) sekaligus sebagai upaya percobaan menekan emisi gas rumah kaca. Sistem ini sangat cocok untuk direplikasi di daerah kering, seperti NTT.

Sumber: *Republika.co.id*

URL : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/21/oy5rtdt414-budidaya-sistem-sri-tingkatkan-produksi-padi-di-kupang>

Gubernur NTT: Budidaya Padi SRI Layak Direplikasi

Gubernur NTT berharap *system of rice intensification* (SRI) patut dicontoh dan diimplementasikan oleh seluruh daerah di NTT. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produktivitas petani padi provinsi NTT berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2015. Akibatnya 20 persen kebutuhan beras di NTT harus didatangkan dari luar daerah seperti Surabaya dan Makassar. Oleh karena itu, dengan metode SRI, diharapkan akan ada perbaikan produktivitas padi di provinsi yang dipimpinnya.

Sumber: *Republika.co.id* dan *Republika Cetak*, halaman 3
URL: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/21/nasional/daerah/17/10/21/oy6ag2423-gubernur-ntt-budi-daya-padi-sri-layak-direplikasi>



Pola Tanam Padi "SRI" Cocok Diterapkan di Kupang

Penanaman menggunakan teknik SRI (*System of Rice Intensification*) mampu meningkatkan hasil panen hingga 100 persen dari bibit padi. hal ini sudah terbukti pada desa Bautama dan kelurahan Tarus, kabupaten Kupang, NTT. *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan FTP UGM membuat demplot SRI di Desa Tarus dan Desa Baumata sejak 2016. Hasil demplot menunjukkan terjadi peningkatan produktivitas padi dengan metode SRI. Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan bahwa metode SRI merupakan salah satu inovasi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus mengantisipasi perubahan iklim sejak diadopsi Indonesia pada tahun 2002.

Sumber & URL:

1. *Netral News*
http://www.netralnews.com/news/lingkungan/read/109396/teknik_penanaman_padi_dengan_sri_hasil
2. *Cendana News*
<https://www.cendananews.com/2017/10/pola-tanam-padi-sri-cocok-diterapkan-di-kupang.html>
3. *Teras News*
<http://terasnews.id/padi-sri-tingkatkan-hasil-panen-hingga-100-persen/>

Panen Raya Padi SRI di Kupang Tengah

Petani memanen padi hasil pengembangan budidaya bibit padi SRI (*System of Rice Intensification*) di sela Panen Raya Padi SRI di Kelurahan Tarus, Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (21/10/2017). *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), sebagai satu-satunya lembaga dana perwalian untuk perubahan iklim Indonesia beserta Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) sukses menerapkan pengembangan budidaya bibit padi SRI yang mampu meningkatkan hasil panen hingga naik 100% dari semula rata-rata hasil panen padi 5,6 ton/ha menjadi 12 ton/ha, dari bibit padi yang biasa digunakan dengan kebutuhan

air lebih sedikit. Metode SRI merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus sebagai upaya adaptasi untuk mengantisipasi perubahan iklim. Peneliti memasang *Field Monitoring System* (FMS), sebuah alat pengembangan teknologi telemetri untuk menganalisis iklim mikro seperti hujan, suhu, dan kelembapan tanah yang dapat diakses oleh kelompok tani di lokasi program jarak jauh.

Sumber: Sindo News

URL: <https://photo.sindonews.com/view/24957/panen-raya-padi-sri-di-kupang-tengah>

Metode SRI Tingkatkan Produksi Padi Sampai 100%

Penanaman padi dengan metode *system of rice intensification* data meningkatkan produksi padi sampai 100%. Metode ini sukses diterapkan *Indonesia Climate Change Trust Fund* bersama dengan Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada dan Universitas Kristen Area Wacana (UKAW) di lahan Kelompok Tani Rukun Tani di Desa Tarus, Kupang Tengah, Kupang Nusa Tenggara Timur. SRI merupakan metode berkelanjutan untuk pertumbuhan tanaman dengan menggunakan bibit berumur muda atau tujuh hari setelah pembenihan, jarak tanam lebar, pupuk organik dan irigasi terputus. ICCTF bertugas meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi Indonesia dalam menanggulangi dampak perubahan iklim. Direktur ICCTF Tonny Wagey mengatakan, ICCTF adalah satu satunya lembaga dana perwalian untuk perubahan iklim Indonesia.



Sumber: Media Indonesia Online, Media Indonesia Cetak halaman 21 dan Lintas NTT Online

URL:

1. Media Indonesia
<http://www.mediaindonesia.com/news/read/128373/sri-tingkatkan-produksi-padi-sampai-100/2017-10-21>
2. Lintas NTT
<http://www.lintasntt.com/metode-sri-tingkatkan-produksi-padi-sampai-100/>
3. Kaskus
<https://m.kaskus.co.id/thread/59eb6f7d92523328128b4589/sri-tingkatkan-produksi-padi-sampai-100>

Kekurangan Air Bukan Hambatan Hambatan Bertani di NTT, Ini Rahasiannya

Dengan periode musim kemarau yang lebih panjang, kekeringan adalah kejadian umum di Nusa Tenggara Timur. Untuk mengatasi hal itu, penanaman padi bisa dilakukan dengan cara *System of Rice Intensification* (SRI). Teknik ini akan menciptakan kenyamanan bagi padi untuk tumbuh. Dengan jarak yang lebih lebar, tak ada kompetisi untuk mendapatkan zat hara. Lalu, air yang tak merendam padi juga memungkinkan oksigen masuk dan membuat tanah lebih subur sehingga satu lubang padi bisa berisi hingga 120 anakan padi. FTP UGM telah mengenalkan SRI di Desa Baumata terhitung sejak November 2016. Hingga akhir Oktober 2017, telah terjadi tiga kali panen. Proyek ini merupakan salah satu dari tujuh program adaptasi dan ketangguhan yang dikelola oleh *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF)

Sumber: [Sains.kompas.com](http://sains.kompas.com)

URL: <http://sains.kompas.com/>

read/2017/10/22/180700123/kekurangan-air-bukan-hambatan-bertani-di-ntt-ini-rahasiannya

Tingkatkan Produktivitas Padi dengan Metode SRI

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Kristen Arta Wacana (UKAW) Kupang, melakukan Demonstrasi Plot (Demplot) Budidaya padi SRI yang dibarengi tanam konvensional di persawahan desa Desa Baumata kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (22/10/2017). SRI merupakan metode berkelanjutan untuk pertumbuhan tanaman dengan menggunakan bibit berumur muda atau tujuh hari setelah pembenihan, jarak tanam lebar, pupuk organik, irigasi terputus-putus, dan beberapa penyiangan yang memiliki produktivitas padi lebih tinggi dibandingkan dengan pengelolaan sistem konvensional. Program ini bertujuan untuk mengembangkan strategi ketangguhan iklim dan mencegah kerentanan petani serta lahan pertaniannya akibat kekeringan melalui budidaya SRI dan informasi pertanian berbasis teknologi aplikasi.

Sumber: [Sindo News](http://sindo.news)

URL: <https://photo.sindonews.com/view/24968/tingkatkan-produktivitas-padi-dengan-metode-sri>

Hasil Panen Meningkat Tanpa Perlu Banyak Air

Sistem pertanian intensif hemat air sebagai upaya adaptasi diklaim berhasil memberikan hasil panen berlipat pada demplot di Tarus dan Baumata, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diharapkan sistem tersebut bisa direplikasi dan diperluas penerapannya di daerah-daerah lain menurut Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

Sumber: [Kompas.id](http://kompas.id)

URL: <https://kompas.id/baca/nusantara/2017/10/22/hasil-panen-meningkat-tanpa-perlu-banyak-air/>

Hadapi Perubahan Iklim, Sistem Monitoring Pertanian Padi Diuji Coba

Dalam rangka mengantisipasi efek perubahan iklim, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada melakukan uji coba perangkat sistem monitor lahan (*Field Monitoring System*) berbasis IT yang disebut Telemetri. Telemetri ini berupa alat bersensor yang dipancarkan pada lahan percontohan yang ditanami secara SRI seluas 10 are yang ada di kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Adapun fungsinya diklaim bisa dimanfaatkan

untuk mengukur atau mendeteksi sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan padi seperti radiasi matahari, curah hujan, kelembaban, dan sejumlah faktor lain di dalam tanah seperti duhu dan unsur hara.

Sumber: industri.bisnis.com

URL: <http://industri.bisnis.com/read/20171022/99/701758/hadapi-perubahan-iklim-sistem-monitoring-pertanian-padi-diuji-coba>



Iklm NTT Cocok Kembangkan Padi SRI

Pengamat Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Ir Leta Rafael Levis, mengatakan iklim NTT Semi Arit yang belakangan cenderung panas sangat cocok untuk penanaman padi menggunakan teknik SRI (*System of Rice Intensification*). Selain cocok dengan iklim, penanaman padi menggunakan teknik SRI juga mampu meningkatkan hasil panen hingga 100 persen dari bibit padi yang biasa digunakan dengan kebutuhan air yang lebih sedikit. Saat ini, pemerintah NTT terus mendorong upaya penangkaran dan pengadaan benih seperti padi gogo bagi sekitar 64% lebih masyarakat NTT yang berprofesi sebagai petani karena daerah ini masuk sebagai daerah rawan kekeringan secara nasional.

Sumber: antaranews.com

URL: <https://kupang.antaranews.com/berita/4767/iklim-ntt-cocok-kembangkan-padi-sri>

Harvest Day

East Nusa Tenggara Timur Governor Frans Lebu Raya (third left) and Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) executive director Tonny Wagey (second left) harvest paddy grown using the rice intensification (SRI) method in Kupang on Saturday. The ICCTF and Gadjah Mada University's School of Agriculture are introducing the SRI method to farmers in the province.

Sumber: *The Jakarta Post Online dan The Jakarta Post Cetak* halaman 5

URL: <http://www.thejakartapost.com/news/2017/10/23/harvest-day.html>



ICCTF dan UGM Kembangkan Bibit Padi SRI di Kupang

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), sebagai lembaga dana perwalian untuk perubahan iklim Indonesia, bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) sukses menerapkan pengembangan budidaya bibit padi SRI (*System of Rice Intensification*). Bibit ini diklaim mampu meningkatkan hasil panen hingga 100 persen dan dapat tahan meski dengan kandungan air yang lebih sedikit. Bibit padi ini dikembangkan di desa Baumata, Tabenu dan Tarus, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode SRI menjawab tantangan masyarakat petani terutama di daerah kering dan rentan sebagai strategi

adaptasi perubahan iklim yang paling tepat guna. Kegiatan adaptasi dalam program ini bertujuan untuk mengembangkan strategi ketangguhan iklim dan mencegah kerentanan petani serta lahan pertaniannya akibat kekeringan melalui budidaya SRI dan informasi pertanian berbasis teknologi aplikasi.

Sumber : tekno.tempo.co

URL: <https://tekno.tempo.co/read/1027132/icctf-dan-ugm-kembangkan-bibit-padi-sri-di-kupang>

UGM Kembangkan Sistem Telemetri untuk Pertanian

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (FTP UGM) mengembangkan sistem telemetri untuk adaptasi pertanian. Sistem itu mengukur berbagai parameter meteorologi dan kondisi bawah permukaan tanah. Demikian diungkapkan Chusnul Arif dari FTP UGM. Dalam sistem itu, lima sensor mengamati kecepatan angin, kelembaban udara relatif, kelembaban tanah, radiasi (matahari), dan curah hujan. Data itu ditangkap lewat sensor dan dikirim ke pusat data di UGM. Berdasarkan analisis, petani akan tahu waktu tanam, menambah air, dan panen. (Kompas, 4)

Sumber: Kompas halaman 4

UGM Kembangkan Sistem Telemetri untuk Pertanian

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (FTP UGM) mengembangkan sistem telemetri untuk adaptasi pertanian. Sistem itu mengukur berbagai parameter meteorologi dan kondisi bawah permukaan tanah. Demikian diungkapkan Chusnul Arif dari FTP UGM, Minggu (22/10), di Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Dalam sistem itu, lima sensor mengamati kecepatan angin, kelembaban udara relatif, kelembaban tanah, radiasi (matahari), dan curah hujan. "Data itu ditangkap lewat sensor dan dikirim ke pusat data di UGM. Berdasarkan analisis, petani akan tahu waktu tanam, menambah air, dan panen." ujarnya. (ISW)

Bisakah SRI Menggantikan Cara Bertani Orang Indonesia?

Metode bertani *System of Rice Intensification* (SRI) telah masuk ke Indonesia sejak 2002 sebagai alternatif dari metode pertanian konvensional. Namun, hingga kini belum banyak lahan pertanian yang menerapkannya. Di Pulau Jawa saja, hanya beberapa lokasi yang menerapkannya. Antara lain di Tulungagung, Malang, Kediri, Situbondo. Para petani di daerah itu diperkenalkan SRI oleh Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (FTP UGM). SRI memiliki keunggulan tersendiri bila dibandingkan dengan metode pertanian konvensional. Ia tidak membutuhkan banyak air sehingga sangat sesuai untuk diterapkan di daerah-daerah seperti Kupang, NTT yang curah hujannya sedikit dan memiliki risiko gagal panen yang lebih rendah.

Sumber: sains.kompas.com

URL: <http://sains.kompas.com/read/2017/10/24/214900123/bisakah-sri-menggantikan-cara-bertani-orang-indonesia->

Panen Raya Padi SRI

Program Manager Project SRI Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) FTP UGM Bayu Dwi Apri Nugroho menjelaskan alat *Field Monitoring System* (FMS) kepada petani di sela Panen Raya Padi *System of Rice Intensification* (SRI) di Tarus, Kupang Tengah, NTT pada hari Sabtu 21 Oktober 2017. ICCTF dan Fakultas Teknologi Pertanian UGM sukses menerapkan pengembangan budi daya bibit padi SRI yang mampu meningkatkan hasil panen hingga naik 100%.

Sumber: Koran Sindo halaman 19



PANEN RAYA PADI SRI

Program Manager Project SRI Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) FTP UGM Bayu Dwi Apri Nugroho menjelaskan alat *Field Monitoring System* (FMS) kepada petani di sela Panen Raya Padi *System of Rice Intensification* (SRI) di Tarus, Kupang Tengah, NTT, Sabtu (21/10). ICCTF dan Fakultas Teknologi Pertanian UGM sukses menerapkan pengembangan budi daya bibit padi SRI yang mampu meningkatkan hasil panen hingga naik 100%.

Inovasi dari Timur

Kekeringan menjadi salah satu masalah bagi pertanian di Kupang, khususnya pertanian berbasis lahan basah, seperti padi. Akibatnya, dari lahan seluas 214.000 hae hingga 260.000 hae bisa susut menjadi hanya 60.000 hae saat musim kering tiba. Permasalahan inilah yang coba dipecahkan oleh Yanes Sain, petani yang juga Dosen Pertanian Universitas Kristen Arta Wacana, Kupang. Melalui sistem tanam SRI (*System of Rice Intensification*) hasil sejumlah ilmuwan Universitas Gadjah Mada yang didanai oleh *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF), Yanes memutuskan untuk berani mencoba. Hasilnya, Yanes berhasil memanen 6 kuintal gabah dari demplot seluas 10 are. Melihat hasilnya yang sangat memuaskan, Yanes pun memutuskan untuk mengaplikasikan sistem SRI pada seluruh areal lahannya yang mencapai 5 hae.

Sumber: *Bisnis Indonesia* halaman 31



Gubernur NTT Minta Petani NTT Tingkatkan Metode SRI

Gubernur Nusa Tenggara Timur, (NTT) Frans Leburaya meminta kepada para petani di wilayah NTT agar dapat meningkatkan metode *System of Rice Intensification* (SRI) karna mampu meningkatkan produksi padi hingga 100 persen. Menurut Frans, metode SRI dapat berkelanjutan untuk pertumbuhan tanaman dengan menggunakan bibit berumur mudah, metode ini berbeda dengan sistim konvensional yang menggunakan bibit berumur panjang. Sedangkan menurut Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF mengungkapkan metode SRI salah satu upaya untuk menjawab tantangan para petani terutama didaerah lahan kering dan rentan, program ini dilakukan untuk mengembangkan strategi ketangguhan iklim dalam mencegah kerentanan petani dan lahan pertanian akibat kekeringan.

Sumber: *Realita.co*
URL: <http://news.realita.co/gubernur-ntt-minta-petani-ntt-tingkatkan-metode-sri>

Adaptif Perubahan Iklim, Padi SRI Diperkenalkan untuk Wilayah Bercurah Hujan Rendah

Tantangan pengembangan budidaya padi di lahan yang curah hujannya rendah seperti Nusa Tenggara Timur adalah ketersediaan air untuk area persawahan yang minim. Sistem yang saat ini dicobakan adalah budidaya padi lewat SRI (*System of Rice Intensification*) yang mampu meningkatkan hasil panen dengan kebutuhan air yang lebih sedikit. Hasil penelitian di berbagai negara SRI meningkatkan produktivitas padi hingga 100 persen seperti di Madagaskar, 65% di Afghanistan, 42% di Irak, dan 11.3% di Tiongkok. Dalam uji coba demplot di Desa Baumata, Tabenu dan Tarus, Kabupaten Kupang, buah kerjasama *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan Departemen Teknik

Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), sistem ini sukses diterapkan. Jika rata-rata metode konvensional menghasilkan 5-6 ton/ha, dengan metode SRI di Baumata mampu menambahkan produktivitas padi 3 ton/ha dari cara konvensional. Di Desa Tarus yang semula rata-rata hasil panen padi 5,6 ton/ha, menjadi 12 ton/ha dengan metode SRI pada satu musim tanam, yaitu musim hujan awal tahun.

Sumber: *Mongabay.co.id*
URL: <http://www.mongabay.co.id/2017/10/24/adaptif-perubahan-iklim-padi-sri-diperkenalkan-untuk-wilayah-bercurah-hujan-rendah/>

Tanam Padi SRI Cocok di NTT

Penanaman padi menggunakan metode SRI (*System Of Rice Intensification*) yang dilakukan oleh *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) sebagai satu-satunya lembaga dana perwalian untuk perubahan iklim Indonesia dan Departemen Teknik Pertanian, Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) di Provinsi NTT sangat cocok. Namun teknologi yang sangat bagus dan sudah diujicoba pada lahan pertanian di Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah dan Desa Baumata Kecamatan Tabenu Kabupaten Kupang tersebut dikatakan berhasil apabila semua petani di NTT menggunakannya. Gubernur NTT Frans Lebu Raya, teknologi SRI tersebut sangat cocok di NTT sebab menghemat air dan produktivitasnya memang dapat meningkat 2 kali lipat.

Sumber: Cendana News

URL: <https://www.cendananews.com/2017/10/penanaman-padi-sri-cocok-di-ntt.html>

Tiga dari Target Tujuh Bendungan Sudah Dibangun di NTT

Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya menyebutkan, bendungan Raknamo, Rotiklot dan Napunggete sedang dibangun sementara Desember bendungan di Tenef TTS yang akan menampung 17 juta kubik air yang segera dilakukan peletakan batu pertamanya. Sementara yang tersisa bendungan Lambo di Nagekeo, Kolhua dan Manekin. Selain bendungan dan waduk, pihaknya juga mendorong pembangunan embung dengan menggunakan dana APBN, APBD I, APBD II dan Dana Desa, sebab NTT kondisi wilayahnya kering sehingga butuh banyak penampung air agar tidak terbuang percuma.

Sumber: Cendana News

URL: <https://www.cendananews.com/2017/10/tiga-dari-target-tujuh-bendungan-sudah-dibangun-di-ntt.html>

Teknologi dan Bendungan Bantu Kupang Hadapi Perubahan Iklim

Tim dari *Indonesia Climate Change Trust Fund* yang diketuai Bayu Dwi Apri Nugroho, ahli Klimatologi Pertanian dan Lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), memprediksi terjadi tren perubahan suhu udara sebagai bagian dari perubahan iklim di Kupang Nusa Tenggara Timur NTT dalam kurun waktu 2015-2040. Untuk bisa mengadaptasi tersebut, para ilmuwan ini juga tengah mengembangkan seperangkat alat monitor lahan yang diadopsi dari teknologi di Jepang yang dapat menampung semua data yang berkaitan dengan unsur iklim. Ke depannya, akan dikembangkan sebuah aplikasi berbasis *android* sehingga para petani bisa mengakses langsung hasil analisis lahannya untuk bisa membantu perkiraan waktu tanam, pengairan dan proses lain di waktu yang tepat baik saat ini maupun ketika terjadi perubahan iklim. Sementara itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya berharap pembangunan tujuh embung di Nusa Tenggara Timur bisa membantu ketersediaan air di Nusa Tenggara Timur yang saat ini terkenal sangat kering.

Sumber & URL:

1. *Bisnis Indonesia*
<http://industri.bisnis.com/read/20171025/99/702695/teknologi-dan-bendungan-bantu-kupang-hadapi-perubahan-iklim>
2. *Kalimantan.bisnis.com*
<http://kalimantan.bisnis.com/read/20171025/99/702695/teknologi-dan-bendungan-bantu-kupang-hadapi-perubahan-iklim>



Hasil Panen Padi di Kupang Meningkat 100 Persen dengan Metode SRI

Metro TV

URL: <http://video.metrotvnews.com/metro-pagi-prime-time/9K5RGjyN-hasil-panen-padi-di-kupang-meningkat-100-persen-dengan-metode-sri>

SRI Rice Cultivation Yield Significant Results in NTT

The Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) and Universitas Gadjah Mada School of Agriculture have joined hands to develop and implement a rice intensification (SRI) method to grow paddy in Kupang regency, East Nusa Tenggara (NTT). The SRI seedlings have yielded a more productive harvest; up to 100% higher than regular rice seedlings. ICCTF executive director Tonny Wagey said that SRI method was an innovative and sustainable way of cultivating rice that resulted in high productivity by using 7-day-old seedlings, greater plant spacing, organic fertilizer and more efficient irrigation.

Sumber: The Jakarta Post halaman 5



Proyek Perubahan Iklim Dongkrak Ekonomi Warga

Upaya pengendalian perubahan iklim memberikan dampak ganda, yaitu menekan emisi gas rumah kaca dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Model pembangunan ke depan menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Medrizam menyebutkan Indonesia termasuk negara berkembang yang sangat aktif menggalang komitmen dan aksi untuk mengendalikan perubahan iklim. Namun mengaitkan pengendalian emisi dengan tidak mengabaikan pertumbuhan dan pengurangan ekonomi. Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey menyampaikan proyek-proyek yang dikembangkan diharapkan direplikasi para pemangku kepentingan. (Kompas, 14)

(kompas.id, <https://goo.gl/Q63WHp>)
Kompas, 09 Desember 2017 Hal. 14

ICCTF, Kurangi Efek Gas Rumah Kaca Untuk Perubahan Iklim Lebih Baik

ICCTF sebagai salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah dalam wujud nyata mengatasi Perubahan Iklim untuk Indonesia dan Dunia. Peralannya Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mampu menurunkan efek gas rumah kaca juga sebagai salah satu negara yang mempunyai CO₂ terbanyak. Direktur Eksekutif ICCTF, Tonny Wagey, menjelaskan bahwa ICCTF telah melakukan hal ini sejak tahun 2016, salah satu tujuannya mencegah kebakaran hutan (karhutla). Yang mana kebakaran ini penyebabnya macam-macam, biasanya kebiasaan menanam dengan membakar lahan, hal itu salah satu cara yang lebih cepat dalam membuka lahan. Ini yang menimbulkan tidak boleh lagi membuka lahan dengan membakar.

(<http://www.suronews.com>, <https://goo.gl/rB2TiA>)

Cilacap Sukses Ubah Sampah Menjadi Energi Baru

Pemerintah Indonesia telah menyoroti perubahan iklim sejak 2005, kita mulai menyoroti isu perubahan iklim bagaimana kita masukkan dalam perencanaan pembangunan. 2007 kita jadi tuan rumah di Bali, ini momentum besar buat pemerintah. Emisi sudah berhasil diturunkan 13,54% pada 2016. Faktornya juga tidaklah mudah, untungnya ini tidak banyak hujan, tapi kalau sudah elnino lagi seperti 2015, dan 1998, harus berhati-hati. Sebagaimana Presiden sangat konsen jangan sampai kejadian 2015 terulang lagi. Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, MPE, mengatakan, bahwa banyak sekali investasi-investasi yang di *drive* oleh pusat. Ternyata banyak otonomi daerah, tapi dominasi tetap saja ada di pusat. Ekspektasi pemda ke pusat masih sangat besar, pemerintah pusat harus tetap membuktikan *support* yang ujungnya harus sustainable. Contohnya Cilacap yang telah berhasil mengubah sampah menjadi energi baru dan terbarukan (bio massa).

(<http://www.suronews.com>, <https://goo.gl/4tHFCf>)

Pembangunan Rendah Karbon Diutamakan

Pembangunan Rendah Karbon Diutamakan

SALAH satu bentuk komitmen pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim ialah penerapan kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK). Kebijakan ini disusun untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui upaya pemertanian, perikanan, dan perkebunan rakyat dari berbagai sektor sehingga meningkatkan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. "PPRK ini nantinya akan menjadi hal yang diutamakan ketika kita membuat perencanaan pembangunan jangka menengah yang berikutnya, yaitu untuk 2020-2024, sehingga kedepan saat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi juga telah memperhatikan bagaimana menjaga kualitas lingkungannya sekaligus mengatasi masalah sosial," kata Direktur Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Medrilzam, dalam media *aktif* yang bertajuk *Membangun Perumbuhan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan yang Aman dan Berkelanjutan*.
 Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan perlu ada kesadaran dan peran serta seluruh aspek, golongan, masyarakat dan tak lepas juga peran generasi muda untuk mengetahui dampak perubahan iklim. "Sikap acuh terhadap perubahan iklim bisa jadi menjadi pilihan untuk menyuarakan kesetiaan iklim," ujar Tony. Ia menambahkan, ICCTF menyelaraskan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, termasuk mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta upaya adaptasi perubahan iklim melalui proyek-proyek kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak swasta. "Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sampai 29% dari tahun 2005 di 2020 dan pada 2030 sampai 29% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% dengan dukungan internasional." (TasH3)

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam penanggulangan perubahan iklim ialah penerapan kebijakan perencanaan pembangunan rendah karbon (PPRK). Direktur Lingkungan Hidup Bappenas mengatakan PPRK ini nantinya akan menjadi hal yang diutamakan ketika kita membuat perencanaan pembangunan jangka menengah yang berikutnya, yaitu untuk 2020-2024, sehingga kedepan saat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi juga telah memperhatikan bagaimana menjaga kualitas lingkungannya sekaligus sosial. Sementara itu, Direktur Eksekutif Tonny Wagey mengatakan perlu ada kesadaran dan peran serta seluruh aspek, golongan, masyarakat dan tak lepas juga peran generasi muda untuk mengetahui dampak perubahan iklim. (www.mediaindonesia.com) (Media Indonesia, 20) Media Indonesia. 11 Desember 2017, Hal. 20

Inggris Janjikan 3 Juta Poundsterling Untuk Cegah Kebakaran Hutan Indonesia



Jambi (ANTARA News) - Pemerintah Inggris berjanji akan memberikan bantuan dana sebesar 3 juta poundsterling untuk lima provinsi di Indonesia sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Tapi sebenarnya kita bisa berikan lebih besar dari itu, nanti saya bicarakan dengan pak gubernur. Asalkan ada komitmen yang tinggi untuk mencegah Karhutla ini," kata Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Moazzam Malik, saat menghadiri peluncuran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jambi tentang kebakaran hutan dan lahan di Jambi, Senin [.....]

Sumber: Antaranews, 13 Maret 2017

Beri Bantuan Alat Kebakaran

BEBERAPA bulan ke depan akan memasuki musim kemarau. Antisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) memberi bantuan peralatan kebakaran hutan dan lahan di 10 desa bentang pesisir Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya.

Tim leader ICCTF Eko Putranto menuturkan, kejadian bencana kabut asap di beberapa bagian wilayah Indonesia 2015, amat merugikan bangsa Indonesia. Tak sedikit jiwa yang hilang akibat kejadian tersebut [.....]

Sumber: Pontianak Post (5 April 2017)





Perkumpulan Pancur Kasih dan ICCTF Tanam 65.400 Bibit

Tanaman Hutan Lokal untuk Restorasi Gambut dan Kesejahteraan Petani

DUA tahun lalu, pada Konferensi Para Pihak (COP 21) dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) di Paris, Perancis, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Pemerintah Indonesia mengurangi emisi sebesar 29% (upaya nasional) dan 41% (bantuan internasional) pada 2030.

Dalam bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah menerapkan one map policy dengan menetapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari, serta membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG).

Sumber: Pontianak Post, Rabu, 31 May 2017 09:30



KEBAKARAN LAHAN

Dorong Peran Masyarakat dalam Restorasi Gambut

BANGKINANG, KOMPAS - Badan Restorasi Gambut menggalang partisipasi masyarakat untuk mempercepat restorasi ekosistem gambut. Itu bertujuan mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selain membangun sekat kanal yang menyimpan air secara pasif, peran warga diperkuat, terutama di lokasi vital, untuk mencegah dan memadamkan api [...]

Sumber: Kompas (14 Juli 2017)





Aksi Kerja Bersama untuk Restorasi Gambut

PALANGKA RAYA-Rombongan dua Kedutaan Besar (Kedubes) Norwegia Mr Veegard Kaale dan Kedubes Inggris Ida Suriyanti serta Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia (BRG RI) Nazir Foad beserta rombongan berkunjung ke Kalteng. Mereka disambut langsung oleh Gubernur Kalteng H Sugiarto Sabran beserta jajarannya. Kedatangan dua dubes ini untuk menghadiri launching aksi

kerja bersama restorasi gambut menuju Kalteng Berkah di Kabupaten Pulang Pisau.

Setelah menjumpai Gubernur Kalteng H Sugiarto Sabran di ruang VIP Bandara Tjilik Riwut, rombongan langsung bertolak ke Desa Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, guna mengikuti rangkaian kegiatan yang telah di-agendakan oleh panitia pelaksana.

► Baca: Aksi...Hlm 7

Peluang dan Tantangan

Oleh: Dr. Tonny Wagey, Executive Director ICCTF

Waskito kini sedikit bernapas lega, dia tidak lagi menggantungkan hidup dengan menebang pohon, menjual kayu ataupun membuat arang. Gergaji mesin yang dulu akrab dengannya sekarang sudah ditanggalkan. Kesehariannya kini, disibukkan dengan membudidayakan lebah madu yang nilai jualnya lebih tinggi dan menjanjikan. Semenjak budidaya lebah menjadi sumber pencaharian utama warga, mulai muncul kesadaran warga bahwa bunga-bunga pohon tersebut adalah sumber pangan bagi lebah yang dibudidayakan. Dampaknya warga Kedung Poh tak lagi menebang pohon sehingga desa Kedung Poh menjadi Desa Zero Logging.

Secara ekonomi hasil budidaya lebah madu seperti yang dilakukan Waskito dan kelompoknya yang memiliki 500 kotak budidaya sangat menjanjikan. Dalam 1 kotak budidaya dapat menghasilkan 1.5 kg madu murni yang mempunyai nilai jual Rp 200.000/

kg. Sekali panen Waskito dapat menghasilkan 750 kg madu dengan nilai jual Rp 150 juta. Dalam 1 tahun panen dapat di lakukan 2 kali sehingga potensi pendapatan bisa mencapai Rp.300 juta atau rata-rata Rp 25 juta per bulan. Pendapatan Waskito melalui budidaya madu ini bertolak belakang dengan apa yang ia geluti dahulu sebagai penebang pohon secara liar dan menjual kayu yang hanya menghasilkan keuntungan Rp 1,5 juta per ton atau Rp.1.500 per kg yang juga tidak pasti ia dapatkan setiap bulannya.

Menurut kajian Second National Communication penurunan emisi 26 persen akan membutuhkan biaya sebesar Rp. 83,3 triliun rupiah per tahun hingga tahun 2020. Ini merupakan kebutuhan kontribusi Indonesia saja. Padahal, APBN 2017 hanya menganggarkan sekitar Rp 12 triliun untuk perlindungan lingkungan hidup, atau hanya sekitar 14 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk menurunkan emisi per tahun.

Dengan terbatasnya dana yang tersedia untuk membiayai mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim tersebut maka peran serta pihak eksternal seperti mitra pembangunan internasional dan pihak swasta sangat dibutuhkan. Berdasarkan data dari Climate Fund Update dan 2016 Biennial Kajian, setiap tahun setidaknya tersedia dana sebesar USD 42miliar (Rp 559 triliun) sebagai bantuan negara-negara maju kepada negara berkembang untuk menanggulangi persoalan perubahan iklim. Jumlah tersebut diharapkan meningkat menjadi USD 67miliar (Rp 891 triliun) per tahun di 2020. Hal ini menunjukkan ada begitu banyak potensi untuk pendanaan bagi usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

ICCTF (The Indonesia Climate Change Trust Fund), satu-satunya lembaga dana perwalian untuk perubahan iklim di Indonesia, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah mendapatkan dana sebesar Rp 185,6 miliar. 30 persen dana tersebut datang dari APBN dan sisanya datang dari berbagai

Restorasi Gambut Diperkuat dengan Aksi Bersama

PULANG PISAU, KOMPAS — Restorasi lahan gambut dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah diperkuat dengan peluncuran Program Aksi Bersama. Aksi bersama itu juga bertujuan untuk menjaga kemandirian masyarakat yang

berkelanjutan. Hal itu terungkap saat peluncuran Program Aksi Bersama di Desa Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat (22/9). Program itu diinisiasi [.....]

Sumber: Kompas (22 September 2017)

Perubahan Iklim Indonesia

pendanaan dari partner ICCTF seperti United Kingdom Climate Change Unit (UKCCU), United States Agency for International Development (USAID) dan pemerintah Kerajaan Denmark (DANIDA). Dengan besaran jumlah dana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih sangat minim dan masih dibutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk mencapai target pemerintah Indonesia mengenai penurunan emisi. ICCTF memiliki tiga fokus area penting sekaligus dalam upaya adaptasi dan mitigasi. Pertama, mitigasi berbasis lahan bertujuan untuk mengurangi emisi yang berasal dari berbagai aktivitas berbasis lahan. Kedua, mitigasi berbasis energi bertujuan untuk mengurangi emisi secara nyata dalam hubungannya dengan pasokan energi dan kebutuhan energi. Terakhir adaptasi dan ketangguhan bertujuan untuk memperkuat kapasitas penduduk dan institusi lokal, serta masyarakat yang rentan, untuk beradaptasi dan meningkatkan ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim.

Salah satu strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang berdampak positif adalah upaya budidaya padi SRI (System of Rice Intensification) merupakan program adaptasi ketangguhan yang didanai ICCTF dengan mitra pelaksana Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Metode ini menjawab tantangan masyarakat petani terutama di daerah kering dan rentan terhadap perubahan iklim yang mengakibatkan musim kemarau lebih panjang di NTT dibandingkan daerah lainnya. Masyarakat petani di Desa Baumata, Nusa Tenggara Timur merasakan dampak positif yaitu jumlah hasil panen padi mereka meningkat sebesar 20 persen.

ICCTF rencananya akan melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan untuk menunjang fungsinya sebagai National Trust Fund. Secara global, praktek pendanaan melalui lembaga perbankan dalam Climate Fund telah mulai dilakukan sejak 2009

melalui pinjaman. Di tahun 2016, pinjaman dari lembaga perbankan dan pemerintah negara maju telah mencapai USD5.7miliar (Rp76 triliun) kepada Climate Fund. Selain itu pendanaan bersifat partisipasi ekuitas dalam Climate Fund Project juga mulai marak dengan total pendanaan di tahun 2016 sebesar USD56juta (Rp745miliar), padahal pada 2014 belum ada pendanaan bersifat ekuitas. Melalui transisi ini, ICCTF diharapkan dapat mengajak masyarakat berkolaborasi dalam berbagai pendekatan menghadapi perubahan iklim dengan kearifan lokal serta mengembangkan jaringan pelaku usaha dalam hal pembiayaan yang menjadi kami percaya akan menjadi kunci dalam kesuksesan usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Kami berharap ICCTF dapat menjadi pusat informasi perubahan iklim yang didasarkan atas pengalaman dalam melakukan berbagai program terkait perubahan iklim.

Opinion Article (Koran TEMPO 7 November 2017)

Mekanisme Pendanaan Perubahan Iklim & Ekonomi Rendah Karbon

"Perubahan iklim tidak hanya menyangkut isu lingkungan semata, tetapi juga harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan"

Konferensi perubahan iklim internasional atau biasa disebut dengan United Nations Framework Convention on Climate Change – Conference of the Parties (UNFCCC – COP 23) baru saja selesai digelar di Bonn, Jerman pada 6-17 November 2017. Forum ini menekankan kembali kepada seluruh negara pihak UNFCCC untuk terus berkomitmen dalam menghadapi isu perubahan iklim. Pertemuan ini juga bertujuan mendorong [.....] Untuk mendukung implementasi PPRK dalam hal pendanaan isu perubahan iklim secara optimal, Pemerintah membangun Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) pada tahun 2009. ICCTF dibentuk sebagai upaya untuk mendukung mekanisme

pendanaan sekaligus untuk mengharmonisasikan sumber pendanaan yang tersedia baik dari dalam maupun luar negeri. ICCTF terbukti mampu berjalan sebagai salah satu instrumen pendanaan perubahan iklim yang secara signifikan mendukung upaya nasional penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) serta upaya adaptasi terhadap perubahan iklim melalui proyek-proyek kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (CSO), Universitas dan pihak Swasta [.....]

Advertorial (Koran TEMPO 9 November 2017)

JEJAK HIJAU

Pelet Ternak dari Gulma Lahan Gambut

HINGGA kini pembersihan gulma di lahan gambut dengan cara pembakaran masih banyak dilakukan warga. Akibatnya, potensi bencana kebakaran lahan pun tinggi, belum lagi efek laju pemanasan global akibat besarnya emisi karbon [.....] Setelah menemukan komposisi pakan ternak yang tepat dari gulma lahan gambut, peneliti kemudian menggelar pelatihan kepada kelompok wanita gambut di daerah-daerah itu yang merupakan binaan Riau Women Working Group. Pelatihan yang dimulai Oktober tersebut juga dilaksanakan dengan kerja sama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) [.....]

Sumber: Media Indonesia (16 Desember 2017)

JEJAK HIJAU

Pelet Ternak dari Gulma Lahan Gambut

HINGGA kini pembersihan gulma di lahan gambut dengan cara pembakaran masih banyak dilakukan warga. Akibatnya, potensi bencana kebakaran lahan pun tinggi, belum lagi efek laju pemanasan global akibat besarnya emisi karbon.

Meski begitu, kegiatan pembakaran juga tidak terlarang karena memang dimungkinkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada ayat 1 pasal tersebut, kegiatan pembakaran lahan dengan cara pembakaran terencana yang dilarang. Namun, ayat 2 pasal tersebut menyatakan ketentuan pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Saat ini cara ekonomis untuk mendorong warga meninggalkan kebiasaan membakar lahan ditawarkan peneliti dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bentarbaru, Kalimantan Selatan. Dua peneliti ini adalah Marini Kristi dan Santoso, memenuhkan permintaan gulma lahan gambut sebagai pelet pakan ternak.

Inovasi tersebut dibuat karena gulma lahan gambut memiliki senyawa-senyawa organik yang terdapat pada pakan ternak (pelet) buatan pabrik. Senyawa seperti protein, magnesium, hingga zat besi terkandung dalam berbagai tanaman gulma lahan gambut, seperti daun belalai, padi, ubi kayu, dan lamtore.

Setiap daerah itu memiliki ke-terediaan lahan yang berbeda. Di Kecamatan Medang Kampai, Dumai,

Riau saya diminta melatit belom-pok wanita gambut. Yang tersedia di sana padi, ya, kita gunakan itu. Tanaman itu juga menjadi salah satu indikator lahan gambut itu tergenang air. Tumbuhan lainnya daun ubi kayu, kedelai, hingga tanaman apa-apa," kata Marini kepada Media Indonesia, Kamis (4/12).

Setelah menemukan komposisi pakan ternak yang tepat dari gulma lahan gambut, peneliti kemudian menggelar pelatihan kepada kelompok wanita gambut di daerah-daerah itu yang merupakan binaan Riau Women Working Group. Pelatihan yang dimulai Oktober tersebut juga dilaksanakan dengan kerja sama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Tak hanya proses pembuatan, kedua peneliti juga mengajarkan pemersihan bahan baku dengan sistem panti caru. Padi yang baik, kata Marini, berumur 40 hari setelah ditebas. Karena itu, ia menggariskan warga untuk memanen setiap minggu dengan tempat yang sudah diletakkan terlebih dahulu.

Untuk tanaman apa-apa, ia menyarankan itu dibudidayakan dengan sistem terpal agar tidak tercemar oleh limbah rumah tangga ataupun oli kendaraan bermotor. Kini, kelompok wanita gambut sudah mahir memproduksi pelet dan sedang menjajal kerja sama dengan peternak ikan nila.

"Biarinya tidak sulit, hanya butuh waktu sekitar satu hingga dua hari. Pertama tunggu tanaman layu, kedua mulai digiling dengan alat seperti gilingan daging, kemudian dijemur," pungkasi laki-laki yang juga sudah melatih warga Singkawang, Kalimantan Barat, serta Balai Penelitian Kehutanan Pekanbaru. Namun, ia akan tetap memper-



PELATIHAN: Para perempuan dari kelompok binaan Riau Women Working Group mengikuti pelatihan pembuatan pakan ternak berbasis gulma yang ada di lahan gambut.

juangkan agar masyarakat bisa kembali mendapatkan bantuan dana untuk membeli kebutuhan memproduksi pelet organik tersebut. Hal ini dilakukan supaya tidak ada lagi oknum yang membuka lahan gambut dengan metode bakar.

Sementara itu, Marini menegatkan produksi pelet organik membutuhkan biaya yang lebih kecil. Hanya besar di awal untuk pembelian alat. Mesin penggiling, kata Marini, berisiko pada harga Rp4 juta, lalu ditambah modal membeli belalai, kampak, serta ubah dan tenaga untuk membat dan mencari bahan-bahan yang ada di sekitar. Mesin maksimal bisa menghasilkan produksi hingga 200 kilogram per hari.

"Kalau di pasaran harga pelet pabrik itu Rp7.000-Rp8.000 per kilogram. Nah saya takut, biaya produksi untuk pelet organik sekitar Rp1.000 per kilogram dan bisa dijual dengan harga Rp4.000, barangnya sudah bersaing," tukanya. (WindM3)



BERSANG: Pelet yang dibuat dari tanaman padi itu diperkenalkan kea menyandang harga pelet pabrik.



Pepaya hasil penanaman yang memanfaatkan model sistem irigasi tetes berbasis sumber energi dari solar panel yang merupakan program kerjasama antara ICCTF dan Universitas Mataram di Kabupaten Lombok Utara, NTB.



Masyarakat binaan YEU mendapat juara 1 nasional kelompok tani hutan.





Petani dari kelompok Keningar Hijau sedang memanen cabe yang ditanam menggunakan pupuk *bioslurry*.

ICCTF Sekretariat

Gedung Wisma Bakrie 2, Lt. 20,
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2,
Jakarta 12920, Indonesia

T (+62-21) 5794 5760

F (+62-21) 5794 5759

E sekretariat@icctf.or.id



MITIGASI | ENERGI | ADAPTASI

 www.icctf.or.id

 ICCTF_ID

 icctfofficial

 Indonesia Climate Change Trust Fund